



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANAN MEDIA MAINSTREAM AMERIKA DI BALIK
DOKTRIN BUSH:
ANALISIS KONTEN PEMBERITAAN DALAM THE NEW
YORK TIMES PASCA TRAGEDI 9/11 SAMPAI LAHIRNYA
KEBIJAKAN GLOBAL WAR ON TERROR**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
pada Program Studi Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional**

**RONI SATRIA
1006743771**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI KAJIAN TERORISME DALAM KEAMANAN
INTERNASIONAL
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Roni Satria

NPM : 1006743771

Tanda Tangan :

Tanggal : 22 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Roni Satria
NPM : 1006743771
Program Studi : Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional
Judul Tesis : Peranan Media Mainstream Amerika di Balik Doktrin Bush:
Analisis Konten Pemberitaan dalam the New York Times
Pasca Tragedi 9/11 Sampai Lahirnya Kebijakan Global War
on Terror

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Makmur Keliat

Sekretaris Sidang: Asra Virgianita, S.Sos., M.A

Pembimbing : Dra. Dwi Ardhanariswari, M.Phil

Penguji : Budiarto Shambazy, M.A

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat
Tanggal : 22 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk merampungkan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih saya haturkan kepada:

- 1) Dra. Dwi Ardhanariswari, M.Phil selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan tulus menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendorong, menyemangati, dan mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini. Keyakinan dan kepercayaan yang diberikan menjadikan saya mampu melewati masa-masa sulit dan menjadikannya cambuk untuk dapat menjadikan tesis ini salah satu *masterpiece* dari hasil pembelajaran saya;
- 2) Dr. Makmur Keliat selaku Ketua Program Studi Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan tesis ini;
- 3) Budiarto Shambazy, MA selaku penguji ahli yang telah memberikan masukan berharga untuk penyempurnaan tesis ini;
- 4) Dosen-dosen KTKI: Andi Widjajanto, M.Sc, Artanti Wardhani, M.Phil, Broto Wardoyo, MA, Edy Prasetyono, Ph.D, Hariyadi Wiryawan, Ph.D, Amalia Sustikarini, M.ILP, Dr. Evi Fitriani, Ph.D, Yeremia Lalisang, M.Sc, Utaryo Santiko, M.Si, dan Dra. Suzie Sri Suparin, MA.
- 5) Orang tua, Kakak dan Adik tercinta, selaku sumber motivasi dan inspirasi utama saya, yang terus menerus mendukung selama menjalankan pendidikan dan ketika menyelesaikan tesis;
- 6) Prof. Dr. Melani Budianta yang telah membangun kepercayaan diri saya akan potensi untuk terus menimba ilmu dan menjadi diri sendiri dalam menjalani hidup;
- 7) Endang Fourianalistyawati, Psi yang memberi pencerahan dan dorongan moral; Keluarga Nuzran Joher, M.Si dan Keluarga Jokopangripto yang

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roni Satria
NPM : 1006743771
Program Studi : Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Peranan Media Mainstream Amerika di Balik Doktrin Bush: Analisis Konten Pemberitaan dalam the New York Times Pasca Tragedi 9/11 Sampai Lahirnya Kebijakan Global War on Terror”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok, Jawa Barat

Pada tanggal : 22 Juni 2012

Yang menyatakan

(Roni Satria)

Peranan media..., Roni Satria, FISIP UI, 2012

menjadi orang tua saya di perantauan; Agustinus Bambang Jusana yang selalu mendukung saya mencapai cita-cita; Olla Sudradjat yang telah mengajarkan banyak hal tentang profesionalitas sehingga saya menikmati pekerjaan di sela-sela penyelesaian tesis ini; Evelyn 'Ivo' Adisa yang selalu mengerti bagaimana untuk “*escape*” dari kejenuhan.

- 8) Rekan-rekan yang selalu mendukung saya: Dewi Meisari, M.Sc, Teddy Panelewen, Aaron Holmes, Netty Rianasari, Larry Douglas LeCroy, dan Absolute Band.
- 9) Rekan-rekan kuliah Angkatan 1 KTKI, Universitas Indonesia: Resta & Momon, Dewi Kurniawati, Sarie Febriane, Heggy, Isyana, Melody, Vivi, Mariamah, Anggi, Armyn, Arya, Tagor, Ayu, Yelly, Toton, Grawas, dan May, yang telah saling membantu dalam proses belajar selama perkuliahan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Jakarta, 22 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roni Satria

NPM : 1006743771

Program Studi : Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional

Departemen : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Peranan Media Mainstream Amerika di Balik Doktrin Bush: Analisis Konten Pemberitaan dalam the New York Times Pasca Tragedi 9/11 Sampai Lahirnya Kebijakan Global War on Terror”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok, Jawa Barat

Pada tanggal : 22 Juni 2012

Yang menyatakan

(Roni Satria)

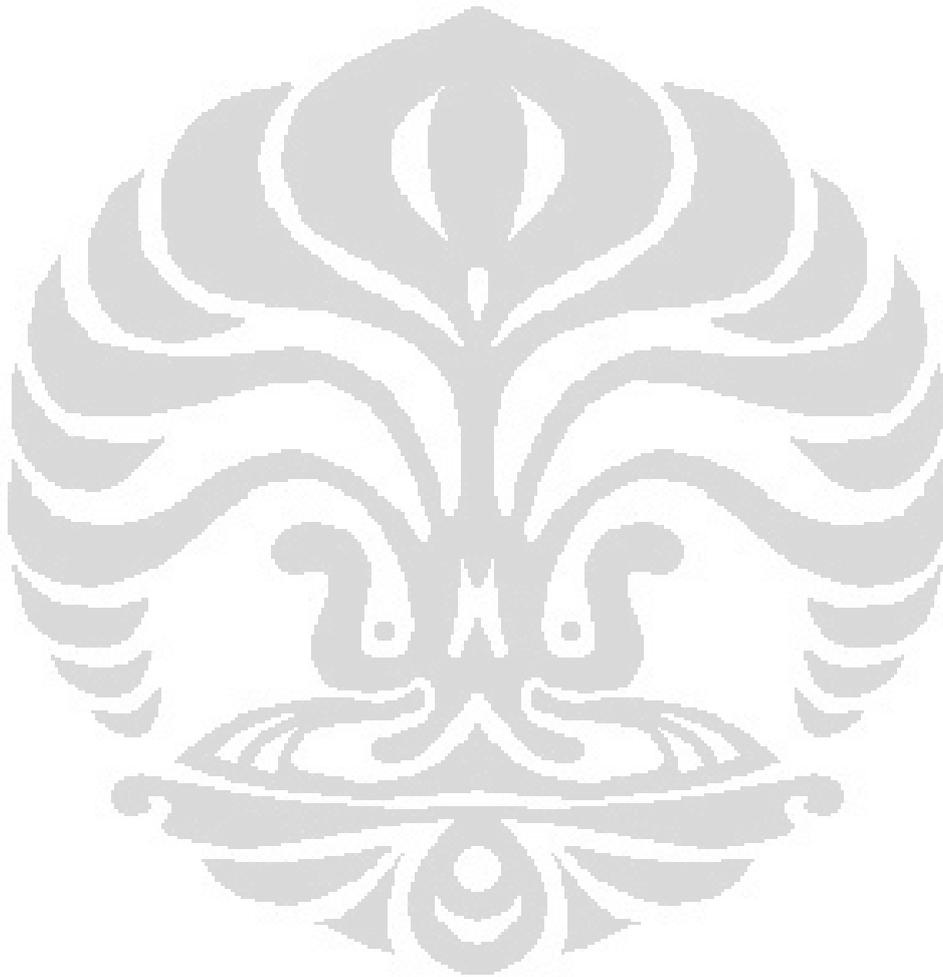
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR DIAGRAM.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan Penelitian	6
1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	7
1.4. Tinjauan Pustaka.....	8
1.4.1 Diskursus Terorisme dalam Pemberitaan Media.....	8
1.4.2 Pemberitaan 9/11 oleh Media Mainstream di Luar Amerika.....	12
1.4.3 Proses “Othering” dalam Pemberitaan Media.....	15
1.5. Kerangka Konseptual.....	17
1.5.1. Konsep <i>Framing</i> dalam Media.....	17
1.5.2. Konsep Identitas dalam Politik Global.....	19
1.5.3. Konsep Peradaban dan Identitas Peradaban.....	20
1.5.4. Konsep Keamanan Nasional.....	21
1.6. Asumsi-Asumsi Penelitian.....	24
1.7. Metodologi Penelitian	25
1.8. Sistematika Penulisan	28
BAB 2 PEMBERITAAN THE NEW YORK TIMES PASCA TRAGEDI 9/11.....	29
2.1. Pola Pemberitaan the New York Times Pasca 9/11.....	34
2.1.1. Editorial dengan Editorial.....	37
2.1.2. <i>Headline</i> dengan <i>Headline</i>	47
2.1.3. Editorial dengan <i>Headline</i>	53
2.2. <i>Framing</i> dalam Editorial dan <i>Headline</i> the New York Times	

Pasca 9/11.....	67
2.2.1. Konsepsi Metafora Terorisme.....	67
2.2.2. Diskursus Identitas dan Identitas Peradaban.....	71
2.2.2.1 Jurnalisme Perang.....	74
2.2.3 Konsep Keamanan Nasional.....	75
BAB 3 PEMBERITAAN THE NEW YORK TIMES DAN DOKTRIN	
BUSH	78
3.1. Kemerdekaan Pers di Amerika.....	81
3.2. Media dan Formulasi Kebijakan Luar Negeri.....	87
3.3. Media Sebagai Faktor Eksternal Pendorong Formulasi Kebijakan.....	91
3.4. Peran the New York Times dalam Formulasi Kebijakan	
Global War on Terror	94
3.4.1 Interkonektivitas Diskursus dalam Pola Pemberitaan	
the New York Times.....	95
3.4.2 Osama bin Laden di Mata the New York Times Sebelum	
Peristiwa 9/11.....	113
3.4.3 Posisi Pemberitaan the New York Times dalam Kompleksitas	
Proses Formulasi Kebijakan Global War on Terror.....	116
BAB 4 PENUTUP.....	123
Kesimpulan.....	123
DAFTAR REFERENSI.....	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Headline</i> the New York Times pada 12 September 2001.....	33
Gambar 3.1 Kompleksitas Proses Pengambilan Kebijakan.....	93
Gambar 3.2 Model Analisis Pemberitaan the New York Times.....	119

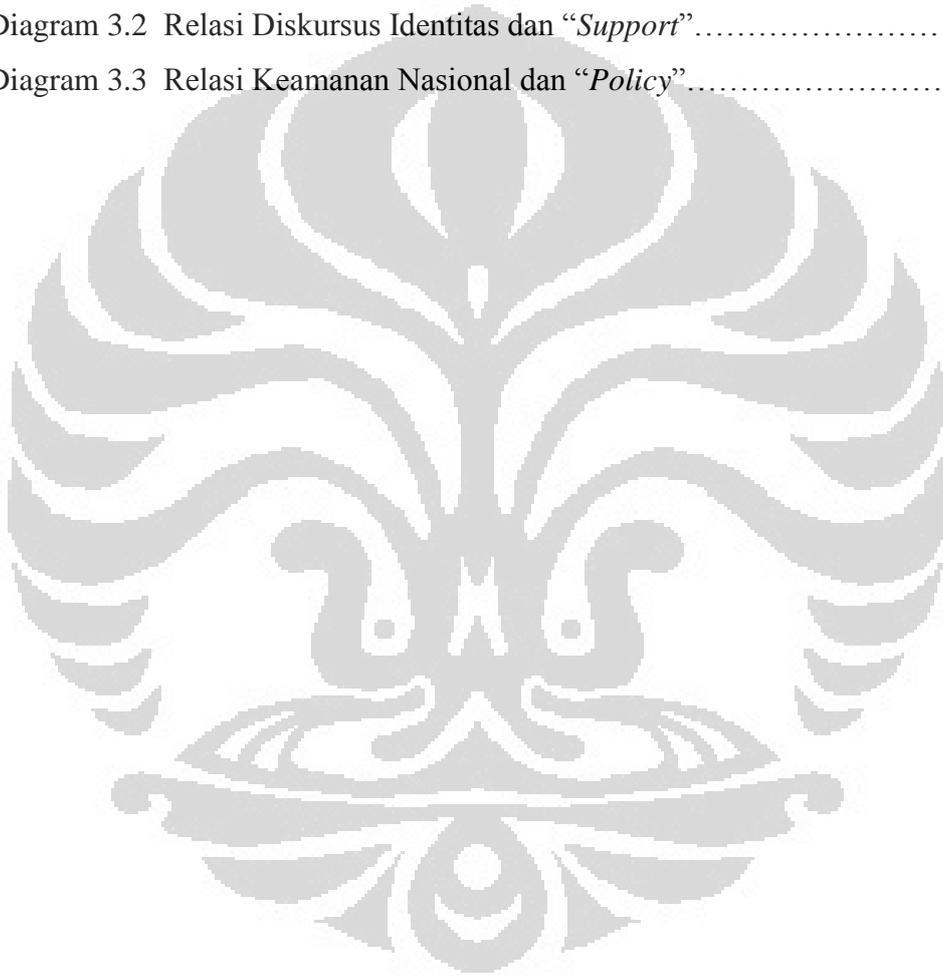


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tema Editorial dan <i>Headline</i> the New York Times	34
Tabel 2.2 Pilihan Kata Editorial 16 September 2001.....	41
Tabel 2.3 Relasi Tematik Editorial dan <i>Headline</i> untuk Tema “ <i>Response</i> ”....	54
Tabel 2.4 Relasi Tematik Editorial dan <i>Headline</i> untuk Tema “ <i>Support</i> ”.....	58
Tabel 2.5 Relasi Tematik Editorial dan <i>Headline</i> untuk Tema “ <i>Policy</i> ”.....	60
Tabel 2.6 <i>Response + Support = Policy</i>	66
Tabel 3.1 Perbedaan Media Mainstream dan Media Alternatif.....	83
Tabel 3.2 Model Robinson untuk Interaksi Kebijakan dan Media.....	88

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Nilai Berita.....	36
Diagram 2.2 Relasi Tematik Editorial dan <i>Headline</i>	53
Diagram 2.3 Relasi Proses Editorial dan <i>Headline</i>	64
Diagram 3.1 Relasi Diskursus Terorisme dan “ <i>Response</i> ”.....	99
Diagram 3.2 Relasi Diskursus Identitas dan “ <i>Support</i> ”.....	107
Diagram 3.3 Relasi Keamanan Nasional dan “ <i>Policy</i> ”.....	113



ABSTRAK

Nama : Roni Satria
Program Studi : Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional
Judul : Peranan Media Mainstream Amerika di Balik Doktrin Bush:
Analisis Konten Pemberitaan dalam the New York Times Pasca
Tragedi 9/11 Sampai Lahirnya Kebijakan Global War on Terror

Penelitian ini mengkaji media mainstream Amerika dalam pemberitaan isu terorisme pasca 9/11 sampai dikeluarkannya Global War on Terror. Melalui analisis konten koran the New York Times, penelitian ini menekankan pada *framing* diskursus dalam pemberitaan untuk menunjukkan pengaruh media dalam proses pengambilan keputusan. Penulis berpendapat bahwa pemberitaan the New York Times telah mempengaruhi pembuat kebijakan untuk memformulasi strategi melawan terorisme termasuk menggalang dukungan publik. Penelitian ini menunjukkan signifikansi peran media di mana media menjadi satu dari banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri.

Kata kunci:

Media mainstream Amerika, the New York Times, pemberitaan, kebijakan, Global War on Terror

ABSTRACT

Name : Roni Satria
Study Program : Terrorism in International Security Studies
Title : The Role of the U.S. Mainstream Media Behind the Bush's Doctrine: A Content Analysis of the New York Times Post-9/11 to the Establishment of the Global War on Terror

This study assessed the U.S. mainstream media in covering terrorism issues post-9/11 until the establishment of Global War on Terror. Using content analysis towards the New York Times newspaper, this study emphasized on the framing of the discourse to demonstrate the influence of the media towards decision-making process. The author argues that the coverage of the New York Times has impacted policy-makers to formulate a strategy against terrorism as well as to gain support from public. This study poses on the significance of the role of which the media is but one factor of many that can influence foreign policy.

Keywords:

U.S. mainstream media, the New York Times, coverage, policy, Global War on Terror

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kedahsyatan peristiwa 9/11 yang menyerang World Trade Center dan Pentagon telah menorehkan sejarah serangan terorisme terbesar sepanjang abad. Tidak dapat dipungkiri, selain banyaknya korban yang ditimbulkan yakni 2.996 orang tewas (246 orang di dalam pesawat yang dibajak, 2.606 orang di menara kembar dan sekitarnya, dan 125 orang di Pentagon)¹ dampak dari serangan ini bergaung seantero dunia. Bahkan hingga saat ini, peristiwa 9/11 menjadi poin awal ditentukannya terorisme gelombang baru² terlihat dari banyaknya ahli yang melakukan penelitian dalam kajian ini termasuk upaya pendefinisannya yang tak kunjung sepakat pada satu pengertian. Banyak kalangan berpendapat bahwa terorisme sebagai ancaman global yang harus mendapat perhatian khusus dari negara selaku penjamin keamanan masyarakatnya. Dari paradigma ini muncullah beragam upaya pemberantasan yang dikemas dalam bentuk pemberlakuan hukum maupun pengerahan militer atau *force* yang dilegitimasi. Negara-negara di hampir seluruh belahan dunia mulai menggalakkan dan mengambil langkah dengan menetapkan kebijakan-kebijakan terkait hal ini.

Amerika Serikat sebagai negara yang diserang dalam peristiwa tersebut dengan sigap langsung mengumandangkan seruan Global War on Terror yang dikeluarkan George W. Bush secara resmi pada 20 September 2001.³ Seruan yang dikenal dengan Bush Doctrine ini sontak membuat semua mata tertuju pada

¹ Peter Van der Veer & Shoma Munshi, *Media, War and Terrorism: Responses from the Middle East and Asia* (Eds.; London and New York: Routledge, 2004), 55.

² Terorisme gelombang baru (*new wave terrorism*) merupakan se bentuk upaya pendefinisian para ahli dalam kajian terorisme untuk membedakannya dengan terorisme klasik (*old terrorism*). Terorisme gelombang baru mengacu pada terorisme bunuh diri (*suicide terrorism*) yang menurut Paul J. Smith berada pada gelombang keempat yakni terorisme religius (*religious terrorism*) atau aksi terorisme yang dimotivasi oleh agama. Dalam hal ini, serangan terhadap WTC dan Pentagon dilakukan oleh para teroris dengan motif agama yang dilakukan dengan intensi bunuh diri melalui pembajakan pesawat. Lebih lanjut untuk gelombang terorisme lihat Paul J. Smith, *The Terrorism Ahead: Confronting Transnational Violence in the Twenty-first Century* (New York and London: M.E. Sharpe, 2008), 129.

³ Transkrip pidato President Bush, CNN.com diakses dari <edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/> pada 12 Mei 2012, pukul 01:14 WIB.

himbauan kontra-terorisme yang sekaligus ajakan ‘aspiratif’ bagi negara-negara lain untuk memerangi terorisme. Tidak hanya dukungan, beragam kritikan pun turut serta meramaikan perdebatan doktrin ‘perang’ ini.⁴ Banyak yang berpendapat bahwa satu-satunya cara memberantas terorisme adalah dengan bersatu secara global memerangi terorisme. Namun di sisi lain, banyak pula yang mengkritisi bahwa hal ini semata hanya upaya Bush dalam menjustifikasi invasinya terhadap Iraq di tahun 2003 sebagai dalih dari upaya memerangi terorisme.⁵ Apapun yang menjadi alasan Bush kala itu, dunia tengah dilanda kekacauan dan kebimbangan.

Kendati beragam kritik datang dari berbagai pihak di dalam maupun luar negeri, masyarakat Amerika khususnya, mendukung kebijakan Bush ini. Kolonel William E. Lukens melihatnya dari cara masyarakat Amerika dalam memandang isu keamanan yang ia telusuri dari perspektif sejarah. Menurutnya, persepsi masyarakat Amerika terhadap perang telah membawa mereka untuk selalu setia mendukung kebijakan Pemerintah. Ancaman yang datang dalam bentuk serangan seperti 9/11 telah mengingatkan mereka pada pengalaman buruk masa silam sehingga keputusan Bush kala itu dipandang sebagai suatu tindakan nyata yang akuntabel dan beralasan. Bahkan menurut Lukens, masyarakat Amerika akan terus mendukung kebijakan Global War on Terror kendati kebijakan tersebut secara langsung tidak menyentuh kehidupan mereka secara personal maupun finansial.⁶

Pada dasarnya dukungan masyarakat Amerika terhadap keputusan untuk berperang, menurut Lukens, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) sejauh mana ancaman mempengaruhi kepentingan nasional,
- 2) komitmen populasi (apakah mereka merasa terancam atau tidak),
- 3) biaya perang yang dilihat dari kapasitas finansial negara,
- 4) persepsi publik terhadap nilai keadilan,

⁴ Doktrin perang Bush ini ramai diperbincangkan di kalangan para ahli seperti Patrick Buchanan, Bruce Bartlett, termasuk Francis Fukuyama yang melihat bahwa upaya yang menurut Bush sebagai strategi defensif tersebut merupakan cara Bush untuk menginvasi Iraq melalui strategi preemptif yang dimanifestasikan dalam kebijakan luar negerinya. Lihat Robert G. Kaufman, *In Defense of the Bush Doctrine* (Kentucky: The University Press of Kentucky, 2007), 125-126.

⁵ *Ibid.* 128.

⁶ William E. Lukens, *Public Support for the Global War on Terror: Do We Have What It Takes?* (USAWC Strategy Research Project, 2007), 2-3.

- 5) durasi perang,
- 6) kepercayaan terhadap pemimpin, dan
- 7) dukungan media.⁷

Sesaat setelah peristiwa 9/11, masyarakat Amerika mulai merasa adanya ancaman besar terhadap kepentingan nasional dan muncul keinginan untuk melindungi negara. Masyarakat Amerika kala itu mendukung pemerintah dalam melakukan upaya ekstensifikasi reformasi intelijen, dikeluarkannya Patriot Act, dan peningkatan pengeluaran sektor pertahanan dengan mengalokasikan dana sebesar 40 miliar dollar untuk upaya kontra terorisme.⁸

Media selaku aktor non-negara tidak begitu saja membiarkan peristiwa akbar tersebut. Dalam hal ini, media mainstream Amerika langsung 'menggoreng' peristiwa tersebut menjadi pemberitaan yang paling dinanti masyarakat dunia. Nyaris semua media menyajikan peristiwa tersebut sebagai *headlines* hingga berminggu-minggu.⁹ Pemberitaan ini gencar dilakukan tidak hanya oleh media Amerika tetapi juga seluruh media di belahan dunia. Tak ayal semua orang dirundung keingintahuan untuk mengikuti alur cerita 'kisah' terorisme itu. Kecaman, kutukan, dan hujatan terhadap aksi yang tidak manusiawi tersebut ikut bermunculan sebagai dampak pemberitaan. Seolah episode demi episode disajikan secara gamblang lewat tulisan media. Tentunya yang ditunggu masyarakat dunia adalah langkah apa yang akan dilakukan negara adidaya tersebut dalam merespon serangan terhadap ketahanan dan keamanan negaranya.

Pemberitaan media mainstream Amerika umumnya menegaskan bahwa Al Qaeda harus diperangi. Hal ini menjadi penting karena implikasi dari pemberitaan menjadi membenarkan manakala Global War on Terror dikeluarkan dan dijalankan. Gaung yang disebar media untuk melawan ancaman terorisme dengan berperang

⁷ *Ibid.* 12.

⁸ Robert D. McFadden. *After the Attacks; The President; Bush Leads Prayer, Visits Aid Crews; Congress Back Use of Armed Force* (New York: The New York Times, 2001, September 15).

⁹ Douglas Kellner melihat bagaimana media melakukan pemberitaan dengan menggunakan kata "terorisme" sejak tahun 1960an sampai pemberitaan 9/11. Maraknya pemberitaan media baik oleh koran maupun televisi pasca 9/11 menjadikan penonton/pembaca semakin dekat dengan isu tersebut. Lihat Douglass Kellner, "9/11, Spectacles of Terror, and Media Manipulation", dalam *Critical Discourse Studies* (London: Routledge, 2004), 1 (1), 41-64.

menggiring opini publik untuk menerima doktrin Global War on Terror sebagai satu-satunya jalan untuk melawan terorisme, khususnya Al Qaeda. Terlebih kondisi carut-marut masyarakat kala itu seolah menunjukkan keadaan yang “*hopelessness*” atau ketiadaan harapan, dan satu-satunya cara adalah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah.

Menurut Richard Jackson, tak sedikit media Amerika yang ‘mengajarkan’ apa yang harus dilakukan untuk melawan serangan tersebut. Dengan menampilkan pemberitaan serangan yang hebat dan menghancurkan harga diri Amerika di mata dunia, dalam waktu yang bersamaan media turut mengajarkan kepada publik bagaimana memerangi ancaman terorisme. Meski tidak cukup kuat membuktikan apakah informasi yang diajarkan bersumber dari pemerintah, namun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seolah diamini oleh media.¹⁰ Media yang seharusnya berperan sebagai kontrol pemerintah, di kala itu terkesan kehilangan kekuatannya. Kekuatan yang selama ini dielu-elukan di negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, namun pasca 9/11 terlihat sangat ‘sopan’ dalam pemberitaan dengan lebih mengangkat isu nasionalisme dan patriotisme dalam mendukung pemerintah melawan terorisme.

Keseimbangan dan ketidakberpihakan media sejatinya menjadi hal yang paling esensial dalam melakukan pemberitaan mengingat efek media sangat besar dalam menggiring persepsi dan opini publik. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese berpendapat bahwa nilai kultural Amerika menekankan pada nilai individualisme, kebebasan, demokrasi, dan kapitalisme, di mana melalui medialah nilai-nilai tersebut direfleksikan.¹¹ Demikian halnya dengan cerminan media Amerika dalam melakukan pemberitaan mengenai terorisme. Media semakin antusias manakala tudingan terhadap Al-Qaeda dipertegas dengan kebijakan invasi ke Iraq.

¹⁰ Richard Jackson, “Playing the Politics of Fear: Writing the Terrorist Threat in the War on Terrorism”, dalam G. Kassimeris, *Playing Politics with Terrorism: A User’s Guide* (Ed.; New York: Columbia University Press, 2007b), 178. Lihat juga Richard Jackson, “The Study of Terrorism after 11 September 2001: Problems, Challenges and Future Development”, *Political Studies Review*, 2009, 181.

¹¹ Pamela J. Shoemaker and Stephen D. Reese, *Theories of Influences on Mass Media Content* (New York: Longman, 1996), 18.

Kala itu, masyarakat Muslim di Amerika sering mendapatkan perlakuan yang diskriminatif.¹² Council on America-Islamic Relations (CAIR) mencatat sedikitnya 15 ribu kasus diskriminasi terhadap Muslim Amerika terjadi pasca 9/11 yang meningkat tajam dari hanya sekitar 400 kasus saja.¹³ Diskriminasi yang berdampak kekerasan hingga kematian itu pun turut mengisi pemberitaan media Amerika.

Stephen Hutchings dan Galina Miazhevich mempertanyakan tentang peran media Amerika apakah mendistrupsi atau merevitalisasi pemobilisasian militer dalam Global War on Terror. Mereka berpendapat bahwa pemberitaan yang dilakukan media Amerika terhadap insiden teror internasional memberikan konsepsi terhadap Global War on Terror dalam semua tingkatan baik nasional, regional, dan global.¹⁴ Menurut mereka, media nasional secara selektif menarik beberapa zona diskursif yang saling tumpang tindih yang batasnya bergantung pada perspektif di mana terbangunnya diskursus tersebut.¹⁵ Mereka memperlihatkan contoh ketika media Amerika memberitakan insiden teror internasional, maka secara global negara-negara lain seperti Inggris, Prancis dan Rusia, memberitakan hal yang secara tidak langsung mendukung Global War on Terror meski dengan penggunaan terminologi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa media Amerika berkontribusi signifikan dalam kebijakan Global War on Terror, bahwa tidak hanya memberi efek kuat secara domestik terhadap masyarakat Amerika sendiri, tetapi juga memberi efek yang cukup reaktif terhadap media-media di belahan dunia lain.

Melihat kondisi di mana peran media sebagai aktor non-negara sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pemerintah Amerika kala itu, maka menjadi suatu yang anomali bila standar kebenaran (*truth*), keseimbangan (*balance*), dan objektivitas (*objectivity*) media tergambar dari ketidakberdayaan untuk

¹² Ins Roundup Target Muslims, Says Islamic Advocacy Group, (Council on America-Islamic Relations, 2002, December 23), diakses dari <<http://www.cair-florida.org/SFL/Articles.aspx?co=AA>> pada 16 Mei 2012 pukul 15:32 WIB.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Stephen Hutchings & Galina Miazhevich, "The Mass Media's Role as Disruptive/Revitalising Force in the Global 'War on Terror'" dalam *Media Discourse: The Theory and Practice of Mass Communications*, 6 (12), 2009, 8.

¹⁵ *Ibid.* 9.

mengkritisi kebijakan pemerintah dalam menelurkan doktrin perang.¹⁶ Media yang selama ini kerap menjadi kontrol pemerintah terkesan turut merasa terancam oleh terorisme yang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Hal ini tentu harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum lebih jauh berasumsi bahwa proses *framing* yang dilakukan media Amerika telah mendorong pemerintah Amerika untuk segera mengeluarkan kebijakan Global War on Terror.

Hanya diperlukan waktu kurang lebih sembilan hari bagi media untuk 'mendesak' pemerintah agar segera mengambil langkah melawan terorisme. Tanggal 20 September 2001, Bush secara resmi mengeluarkan kebijakan Global War on Terror dan tepat tanggal 1 Oktober 2001, kebijakan ini dijalankan dengan pemobilisasian kekuatan militer di Pakistan.¹⁷ Terlebih hal itu dilakukan oleh sebuah media mainstream seperti the New York Times yang merupakan koran berpengaruh di Amerika dan memiliki pasar yang luas di beberapa kota besar di Amerika Serikat serta pembaca yang berasal dari kalangan menengah ke atas.¹⁸ Pemberitaan the New York Times tentu menjadi kiblat bagi publik termasuk pemerintah dalam melihat pergerakan kondisi Amerika pasca 9/11 kala itu. Sehingga, agenda yang tertuang dalam pemberitaannya pun berdampak signifikan.

1.2 Permasalahan Penelitian

Dengan memperhatikan *gap* yang muncul antara kondisi normatif media yang seharusnya mampu menjadi jembatan penyeimbang persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa, namun realitas yang muncul justru sebuah anomali di mana media terlepas dari fungsinya sebagai kontrol pemerintah dan masyarakat dalam melakukan

¹⁶ Menurut Wilkins dan Christian, prinsip jurnalistik yang tertuang dalam kebenaran, keseimbangan, dan objektivitas merupakan pilar dasar dalam integritas jurnalistik. Kebenaran menjadi pilar utama di mana setiap pemberitaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran sebagai etika dalam menyampaikan informasi kepada publik. Walter Lippmann melihat kebenaran sebagai hal yang membawa pencerahan terhadap fakta-fakta tersembunyi yang terhubung satu sama lain dan membentuk sebuah realitas. Objektivitas menerangkan kondisi di mana laporan harus jelas dan tidak bias. Lebih lanjut lihat Lee Wilkins & Clifford G. Christian, *The Handbook of Mass Media Ethics* (New York: Routledge, 2009).

¹⁷ Scott Shane, *Senate Report Explores 2001 Escape by bin Laden from Afghan Mountains* (New York: the New York Times, 2009, November 28).

¹⁸ *Timeline of the New York Building*, the New York Times Company, diakses dari <<http://www.nytimes.com/company>> pada 2 April 2012, pukul 18:12 WIB.

pemberitaan khususnya pemberitaan menyangkut terorisme pasca 9/11. Media yang awalnya kritis terhadap kebijakan pemerintah justru menjadi penopang bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan Global War on Terror.

Melihat fenomena ini, maka penulis ingin mempertanyakan permasalahan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Mengapa dan bagaimana pemberitaan mengenai terorisme oleh media mainstream Amerika pasca 9/11 mendorong dikeluarkannya kebijakan Global War on Terror?”**

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media mainstream Amerika melakukan *framing* dalam pemberitaan 9/11 dengan mengangkat isu-isu yang persuasif sehingga bersama-sama masyarakat Amerika mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan Global War on Terror. Kondisi ini tentunya disambut baik pemerintah mengingat kuatnya pengaruh media mainstream Amerika dalam membangun persepsi publik baik domestik maupun global. Hal ini sangat signifikan untuk diteliti karena media mainstream Amerika memiliki andil dan kontribusi dalam memuluskan legitimasi kebijakan Global War on Terror. Bahkan media mainstream Amerika dipandang sebagai *role model* atau acuan bagi media-media di belahan dunia lainnya dalam hal pemberitaan isu terorisme, terlebih media pada hakikatnya menjadi kontrol pemerintah dan masyarakat. Bila dinilai salah, media seharusnya melakukan kritisi terhadap kebijakan yang memungkinkan terjadinya penindasan terhadap kebebasan masyarakat.

Penelitian ini merupakan kajian interdisipliner di bidang Hubungan Internasional, studi budaya, komunikasi dan terorisme dalam keamanan internasional. Masalah menyangkut keamanan, media, identitas dan terorisme dibahas secara komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada wacana akademik di bidang-bidang studi khususnya mengenai bagaimana narasi media membangun sebuah diskursus sehingga terbentuk persepsi publik yang dominan terhadap sebuah isu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

rekomendasi tentang bagaimana untuk memerangi terorisme dengan menggunakan wacana dalam media melalui mode komunikasi publik.

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Diskursus Terorisme dalam Pemberitaan Media

Untuk memastikan bahwa pertanyaan penelitian di atas belum pernah diteliti sebelumnya, maka perlu melakukan tinjauan pustaka dengan melihat bagaimana media membangun diskursus terorisme dalam pemberitaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana media membawa atau berupaya menggiring opini publik sehingga terbentuk sebuah konsepsi atau perspektif mengenai apa itu terorisme, siapa pelaku terorisme dan bagaimana memberantas terorisme. Banyak penelitian telah dilakukan seiring perdebatan mengenai konseptualisasi terorisme tersebut. Berikut adalah beberapa penelitian yang menelaah bagaimana media berperan besar dalam membangun diskursus terorisme.

Perspektif terhadap terorisme, seiring berevolusinya strategi dan taktik pelaku teroris, mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini dikemukakan oleh Alexander Spencer dalam bukunya *“The Tabloid Terrorist: the Predicative Construction of New Terrorism in the Media”*. Menurutnya, terorisme merupakan sebuah konstruksi sosial, lebih bersifat diskursif daripada sebuah fakta material.¹⁹ Namun ia membantah bila pemikiran ini dikatakan menolak akan adanya realitas terorisme, ia percaya bahwa eksistensi pelaku teror itu ada namun yang ia teliti adalah bagaimana menginterpretasikan aksi terorisme. Dari sinilah muncul diskursus terorisme baru di mana dalam kasus Al-Qaeda pasca 9/11, melalui diskursus Barat, bahwa apa yang terkonstitusi dengan terorisme era baru adalah segala sesuatu yang menyangkut seluk beluk dan tingkah polah Al-Qaeda yang dimediasi oleh pemberitaan media.²⁰

Penelitian Spencer ini secara spesifik membahas dua hal yakni pertama, ia ingin menunjukkan bahwa “kata” dalam kajian terorisme memiliki peran penting

¹⁹ Alexander Spencer, *The Tabloid Terrorist: the Predicative Construction of New Terrorism in the Media* (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 78-79.

²⁰ *Ibid.*

karena “kata” baik secara metafora dan teoritis dapat mempengaruhi persepsi publik dalam memandang situasi seperti serangan teroris dan di sanalah pemahaman publik dibentuk. Kedua, dengan melihat peran “kata” yang dibangun dalam media, penelitiannya ini bertujuan ingin menunjukkan secara empirik pengaruh “kata” dalam penentuan kebijakan dan mengilustrasikan bahwa penelitian konstruktivis sangat relevan dengan hal yang menyangkut pengambilan kebijakan.

Spencer melakukan penelitian terhadap koran Jerman “Bild” yang memberitakan secara luas perihal terorisme selama beberapa minggu dan bahkan berbulan-bulan. Menurutnya koran Jerman ini berhasil turut serta dalam membangun apa yang dimaksud dengan terorisme era baru. Melalui koran itu pula Al-Qaeda menjadi pusat perbincangan dan dijadikan sebagai ancaman yang mesti diperangi.

Salah satu konsepsi metafora paling dominan yang dilakukan Bild pasca 9/11 adalah bahwa terorisme sebagai perang. Terlepas dari metafora paling populer yakni “*war on terrorism*”, terdapat banyak ekspresi metafora yang memperkuat pengertian bahwa terorisme adalah perang dan dengan menggunakan kekuatan militerlah aksi terorisme dapat diberantas. Konsepsi kedua yang ditelaah Spencer dalam koran Bild pasca 9/11 adalah bagaimana terorisme dipandang sebagai sebuah aksi kriminalitas. Menariknya, metafora ini jauh lebih jarang diangkat dalam pemberitaan daripada metafora terorisme sebagai perang. Dalam pemberitaan yang menggunakan ekspresi terorisme sebagai sebuah aksi kriminalitas, terminologi seperti ‘*criminal*’, ‘*offender*’, atau ‘*murderer*’ sering digunakan namun tidak ada kaitan dengan jumlah metafora gaya militer yang ditemukan dalam diskursus tersebut. Yang paling menarik adalah konsepsi ketiga mengenai terorisme yang dilakukan Bild pasca 9/11, bahwa terorisme dipandang sebagai suatu yang alamiah layaknya sebuah fenomena. Terminologi yang sering muncul menguatkan hal ini adalah penggunaan kata “*terror waves*”, “*catastrophe*” sehingga diinterpretasikan sebagai suatu malapetaka yang secara natural terjadi dari waktu ke waktu.²¹

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Spencer, Jackson berpendapat bahwa terorisme pada dasarnya adalah sebuah fakta sosial ketimbang sebuah

²¹ *Ibid.* 95-98.

kebrutalan, dan kajian terorisme kritis memandang bahwa terorisme sebagai proses sosial yang terkonstruksi melalui bahasa, diskursus, dan hubungan intersubjektif.²² Kendati demikian peneliti terorisme kritis sangat menyadari bahwa apa yang dikatakan dan disampaikan teroris memiliki dimensi retorik dan naratif yang terkonstitusi dalam realitas. Para ahli tersebut mengabaikan akan adanya *self-representation* atau keterwakilan diri yang dilakukan teroris. Menurut mereka hal itu hanya akan relevan bila keterwakilan diri itu menjadi objek interpretasi dalam diskursus Barat. Bagaimana kita menyebut sebuah kelompok sebagai teroris bergantung pada apa yang menjadi pokok permasalahan dalam terorisme, bukan pada apa yang mereka bangun terhadap diri mereka sendiri. Meski kedua perspektif ini saling terkait, keterwakilan diri yang dilakukan teroris harus diinterpretasi karena hal itu tidak berjalan dengan sendirinya.²³

Bahasa dan praktik-praktik bahasa saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Secara bersama bahasa dan praktik-praktik bahasa mengkonstitusi realitas sosial dan politik.²⁴ Jackson melakukan penelitian terhadap diskursus “*war on terrorism*” dengan mengkaji kata yang digunakan aparat pemerintahan Amerika dalam menjelaskan alasan dan perkembangan “*war on terror*”. Dalam hal ini ia meneliti kata-kata yang digunakan untuk menerangkan kejadian 9/11, kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan teroris yang dalam pendeskripsian itu dibandingkan dengan identitas Amerika. Ia juga menelaah bagaimana ancaman itu dijelaskan sebagai sebuah malapetaka hebat dan bagaimana respon yang tepat ‘diajarkan’ kepada publik.

Selain penelitian di atas, Matthew J. Morgan dalam bukunya “*The Impact of 9/11 on the Media, Arts and Entertainment*” melakukan penelitian terhadap isu yang sama namun lebih memperhatikan pembentukan narasi dominan pemberitaan perang dan terorisme yang terjadi sebagai efek dari tragedi 9/11. Terdapat tiga isu penting yang ia teliti yakni 1) bagaimana tema, karakter, dan plot primer yang dinarasikan pasca 9/11, 2) bagaimana sebuah narasi mendominasi kemungkinan-kemungkinan

²² Richard Jackson, *Op. Cit.* 246.

²³ *Ibid.* 247.

²⁴ *Ibid.* 248.

interpretasi dan tertanam dalam perspektif kultural dan politik, dan 3) bagaimana konsekuensi politik dan ideologi dari interpretasi dominan yang muncul dalam peristiwa ini.

Morgan berpendapat bahwa perspektif terhadap terorisme bergantung pada narasi, bukan hanya sekedar instrumen literatur atau kekuatan retorik yang memberlakukan tindakan sebagai teks.²⁵ Narasi bersifat fundamental terhadap kesadaran dan pengertian manusia. Pemikiran dan tindakan manusia tidak berlaku dalam sebuah kevakuman mental, melainkan dibentuk dalam proses narasi yang terus berlangsung.²⁶ Ia mengistilahkan proses tersebut sebagai suatu proses “*sensemaking*” atau pemaknaan yang terimplikasi dalam situasi.

Dalam hal ini Morgan mendukung pendapat Jackson dengan mengatakan bahwa pada kenyataannya, tidak ada suatu tindakan atau kejadian yang “*speak for themselves*”, melainkan terbentuk dari proses interpretasi dan narasi sosial pada tingkatan makna berbeda melalui simbol-simbol kuat yang dilakukan suatu aktor mewakili sejumlah komunitas.²⁷

Yang menarik dari penelitian Morgan adalah ia tidak hanya mengkaji laporan media, tetapi juga membandingkannya dengan publikasi akademik, film, novel, dan pidato yang disampaikan pemimpin politik terkait serangan teroris pasca 9/11. Dengan penelitiannya itu, ia melihat bagaimana narasi dominan mengenai peristiwa 9/11 dibangun, apa yang menjadi motif utama beserta subnaratifnya, apa saja “alat” yang digunakan untuk mereproduksi narasi tersebut secara sosial dan kultural, dan bagaimana konsekuensi politik dan kultural dari hegemoni narasi.

Penelitian yang hampir serupa dilakukan oleh Pippa Norris. Dalam bukunya “*Framing Terrorism: the News Media, the Government and the Public*”, ia melihat bagaimana ancaman terorisme diberitakan oleh media di mana pemberitaan berdampak pada persepsi yang menjadi perhatian publik. Pergeseran persepsi publik

²⁵ Matthew J. Morgan, *The Impact of 9/11 on the Media, Arts and Entertainment* (Ed.; New York: Palgrave Macmillan, 2009), 12-14.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* 25.

dalam memandang isu keamanan pasca 9/11 menjadi penting sebagai akibat dari *framing* yang dilakukan berita terkait isu terorisme.

Norris berpendapat bahwa isu penting yang muncul terkait peristiwa 9/11 adalah peran dan efek peliputan media massa terhadap terorisme. Liputan mengenai terorisme patut mempertanyakan sejauh mana liputan berita tersebut dapat memenuhi standar jurnalistik yakni keseimbangan, kebenaran, dan objektivitas di tengah-tengah konflik politik yang ekstrem. Dari isu inilah maka kemudian muncul perdebatan apakah media berada pada sisi teroris, ‘meminjamkan’ legitimasi dan kredibilitas kepada kelompok teroris, ataukah secara tidak sengaja mendorong terjadinya insiden lanjutan sebagai efek yang menular. Sebaliknya, apakah jurnalistik berada pada pihak pemerintah dan mendukung pemimpin politik beserta kebijakan keamanan yang mereka canangkan?²⁸

1.4.2 Pemberitaan 9/11 oleh Media Mainstream di Luar Amerika

Penulis juga meninjau literatur-literatur yang terkait pemberitaan 9/11. Oleh karena penulis melakukan penelitian terhadap media mainstream Amerika, maka penulis meninjau penelitian yang kurang lebih serupa namun dilakukan terhadap media mainstream di negara lain selain Amerika.

Dalam tulisannya yang berjudul “*Aftermath of 11 September: An Arab Perspective*”, Nedal Mansour, Editor-in-Chief harian Al Hadath berpendapat bahwa permasalahan terorisme merupakan suatu konsep yang alami, selama perdebatan mengenai terorisme bergulir, maka selama itu pula tersampaikan di media sebagai bentuk penyuaran dalam masyarakat yang terbentuk secara alami pula. Ia melihat bahwa masyarakat Arab telah sering mengalami kondisi pahit dan frustrasi akan kebijakan Amerika, sehingga ada harapan masyarakat Arab, bahwa dengan peristiwa 9/11, pemerintah Amerika akan berpikir ulang untuk mengeluarkan suatu kebijakan dan menelusuri akar permasalahan terorisme.²⁹

²⁸ Pippa Norris et.al., *Framing Terrorism: the News Media, the Government and the Public* (Eds.; New York and London: Routledge, 2003), 281-283.

²⁹ Nedal Mansour, “The Aftermath of September 11: An Arab Perspective”, dalam Kwame Boavo et.al. *Media, Violence and Terrorism* (Eds.; Paris: UNESCO, 2003), 74-75.

Penelitian Mansour terhadap media di Arab menunjukkan bahwa sebulan pasca peristiwa 9/11, media di Arab fokus terhadap banyak isu yang telah melahirkan suatu diskursus terorisme termasuk pengokupasian kekuatan militer. Bahkan secara gamblang, media Arab menunjukkan tanda-tanda ketiadaan perkembangan ekonomi, kemiskinan meluas, tidak adanya lapangan kerja dan kelaparan, termasuk ketiadaan standar hak dan keadilan.³⁰

Dalam memberitakan isu terorisme, Mansour mengatakan, perlu belajar dari pengalaman Afghanistan. Ketika Amerika Serikat mampu mengatur pergerakan media mereka, termasuk media Barat secara umum, namun Amerika tidak mampu memanfaatkannya secara penuh. Di sinilah Al Jazeera muncul dan langsung mengalahkan pamor CNN manakala Al-Qaeda sebagai pihak yang dipersalahkan menjadikan media sebagai alat yang dapat mengkomunikasikan pandangan mereka dan merekam video Osama bin Laden lalu mengirimkannya ke Al Jazeera.³¹

Mansour juga mengemukakan pendapatnya bahwa keseluruhan proses di media seharusnya tidak hanya mengkaji isu terorisme dari kulitnya saja, akan tetapi melihat isu lebih dalam. Media di Arab khususnya harus mampu melihat sejauh mana isu terorisme terkait dengan agama atau bahasa. Mereka harus berpikir dua kali sebelum menunjuk atau menyalahkan pihak tertentu, dan perlu waktu untuk menjawab mengapa pemuda dan pemudi di Arab dengan mudah memilih jalan kematian. Media Arab harus bisa menyampaikan pesan itu kepada dunia, bahwa mungkinkah arti dari kematian dan kehidupan bisa sama bila semua pintu harapan tertutup?³²

Selain pemberitaan 9/11 yang dilakukan media Arab secara umum, penelitian juga dilakukan khusus terhadap pemberitaan 9/11 oleh media di Mesir. Basyouni I. Hamada melalui tulisannya "*Media, Violence and Terrorism in the Arab World*" mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan terhadap media di Mesir. Ia memaparkan penelitian yang dilakukan oleh Salah El-Dein di tahun 2002 yang melihat intrik yang terjadi antara hubungan media di Mesir dengan perilaku kognitif

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* 77.

³² *Ibid.*

masyarakat. Penelitiannya menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara eksposur media yang intensif dengan pengetahuan masyarakat secara umum mengenai peristiwa 9/11, perilaku masyarakat terhadap isu tersebut, serta kecenderungan reaksi otoritas Mesir terkait isu terorisme.

Selain El-Dein, Hamada juga memaparkan penelitian Abd El-Ghaffar yang menemukan bahwa secara umum mahasiswa Mesir bergantung kepada CNN sebagai sumber informasi internasional dan Al Jazeera sebagai sumber informasi lokal untuk mengakses informasi mengenai terorisme. Berbeda dari keduanya, Iseed mencatat bahwa media Barat secara terang-terangan merusak nilai dan peradaban Islam dengan cara yang sistematis sehingga dampak negatifnya berkembang sampai media Arab mencari langkah strategis untuk merespon isu yang menyinggung nilai budaya keislaman.³³

Yang menarik dari penelitian-penelitian yang dipaparkan Hamada adalah penelitian dari Siddiqi di tahun 2002 yang memilih beberapa koran dari berbagai negara. Koran yang dipilih antara lain the New York Times, the Times of London, the China Daily, Saudi Gazette, the Strait Times of Singapore, Friday Report of Pakistan, dan koran India, Dawat. Ada empat pertanyaan yang diusung Siddiqi dalam meneliti koran-koran tersebut antara lain seberapa besar koran-koran yang ia pilih memberitakan isu terorisme, bagaimana masing-masing koran mengangkat peristiwa 9/11, pada titik mana koran-koran tersebut setuju dengan penyebab terorisme dan cara memberantasnya, dan bergantung kepada sumber-sumber nasional dan internasional manakah koran-koran tersebut.³⁴

Dalam meneliti koran-koran tersebut, kerangka waktu yang digunakan Siddiqi selama tiga bulan mulai September sampai Desember 2001. Siddiqi menyampaikan dua temuan pentingnya yaitu pertama: the Times, the Strait Times, Saudi Gazette dan China Daily tidak begitu setuju dengan bagaimana the New York Times mempertanyakan penyebab terorisme dan upaya kontra terorisme, sementara Dawat dan Friday Report sangat tidak setuju dengan the New York Times, dan kedua:

³³ Basyouni I. Hamada, "Media, Violence and Terrorism in the Arab World", dalam Kwame Boavo et.al. *Media, Violence and Terrorism* (Eds.; Paris: UNESCO, 2003), 101.

³⁴ *Ibid.* 105-107.

terdapat perbedaan signifikan bagaimana terorisme didefinisikan dan dipahami oleh budaya yang beragam. Terorisme di Amerika mengacu pada aksi yang dilakukan individu atau kelompok yang mengancam hegemoni Amerika, sementara pandangan dari budaya lain, khususnya Timur Tengah dan Asia penekanannya lebih kepada pengertian terorisme secara luas.³⁵

1.4.3 Proses “*Othering*” dalam Pemberitaan Media

Dengan asumsi bahwa media mainstream Amerika melakukan proses “*othering*” dalam memberitakan peristiwa 9/11, dan dalam waktu bersamaan mengelu-elukan isu nasionalisme dan patriotisme sebagai bangsa Amerika, maka penulis meninjau bagaimana media melakukan proses “*othering*” terhadap Muslim selaku pihak yang secara tidak langsung terkait.

Rusi Jaspal dan Marco Cinnirella melakukan penelitian terhadap media di Inggris dengan mengangkat isu identitas sebagai fokus permasalahan. Menurut mereka, warga Muslim di Inggris sebelumnya tidak pernah dijadikan sentral pembicaraan dalam pemberitaan media di Inggris, namun dewasa ini muncul pandangan berlebihan terhadap Muslim di Inggris melalui media yang mendorong terbentuknya representasi sosial yang negatif. Mereka berpendapat bahwa Muslim di Inggris terkonstruksi sebagai sebuah ancaman yang hibrid terhadap kelompok etno-nasionalis dari aspek simbolik dan realistik.³⁶ Dikatakan bahwa keberlanjutan, keunikan, dan harga diri menjadi rentan berubah sebagai hasil dari representasi media Inggris tersebut. Dari sinilah muncul Islamofobia oleh masyarakat Inggris non Muslim terhadap warga Muslim di Inggris.

Dengan menggunakan data penelitian konten analisis yang dilakukan Poole & Richardson di tahun 2006, Jaspal dan Cinnirella melihat bahwa dari 974 artikel koran yang diteliti antara 2000 hingga 2008, terdapat tiga “*news hook*” utama atau daya tarik berita yakni “*war on terror*”, isu religius dan kultural, serta ekstremis Muslim. Dalam penelitian ini ditemukan 36% dari narasi mengenai Muslim di Inggris

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Rusi Jaspal & Marco Cinnirella, *Media Representations of British Muslims and Hybridized Threats to Identity* (London: Springer, Cont Islam, 2010), (4), 289-290.

terkonsentrasi pada isu terorisme yang memberikan tendensi representatif pasca serangan teroris di Amerika tahun 2001 dan di Inggris tahun 2005.³⁷ Dikemukakan bahwa Muslim di Inggris merupakan ancaman realistik yang sewaktu-waktu dapat menyerang warga Inggris sehingga berpotensi destruktif terhadap kelompok etno-nasionalis di Inggris.

Berbeda dengan penelitian di atas, Bucholtz dan Hall menerangkan penelitian mereka lebih konseptual dan teoretik. Mereka membahas tentang taktik intersubjektivitas dengan melihat bagaimana “identitas sosial diciptakan melalui bahasa”. Bergerak di luar gagasan esensial di dua kutub identitas – kesamaan dan perbedaan – sebagai sesuatu yang statis, kerangka berpikir itu mampu membedah komponen dalam proses kerja identitas untuk memahami identitas sebagai sebuah fenomena dinamis yang muncul dalam interaksi sosial.³⁸

Aspek yang muncul dari pembentukan identitas – identitas yang diartikan sebagai pencapaian sosial – ini terbukti dalam masa perang, di mana perbedaan tajam antara “*Us*” dan “*Them*” digambarkan dengan garis nyata. Perbedaan antara “*Us*” dan “*Them*” disorot sedangkan kesamaan disisihkan atau diabaikan. Sebaliknya, taktik *adequation* atau pengeleminiasian menciptakan “kesamaan sosial yang diakui” dalam komunitas nasional. “Dalam kaitannya, potensi perbedaan yang paling terlihat adalah adanya proses memilah dari persamaan-persamaan yang diterima yang secara situasional menjadi lebih relevan.”³⁹

Menurut mereka, ideologi memainkan peran penting dalam identitas. Elemen-elemen dasar mengenai kesamaan dan perbedaan bergabung dengan ideologi dalam praktik untuk mencapai *adequation* atau pembedaan. Pada konteks 9/11 menunjukkan bahwa “satu teroris” bisa saja anggota Al-Qaeda yang kemudian memperkuat identitas terorisnya (secara implisit, teroris Al-Qaeda) dengan rezim Irak.

Semua informan menggunakan divisi strategi diskursif yang sama ke dalam dua kelompok, “*Us*” versus “*Them*”, dalam rangka untuk membangun identitas diri

³⁷ *Ibid.* 288.

³⁸ Adam Hodges & Chad Nilep, *Discourse, War and Terrorism* (Eds.; Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007), 67.

³⁹ *Ibid.*

kelompok dan sesuai situasi pasca 9/11 demi memajukan ideologi kelompok. Oleh karena itu, informan membangun dua kelompok melalui asosiasi diri dengan “korban” (perang Yugoslavia). “*The Other*” digambarkan sebagai pelaku dan dimasukkan ke dalam “*non-Western/non-European/non-Christian*”, secara geografis, biologis, standar agama dan moral. Kelompok ini mencakup umat Islam pada umumnya, umat Islam di Kosovo dan Bosnia, Tentara Pembebasan Kosovo, fundamentalis Islam, radikal Islam dan Osama bin Laden.⁴⁰

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep *Framing* dalam Media

Walter Lippmann mengkaji bahwa apa yang diketahui orang-orang mengenai dunia di sekeliling mereka sebagian besar merupakan hasil dari informasi ‘tangan kedua’ yang diperoleh melalui pers dan “*pictures in our heads*” yang merupakan hasil dari pseudo-realitas yang terefleksi dalam berita.⁴¹ Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, orang bergantung pada berita karena mereka tidak tahu mesti ke mana untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan publik dan bagaimana melakukan *framing* serta menginterpretasi informasi tersebut.⁴² Pendapat ini memperkuat alasan penulis untuk menjadikan media sebagai objek penelitian dikarenakan besarnya pengaruh yang dapat ditimbulkan kepada masyarakat melalui pemberitaan, dan bahkan dalam kondisi tertentu mampu mendorong pemerintah untuk memutuskan sebuah kebijakan, tentunya dengan dasar pertimbangan isu yang beredar di masyarakat.

Framing berdampak pada pemberitaan dalam berbagai cara, misalnya, pemilihan topik, sumber, bahasa, dan fotografi. Menurut W. Russel Entman, “Sebuah proses *framing* dilakukan dengan memilih dan menggarisbawahi fitur-fitur realitas dan mengaburkan yang lainnya sedemikian rupa sehingga secara konsisten

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Walter Lippman, dalam Maxwell MacCombs dan Donald Shaw, “The Agenda-Setting Function of Mass Media”, *Public Opinion Quarterly*, (36), 1972, 176-187.

⁴² W. Russel Neuman, Marion R. Just, dan Ann N. Crigler, *Common Knowledge: News and Construction of Political Meaning* (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 11.

menceritakan suatu permasalahan, penyebab-penyebabnya, implikasi moral, dan penyelesaiannya.”⁴³ Oleh sebab itulah, wartawan, editor, produser, dan yang lainnya dalam media secara konsisten membuat keputusan mengenai apa dan kepada siapa berita disajikan dan bagaimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh *standard operational procedure* (SOP) dalam institusi mereka. Entman lebih lanjut mengemukakan empat tingkatan dalam *framing*, yaitu: **agensi** (*agency* atau siapa yang melakukan apa dan terhadap siapa), **identifikasi** (*identification* atau dengan orang-orang di dalam narasi), **kategorisasi** (*categorization* yakni penggunaan kata sifat) dan **generalisasi** (*generalization* atau hubungan terhadap berita-berita lain, perdebatan panjang dan sebagainya).⁴⁴

Tingkatan yang dibuat Entman ini kemudian oleh David C. Giles ditambah yang kelima yakni **naratif** (*narrative*) di mana teks-teks media yang persuasif meminjam formulasi gaya *storytelling* atau bercerita dalam kultur lokal. Giles juga memperluas tingkatan agensi untuk memperjelas penelitiannya terhadap apa yang disebut sebagai ‘*dramatis personae*’ yang secara efektif menggambarkan daftar tokoh yang bermain dalam pemberitaan.⁴⁵

Kelima tingkatan ini nantinya akan ditelaah dalam media mainstream Amerika yang penulis pilih dalam kurun waktu sehari pasca 9/11 hingga sehari pasca dikeluarkannya kebijakan Global War on Terror. Dengan melihat kelima tingkatan ini, penulis yakin bahwa *framing* yang dilakukan media mainstream Amerika terhadap pemberitaan peristiwa 9/11 telah membentuk opini publik mengenai apa dan bagaimana pemerintah seharusnya merespon tindakan terorisme. Sehingga implikasinya menyebabkan munculnya ‘desakan’ publik yang dilegitimasi oleh media kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah. Konten berita yang diteliti tidak

⁴³ Robert M. Entman, “Framing: towards Clarification of a Fractured Paradigm”, dalam David C. Giles & Rachel L. Shaw, *The Psychology of News Influence and the Development of Media Framing Analysis* (Social and Personality Psychology Compass, 2009), 3(4), 377. Lebih lanjut lihat Robert M. Entman, “Framing US Coverage of International News: Contrasts in Narratives of the KAL and Iran Air Incidents”, *Journal of Communication*, 41, 1991, 6-27.

⁴⁴ *Ibid.* 378.

⁴⁵ *Ibid.*

terbatas pada teks-teks, sumber, bahasa, dan gambar yang digunakan untuk mengilustrasikan topik berita secara keseluruhan.

1.5.2 Konsep Identitas dalam Politik Global

Stuart Hall membedakan antara identitas dan proses identifikasi, yang menurutnya keduanya memiliki dimensi psikologis dan diskursif. Hal ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai “*sense of self*”, tetapi bagaimana pemaknaan diri dan orang lain diproduksi dan direproduksi secara rasional melalui diskursus yang merepresentasi “*self* dan *other*”.⁴⁶ Dalam hal ini, diskursus dipandang sebagai mediator atau perantara di mana kita melakukan proses menginterpretasi material dan mengkonstitusi dunia sosial pada tataran intersubjektif sehingga sebuah diskursus menjadi signifikan karena dapat membangun legitimasi tertentu dan mampu menerangkan kemungkinan sebuah tindakan dalam suatu pandangan.⁴⁷ Oleh karena itu, diskursus identitas berperan penting dalam melakukan *framing* dan mengkonstitusi suatu proses politik. Jennifer Milliken berpendapat bahwa diskursus identitas “tidak hanya dapat mengkonstitusi aktor, tetapi juga memunculkan hal-hal yang mungkin, apa yang dilegitimasi dan apa yang diharapkan dari legitimasi itu.”⁴⁸

Di mata Iver B. Neumann, identitas dipandang sebagai sesuatu yang memberikan kita makna diri yang menjelaskan siapa kita, dan apa yang kita lakukan. Menurutnya, “perbedaan-perbedaan dan persepsi dari *alterity* merupakan pusat dari pengkonsitusian diri” di mana dalam proses tersebut, individu dan kelompok membangun pemaknaan identitas yang membedakan mereka dari yang lain.⁴⁹

⁴⁶ Stuart Hall, “Who Needs Identity?”, dalam Stuart Hall and Paul du Gay, *Questions of Cultural Identity* (Eds.; London: Sage Publications, 1996) 62.

⁴⁷ Jacinta O’Hagan, “The Power and the Passion: Civilizational Identity and Alterity in the Wake of September 11”, dalam Patricia M. Goff & Kevin C. Dunn, *Identity and Global Politics: Empirical and Theoretical Elaborations* (Eds.; New York: Palgrave Macmillan, 2004), 27-28.

⁴⁸ Jennifer Milliken, “The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research and Methods”, *European Journal of International Relations*, 5 (2), 1999, 22.

⁴⁹ Iver B. Neumann, *Uses of the Other: “The East” in European Identity Formation* (Minnesota: University of Minnesota Press, 1999), 78.

Patrica M. Goff & Kevin C. Dunn menyebutkan bahwa terdapat empat dimensi dalam identitas⁵⁰, keempat dimensi itu antara lain:

1. Alteritas (*Alterity*)

Alteritas didefinisikan bahwa hubungan antara *self* dan *other* sangat ambigu dan *fluid*, dengan kemungkinan melewati batas-batas antara diri dan orang lain secara nyata. Proses “*othering*” berefek pada subordinasi atau pendepakan pihak yang dianggap berada di luar kelompok (*outgroup*). Termasuk bila proses inklusi itu terjadi dalam suatu kelompok, tidak tertutup kemungkinan juga terjadinya subordinasi.⁵¹

2. Fluiditas (*Fluidity*)

Dalam hal ini identitas didefinisikan sebagai suatu yang terpecah-pecah, bercampur, dan bertentangan. Terbukti bahwa identitas terus berkembang dan dinamis. Suatu peristiwa mampu menyebabkan perubahan pada identitas, demikian sebaliknya perkembangan identitas mampu mempengaruhi suatu kejadian dan kondisi material tertentu.⁵²

3. Terbangun (*Constructedness*)

Secara sederhana, identitas diartikan sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial. Dalam dimensi identitas ini, agen-agen yang berpartisipasi dalam konstruksi suatu identitas tidak terbatas, yang terbatas hanyalah pengaruh relatif dan efektivitasnya.⁵³

4. Berlapis atau banyak (*Multiplicity*)

Dimensi identitas ini didefinisikan sebagai suatu yang multidimensional, terkadang terorganisasi secara hierarki, dan selalu berada dalam proses.

1.5.3 Konsep Peradaban dan Identitas Peradaban

Sebuah peradaban, menurut Goff & Dunn, mengimplikasikan suatu proses universal yang mengacu pada pluralitas dari suatu kolektivitas budaya. Kaitannya

⁵⁰ Goff & Dunn, *Op. Cit.* 4.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.* 5.

⁵³ *Ibid.* 6-7.

dengan identitas peradaban bahwa kedua tren ini dalam konsep peradaban berkontribusi untuk saling mengkonstitusi secara berbeda satu sama lain.⁵⁴

Batasan dalam definisi ini adalah manakala sebuah peradaban terkonseptualisasi sebagai suatu proses tunggal, maka yang lainnya sering dikonstitusikan sebagai suatu yang “*barbarian*” atau buas/liar, yakni mereka yang tidak memiliki peradaban. Batasan kedua menjelaskan perkembangan etimologi dari terminologi peradaban dalam pengertian jamak, mengacu pada suatu peradaban sebagai komunitas budaya yang beragam. Manakala peradaban dikonseptualisasi sebagai kolektivitas budaya, maka yang tidak termasuk ke dalam peradaban itu dikonstitusikan sebagai peradaban “lain”.⁵⁵

Identitas peradaban menjadi premis dari aspirasi terhadap nilai dan norma yang bersifat universal, bukan dari identitas agama, etnis, dan bahasa tertentu. *The other*, dalam konteks ini, merupakan kelompok yang berupaya merusak tatanan nilai dan aspirasi tersebut. Nilai-nilai yang dimaksud adalah kebebasan, keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. *The other* dalam hal ini dikonstitusikan sebagai pihak yang tidak mampu mengusung nilai-nilai itu. Akibatnya, mereka dikategorikan sebagai *barbarian*, yang bersifat regresif dan represif seperti yang dituturkan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, “Kita negara demokratis, mereka tidak. Kita menghargai sesama manusia, mereka tidak. Kita memegang teguh nilai-nilai liberal, mereka tidak.”⁵⁶

1.5.4 Konsep Keamanan Nasional

Konsep keamanan adalah salah satu konsep yang paling banyak diperdebatkan. Para ahli sepakat bahwa keamanan menyangkut kebebasan dari ancaman terhadap nilai-nilai inti, namun mereka berbeda pendapat mengenai fokus perhatian, apakah pada keamanan individual, nasional, atau internasional. Ketiga tingkatan keamanan tersebut tidak jarang bertentangan satu sama lain. Dalam era

⁵⁴ *Ibid.* 33.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Tony Blair, *International Terrorism and Attacks in the USA* (House of Commons, 2001, September 14).

globalisasi, tingkatan-tingkatan tersebut diperluas sehingga mencakup keamanan global.

Keamanan didefinisikan secara terbatas, yaitu hanya pada tingkat nasional atau domestik. Berikut adalah beberapa pendapat lain mengenai konsep keamanan⁵⁷:

Walter Lippmann mendefinisikan keamanan sebagai berikut: sebuah bangsa dikatakan aman apabila mereka tidak berada dalam keadaan harus mengorbankan nilai-nilai inti mereka jika ingin menghindari perang, dan mampu, jika ditantang, mempertahankan nilai-nilai melalui kemenangan dalam perang tersebut”. Sedangkan Arnold Wolfers menyatakan bahwa “Keamanan dalam pengertian objektif mengukur ketiadaan ancaman untuk mendapatkan nilai-nilai dan dalam pengertian subjektif mengukur ketiadaan rasa takut akan terserangnya nilai-nilai tersebut”. Pengertian ini mempertegas dua aspek atau ‘wajah’ dari keamanan yang dikemukakan penulis, yaitu sebagai suatu keadaan yang objektif dan sebagai suatu persepsi yang sifatnya subjektif.

Di samping itu, Barry Buzan mengatakan bahwa “Dalam hal keamanan, pembicaraan yang terjadi adalah mengenai pengejaran rasa bebas akan ancaman. Dalam konteks sistem internasional, keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat-masyarakat untuk mempertahankan keamanan dan integritas fungsional mereka”. Pengertian keamanan ini juga dilihat dari tingkat nasional, meskipun Buzan menyebut “dalam konteks internasional”, karena menekankan kemampuan negara dalam mempertahankan integritas dan keamanannya masing-masing.

Buzan berpendapat bahwa keamanan dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama adalah level analisis yang sesuai, apakah di tingkat tradisional dengan fokus kepada negara ataukah di tingkat individu, atau malah di tingkat internasional/komunitas global. Dari ketiga pendapat tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa konsep keamanan memang banyak ditekankan pada keamanan nasional yang menekankan pentingnya negara sebagai unit politik utama. Mungkin hal ini disebabkan oleh dominasi negara dalam sistem internasional sehingga keamanan internasional

⁵⁷ John Baylis, “International and Global Security in the Post-Cold War Era”, dalam John Baylis and Steve Smith, *Globalization of World Politics* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 255.

dianggap sebagai fungsi dari keamanan negara. Pertanyaan yang muncul adalah, “Apakah keamanan internasional hanyalah fungsi atau agregasi dari keamanan nasional semata?”. Jika sistem internasional adalah sesuatu yang bukan hanya kumpulan dari unsur-unsurnya (negara), melainkan sebuah entitas baru yang memiliki atribut sendiri, berarti keamanan internasional memiliki atribut yang bukan hanya agregasi dari keamanan unsur-unsurnya (keamanan negara/nasional).

Kategori yang kedua menurut Buzan merupakan domain di mana ancaman-ancaman terhadap keamanan terlihat, yaitu sebagai berikut⁵⁸:

1. Keamanan militer memperhatikan dua level kekuatan negara: ofensif dan defensif dan persepsi masing-masing negara terhadap intensi satu sama lain
2. Keamanan politik memperhatikan stabilitas organisasional, sistem pemerintahan, dan ideologi yang memberi mereka legitimasi
3. Keamanan ekonomi memperhatikan akses terhadap sumber daya, keuangan, dan pasar yang diperlukan untuk mempertahankan level yang dapat kesejahteraan dan kekuasaan negara yang dapat diterima.
4. Keamanan lingkungan memperhatikan proses mempertahankan biosfer lokal dan planet sebagai sistem yang esensial yang kepadanya seluruh manusia bergantung.
5. Keamanan sosial mempertahankan ketertiban, dalam kondisi evolusi yang dapat diterima, mengenai pola-pola tradisional bahasa, kebudayaan, dan keagamaan, serta kebiasaan dan identitas nasional.

Seperti yang dibahas sebelumnya, tingkatan-tingkatan keamanan kadangkala bertentangan satu sama lain. Terkadang, keamanan individu bertentangan dengan keamanan nasional, misalnya ketika negara mengalokasikan sebagian besar sumber dayanya untuk membangun kekuatan militer (meningkatkan keamanan militer negara) dan mengorbankan pembangunan ekonominya, seperti dalam kasus Korea Utara, yang pada akhirnya mengancam kesejahteraan ekonomi warga negaranya. *Trade off* seperti itu sering terjadi, juga dalam hak-hak individu lainnya, seperti

⁵⁸ Frank Bealey, Richard A. Chapman, Michael Sheehan, *Elements In Political Science* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999), 23.

kebebasan mengemukakan pendapat, berorganisasi, berpolitik, dan sebagainya. Hal ini terutama terjadi di negara-negara yang otoriter.

Dalam konteks keamanan nasional dan internasional, terutama semasa Perang Dingin, aspek keamanan yang paling mendapat perhatian adalah keamanan militer. Negara menggunakan instrumen militernya untuk beberapa tujuan, salah satunya adalah *deterrence* atau penangkalan yang menurut Kissinger berarti kemampuan untuk mencegah dilaksanakannya ancaman-ancaman tertentu dengan cara memberikan ancaman yang sama atau lebih besar. Kekuatan militer dapat pula digunakan sebagai alat paksa (koersi) untuk memaksa suatu negara melakukan sesuatu. Sebenarnya, keamanan nasional tidak hanya menyangkut aspek militer, tapi juga aspek ekonomi dan sosial-budaya. Suatu negara dapat menjadi kacau, bahkan hancur karena permasalahan ekonomi dan sosial, misalnya Uni Soviet, Jerman Timur, Argentina, dan Indonesia. Tentu saja serangan militer adalah cara yang paling mudah dan paling sering menghancurkan sebuah negara, tapi di dalam sistem internasional kontemporer hal itu tidak lagi sering terjadi karena penggunaan perang sebagai instrumen penyelesaian masalah telah dilarang dan ditinggalkan.

Keamanan nasional dan internasional berkaitan erat dengan perang. Definisi perang menurut Hedley Bull adalah kekerasan yang terorganisasi yang dilakukan oleh unit-unit politik yang saling berlawanan satu sama lain. Perang mencakup kekerasan kolektif skala besar dan bertujuan untuk membunuh anggota grup lawan, bukan hanya menyakiti mereka.⁵⁹

1.6 Asumsi-Asumsi Penelitian

Sebagai landasan awal dari penelitian ini, maka penulis mencoba merumuskan beberapa asumsi penelitian, yakni:

1. Pasca tragedi 9/11, the New York Times kehilangan karakternya dalam memegang fungsi kontrol terhadap pemerintah, sebaliknya mendorong segera dikeluarkannya kebijakan kontroversial Global War on Terror.

⁵⁹ *Ibid.*

2. Konstruksi media mainstream Amerika terhadap identitas peradaban Amerika telah membentuk upaya “*othering*” sekaligus mempertebal nasionalisme dan patriotisme masyarakat Amerika.
3. Implikasi dari asumsi kedua menjadi ajang untuk menggalang dukungan dan legitimasi publik terhadap Global War on Terror sehingga memperoleh justifikasi.
4. Bila media mainstream Amerika berlaku kritis terhadap pemerintah, maka kebijakan Global War on Terror tidak berjalan atau bahkan tidak muncul.
5. Bahasa dapat menjadi alat yang kuat dalam mengarahkan audiens untuk memahami isu dan peristiwa dengan cara-cara tertentu.
6. Ketidakseimbangan media dalam mengekspos isu terorisme justru mampu menjadikannya sebagai ancaman baru bagi masyarakat dunia di samping terorisme itu sendiri.

1.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan sumber-sumber utama berupa literatur-literatur yang relevan, artikel, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain yang berkaitan dengan masalah ini. Sesuai dengan topik tesis yang ingin melihat bagaimana pemberitaan media mainstream Amerika mendorong dikeluarkannya kebijakan Global War on Terror, maka penulis memilih artikel koran the New York Times yang menjadi *headline* dari tanggal 12 September 2001 (sehari pasca 9/11) sampai tanggal 21 September 2001 (sehari pasca dikeluarkan Global War on Terror) serta tulisan editorial di kurun waktu yang sama. *Time frame* ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa pemberitaan the New York Times selama kurun waktu tersebut telah mampu mendorong pemerintah, termasuk menggalang dukungan masyarakat Amerika, dalam mengeluarkan kebijakan Global War on Terror. Total artikel dan editorial yang dianalisis pada sepuluh hari tersebut sebanyak 21 tulisan.

Pilihan penulis jatuh kepada the New York Times mengingat koran ini merupakan koran mainstream berpengaruh di Amerika yang sudah ada sejak tahun 1851 dengan jumlah pembaca terbanyak ketiga setelah the Wall Street Journal, yang

lebih menekankan pada isu ekonomi, dan USA Today, yang baru berusia 30 tahun. Selain itu, alasan penulis memilih the New York Times adalah karena target pembacanya adalah kalangan menengah ke atas yang umumnya berpendidikan. The New York Times juga dikenal sebagai korannya pejabat dan pembuat keputusan di Amerika. Haluan the New York Times yang liberal dan kiri menjadikannya sebagai koran yang kritis terhadap pemerintah dan menjadi kiblat bagi media di seluruh dunia.⁶⁰

Materi publikasi lainnya seperti makalah konferensi dan situs web resmi dijadikan sumber sekunder dalam penelitian ini. Di samping itu, opini dan fakta yang dicatat melalui proses interview juga menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian.

Dikarenakan penelitian ini merupakan studi tekstual, hermeneutika kritis yang merupakan metode penafsiran sangat diperlukan guna menafsirkan teks-teks agar diperoleh argumentasi dan temuan yang rasional dan obyektif. Untuk mencapai objektivitas itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar terhindar dari pengaruh asumsi-asumsi ontologis tertentu sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan kesimpulan epistemologis yang diharapkan.

Penelitian kualitatif, menurut David M. Silbergh didefinisikan sebagai cara untuk memproduksi kesimpulan teoritis secara induktif, apakah melalui pengembangan *grounded theory*⁶¹ atau melalui masukan untuk memodifikasi teori dalam temuan empiris.⁶² Alasan penulis memilih metode kualitatif untuk penelitian ini dikarenakan kekuatan penelitian kualitatif terletak pada validitas data yang diperoleh.⁶³ Kendati demikian, penulis tidak memungkiri bahwa kelemahan penelitian kualitatif ini adalah dengan sedikitnya jumlah artikel yang penulis analisis

⁶⁰ Jeroen Dragt, *Remembering 9/11: An Analysis of the Editorial Coverage of the Anniversaries of 9/11*, BA Thesis English Language and Culture, Utrecht University, 2011 January, 21-22.

⁶¹ *Grounded Theory* menurut Strauss dan Corbin dimaknai sebagai sebuah teori yang ditarik secara induktif dari pengkajian fenomena yang diwakilkannya. *Grounded theory* ditemukan, dibangun, dan diverifikasi melalui pengumpulan data sistematis dan analisis data terkait fenomena yang dikaji. Strauss and Corbin dalam David M. Silbergh, *Doing Dissertation in Politics: A Student Guide* (London and New York: Routledge, 2001), 129.

⁶² *Ibid.* 125-126.

⁶³ Catherine Hakim, *Research Design: Strategies and Choices in the Design of Social Research* (2nd edn.; London: Routledge, 2000), 36.

dari the New York Times pada dasarnya tidak cukup merepresentasi koran secara menyeluruh.

Secara sistematis, penulis melewati empat proses dalam pengolahan data, yakni 1) pengumpulan data, 2) pengkategorisasian data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan kesimpulan. Kesulitan dalam pengumpulan data terletak pada keterbatasan akses berita dari arsip resmi koran yang penulis analisis. Awalnya penulis juga berkeinginan untuk menganalisis the Washington Post sebagai pembanding analisis the New York Times yang penulis lakukan. Karena keterbatasan akses tersebut, the Washington Post tidak dijadikan bagian dalam analisis, namun tidak mengubah asumsi dasar penelitian ini.

Proses analisis data penulis lakukan dengan membuat tabulasi dari masing-masing artikel. Artikel dikategorisasikan berdasarkan urutan tanggal publikasi, tema yang diangkat, isu utama, dan identifikasi kata yang dipotret the New York Times dalam pemberitaannya. Tabulasi yang penulis rancang kemudian dianalisis dengan memperhatikan konsep-konsep yang penulis batasi. Dari analisis inilah kemudian penulis membangun sebuah model analisis yang menunjukkan relasi dan keterkaitan konten pemberitaan dengan isu utama yang penulis pertanyakan dalam penelitian.

Dalam menyajikan data, penulis menyadari bahwa analisis konten yang dilakukan bersifat interpretatif. Sebagaimana yang diungkapkan John W. Creswell bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretatif sehingga berpotensi munculnya bias secara eksplisit dalam penilaian peneliti, namun Creswell memandang hal itu sebagai sesuatu yang berguna dan positif.⁶⁴ Oleh karena itu, agar tetap menjaga validitas data, maka penulis melakukan analisis secara tekstual dengan pendekatan linguistik kognitif.

Di samping itu, penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis mengingat studi ini bertujuan untuk merekonstruksi dan mengetahui bagaimana pemberitaan media mainstream Amerika mendorong dikeluarkannya kebijakan Global War on Terror. Penulis memilih menggunakan paradigma ini berdasarkan

⁶⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* (Thousand Oaks CA: Sage Publications, 1994), 7.

asumsi dasar konstruktivisme bahwa semua fenomena yang ada pada hakikatnya adalah hasil dari konstruksi sosial sehingga untuk menelaahnya perlu untuk merekonstruksi kasus tersebut guna mendapat pola baru yang dapat menjelaskan permasalahan secara lebih komprehensif.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam empat bab sebagai berikut: **BAB 1** dimulai dengan pendahuluan yang berisi rumusan permasalahan, pertanyaan permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, asumsi penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. **BAB 2** memaparkan pemberitaan media mainstream Amerika, dalam hal ini the New York Times, terkait kasus terorisme pasca 9/11. Bab ini lebih jauh menyajikan bagaimana the New York Times memformulasikan atau mengagendakan sebuah pemberitaan sehingga terkonstruksi sebuah pesan terhadap masyarakat dan pemerintah terkait respon terhadap peristiwa 9/11. **BAB 3** memaparkan analisis dengan menggunakan kerangka teoritis terkait narasi pemberitaan the New York Times dalam mendorong dikeluarkannya kebijakan Global War on Terror. Bagian akhir dari makalah ini meringkas diskusi dalam satu kesimpulan yakni **BAB 4**. Di bagian akhir ini pula penulis mengajukan sebetulnya pemikiran agar kiranya dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk bagaimana mengambil langkah dalam memberantas terorisme melalui perspektif yang diusulkan. Makalah ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai referensi dalam melakukan penelitian.

BAB 2

PEMBERITAAN THE NEW YORK TIMES PASCA TRAGEDI 9/11

Penelitian tesis ini fokus pada pemberitaan yang dilakukan koran mainstream Amerika, the New York Times selama periode sepuluh hari pasca tragedi 9/11 mulai dari tanggal 12 September 2001 sampai 21 September 2001. The New York Times berdiri sejak 18 September 1851 dirintis oleh Henry Jarvis Raymond dan terus terbit hingga saat ini. The New York Times dikenal memiliki reputasi yang tinggi dan telah memenangkan 108 Pulitzer Prizes terbanyak dari organisasi media manapun. Dibandingkan koran lainnya di Amerika, the New York Times merupakan koran dengan sirkulasi terbesar ketiga setelah the Wall Street Journal dan USA Today. Koran ini mengusung motto “*All the News That’s Fit to Print*” dan disusun ke dalam tiga rubrik utama: News, Opinions, dan Features.¹

Sejak berdirinya, haluan the New York Times dikenal konservatif dan radikal yang percaya bahwa konservatisme penting bagi khalayak, namun dalam masyarakat tidak ada yang mutlak benar dan salah. Haluan ini kerap dipertahankan, namun seiring bergantinya zaman seperti kondisi perang, tekanan pemerintah, dan sebagainya menyebabkan the New York Times mulai menyesuaikan haluannya. Nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat yang diusung Amerika, menjadikan the New York Times kritis dalam menyikapi isu yang berkembang di masyarakat. Tahun 2007, survei yang dilakukan Rasmussen Reports mengenai persepsi publik terhadap media besar Amerika, menunjukkan bahwa 40% memandang the New York Times berhaluan liberal, 20% berpendapat the New York Times tidak secara spesifik menunjukkan keberpihakan politik, dan 11% melihat pandangan konservatif dalam pemberitaan the New York Times. Sebelumnya di tahun 2004, University of California memberi poin 73.7 dalam skala 100 untuk nilai liberal yang diusung the New York Times.²

¹ *Timeline of the New York Times Building*. The New York Times Company, <www.nytc.com/company> diakses pada 23 April 2012, pukul 14:21 WIB.

² *Ibid.*

Sebagai koran terkemuka di Amerika, the New York Times diasumsikan menjadi indikator tren media di Amerika. Dalam lingkup yang lebih luas, keberadaan Amerika sebagai negara adidaya, menjadikan the New York Times memiliki pengaruh yang penting bagi perkembangan media di dunia. Terlebih pasar pembaca the New York Times umumnya menargetkan kalangan menengah ke atas, politisi, akademisi, dan pembuat kebijakan sehingga penyampaian berita yang kritis menjadi yang dicari pembaca yang umumnya berpendidikan. Di samping itu, the New York Times memiliki 16 biro di New York, 11 biro di seluruh Amerika Serikat, dan 26 biro asing di seluruh belahan dunia.³ Dengan kata lain, pengaruh pemberitaan the New York Times secara global dipandang memiliki pengaruh dalam dimensi internasional.

Dalam membangun persepsi publik, sebuah koran menjadikan editorial sebagai perantara untuk menyampaikan pemikiran yang merefleksikan haluan dari koran tersebut. Dengan kata lain, editorial menjadi sentra opini dari keseluruhan artikel yang terbit di hari itu. Karena bersifat periodik, maka editorial pun bertujuan mengomentari peristiwa mutakhir dan menampilkannya dalam bentuk ringkasan peristiwa, evaluasi dari kejadian khususnya aksi dan aktor terkait, dan kesimpulan pragmatis termasuk rekomendasi atau peringatan.⁴ Isu dalam editorial dianggap penting untuk segera disampaikan kepada pembacanya, sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah terbentuknya persepsi pembaca melalui mekanisme reproduksi sosial memori yang didikte lewat teks.⁵

Editorial merupakan sebuah artikel yang ditulis oleh senior editor atau *publisher* yang menggambarkan opini dari sebuah koran atau majalah secara periodik. Untuk menghasilkan sebuah editorial, jajaran editor di sebuah koran biasanya melakukan evaluasi terhadap isu yang dianggap penting untuk diketahui pembacanya dengan tujuan untuk menunjukkan bagaimana sebuah koran memandang isu tersebut.⁶ Dalam dunia jurnalistik, sebuah editorial dijadikan sebagai indikator untuk

³ *Ibid.*

⁴ Teun A. van Dijk, "Opinions and Ideologies in the Press", dalam Allan Bell and Peter Garrett, *Approaches to Media Discourse* (Eds.; Oxford: Blackwell, 1998), 11.

⁵ *Ibid.*

⁶ Christopher K. Passante, *The Complete Idiot's Guide to Journalism – Editorials* (New York: Penguin, 2007), 20.

mengetahui kualitas konten dari sebuah koran termasuk penerbit yang menaungi koran. Editorial pun kerap dijadikan sebagai materi untuk mengukur tingkat *readership* dari sebuah koran termasuk nilai komersial yang diukur di luar sirkulasi peredaran.

Dalam penelitian ini, keberadaan editorial dalam sebuah koran menjadi penting untuk dianalisis mengingat editorial dalam the New York Times menjadi sentra dari opini yang terkandung dalam artikel-artikel lainnya. Secara khusus, editorial dalam the New York Times dimasukkan ke dalam rubrik “Opinions” yang di dalamnya juga memuat “Letter-to-the-Editor” dan opini dari editor publik. Editorial dalam the New York Times ditampilkan dengan format artikel dilengkapi judul dan jumlah kata yang berkisar antara 800 – 1500 kata.

Selain editorial, keberadaan *headline* tidak dapat dipandang sebelah mata. *Headline* dalam sebuah koran berbentuk teks yang disajikan di bagian paling atas di halaman utama sebuah koran yang mengindikasikan esensi dasar dari artikel di bawahnya. *Headline* berfungsi menarik perhatian secara cepat untuk selanjutnya membuat pembaca membaca keseluruhan konten dalam artikel. *Headline* biasanya ditulis dengan huruf kapital dan diketik tebal serta berukuran besar.⁷ Riset menunjukkan bahwa rata-rata orang membaca *headline* tiga sampai lima kali lebih sering dari membaca keseluruhan artikel. Maka, jika pesan yang ingin disampaikan tidak jelas di *headline*, sebuah berita menjadi berkurang nilainya.⁸

Dalam the New York Times, *headline* telah menjadi bagian krusial dalam menggambarkan isu penting. Tidak hanya secara cepat menarik perhatian pembaca, *headline* dalam the New York Times diformulasikan sedemikian rupa lengkap dengan foto atau *image* di halaman depan sehingga menjadi acuan pertama ketika hendak membaca keseluruhan konten di dalamnya. Sama halnya dengan koran-koran lain pada umumnya, *headline* dalam the New York Times disajikan di halaman depan dilengkapi artikel dari jurnalis.

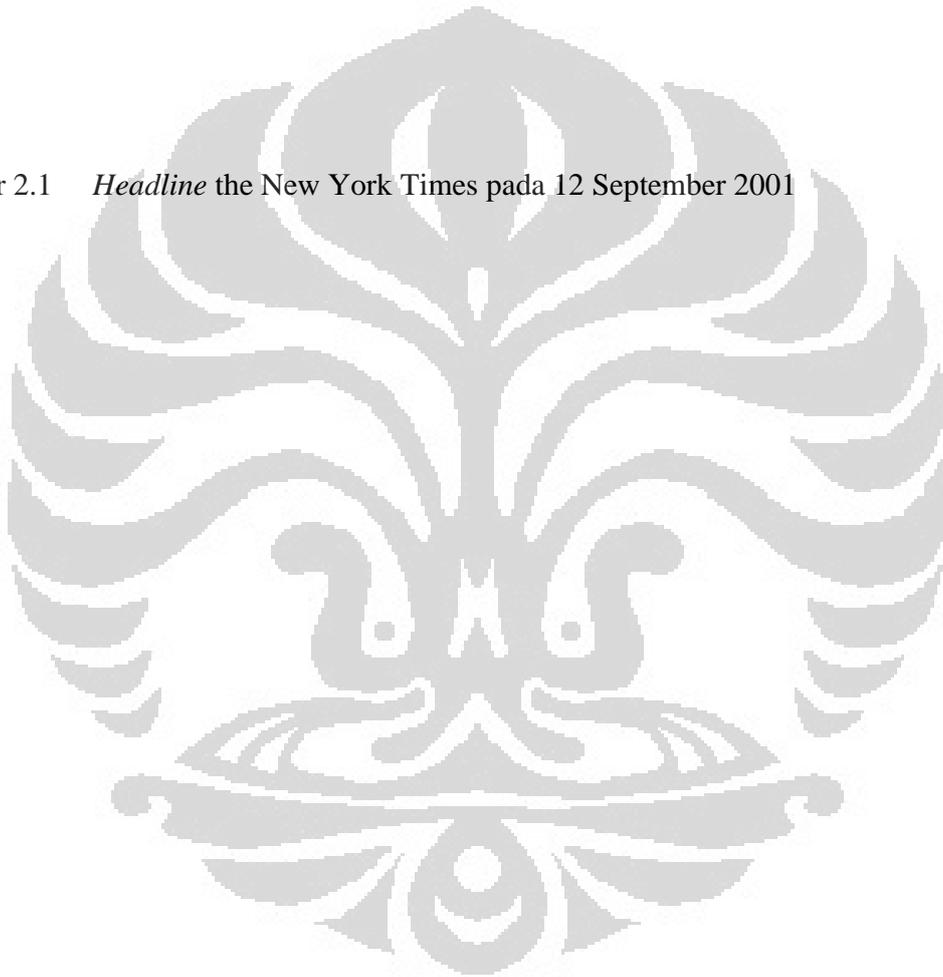
⁷ Michael Kinsley, *Boring Article Contest* (The Atlantic, 2010, July 28).

⁸ *Ibid.*

Analisis terhadap *headline* menjadi signifikan mengingat potensi sebuah *headline* dalam membangun koneksi dengan pembaca sangat besar. Pembaca akan mudah mengingat sebuah berita melalui *headline*. Dengan asumsi ini, maka *headline* turut menjadi bahan dasar analisis dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 berikut penulis tampilkan untuk mendemonstrasikan satu dari sepuluh *headline* the New York Times yang penulis pilih untuk dianalisis.

Gambar 2.1 *Headline* the New York Times pada 12 September 2001



"All the News That's Fit to Print"

The New York Times

Late Edition
New York: Today, sunny, a few afternoon clouds. High 77. Tonight, slightly more humid. Low 65. Tomorrow, sun then clouds. High 81. Yesterday, sun 81, low 63. Weather map, Page C19.

VOL. CL. . No. 51,874

Copyright © 2001 The New York Times

NEW YORK, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2001

It helped the greatest New York metropolitan area.

75 CENTS

U.S. ATTACKED HIJACKED JETS DESTROY TWIN TOWERS AND HIT PENTAGON IN DAY OF TERROR

A CREEPING HORROR

Buildings Burn and Fall as Onlookers Search for Elusive Safety

By N. R. KLEINFELD

It kept getting worse.

The horror arrived in episodic bursts of chilling disbelief, signified first by trembling floors, sharp eruptions, cracked windows. There was the actual unfathomable realization of a gaping, flaming hole in the side of the tall towers, and then the same thing all over again in its twin.

There was the maddening sight of bodies helplessly flung out, some of them in flames.

Finally, the mighty towers themselves were reduced to nothing. Dense plumes of smoke raced through the downtown avenues, coursing between the buildings, shaped like tornadoes on their sides.

Every sound was cause for alarm. A plane appeared overhead. Was another one coming? No, it was a fighter jet. But was it friend or enemy? People scrambled for their lives, but they didn't know where to go. Should they go north, south, east, west? Stay outside, go indoors? People hid beneath cars and each other. Some contemplated jumping into the river.

For those trying to flee the very epicenter of the collapsing World Trade Center towers, the most horrendous thought of all finally dawned on them: nowhere was safe.

For several panic-stricken hours yesterday morning, people in Lower Manhattan witnessed the inexplicable, the incomprehensible, the unthinkable. "I don't know what the gates of hell look like, but it's got to be like this," said John Maloney, a security director for an Internet firm in the trade center. "I'm a combat veteran, Vietnam, and I never saw anything like this."

The first warnings were small ones. Blocks away, Jim Farmer, a film composer, was having breakfast at a small restaurant on West Broadway. He heard the sound of a jet. An odd sound — too loud, it seemed, to be

Continued on Page A7

A Somber Bush Says Terrorism Cannot Prevail

By ELISABETH BUNILLER with DAVID E. SANGER

WASHINGTON, Sept. 11 — President Bush vowed tonight to retaliate against those responsible for today's attacks on New York and Washington, declaring that he would "make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them."

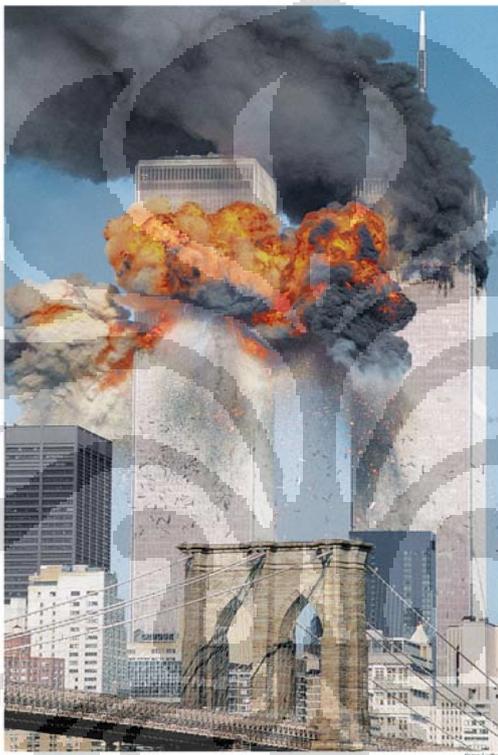
"These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat, but they have failed," the president said in his first speech to the nation from the Oval Office. "Our country is strong. Terrorist acts can shake the foundation of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America."

His speech came after a day of trauma that seems destined to define his presidency. Seeking to at once calm the nation and declare his determination to exact retribution, he told a country numbed by repeated scenes of carnage that "these acts shattered steel, but they cannot dent the steel of American resolve."

Mr. Bush spoke only hours after returning from a zigzag course across the country, as his Secret Service and military security teams moved him from Florida, where he woke up this morning expecting to press for his education bill, to command posts in Louisiana and Texas before it was determined the attacks had probably ended and he could safely return to the capital.

It was a sign of the catastrophic

Continued on Page A4



AMERICAN TARGETS A ball of fire exploded outward after the second of two jetliners slammed into the World Trade Center, less than two hours later, both of the 110-story towers were gone. Hijackers crashed a third airliner into the Pentagon, setting off a huge explosion and fire.

President Vows to Exact Punishment for 'Evil'

By SERGE SCHMEMMANN

Hijackers rained jetliners into each of New York's World Trade Center towers yesterday, toppling both in a hailish storm of ash, glass, smoke and leaping victims, while a third jetliner crashed into the Pentagon in Virginia. There was no official count, but President Bush said thousands had perished, and in the immediate aftermath the calamity was already being ranked the worst and most audacious terror attack in American history.

The attacks seemed carefully coordinated. The hijacked planes were all en route to California, and therefore gorged with fuel, and their departures were spaced within an hour and 40 minutes. The first, American Airlines Flight 11, a Boeing 767 out of Boston for Los Angeles, crashed into the north tower at 8:48 a.m. Eighteen minutes later, United Airlines Flight 175, also headed from Boston to Los Angeles, plowed into the south tower.

Then an American Airlines Boeing 757, Flight 77, left Washington's Dulles International Airport bound for Los Angeles, but instead hit the western part of the Pentagon, the military headquarters where 24,000 people work, at 7:59 a.m. Finally, United Airlines Flight 93, a Boeing 737 flying from Newark to San Francisco, crashed near Pittsburgh, raising the possibility that its hijackers had failed in whatever their mission was.

There were indications that the hijackers on at least two of the planes were armed with knives. Attorney General John Ashcroft told reporters in the evening that the suspects on Flight 11 were armed that way. And Barbara Olson, a television commentator who was traveling on American Flight 77, managed to reach her husband, Solicitor General Theodore Olson, by cell phone and to tell him that the hijackers were armed with knives and a box cutter.

In all, 266 people perished in the four planes and several more were known dead elsewhere. Numerous firefighters, police officers and other rescue workers who responded to the initial disaster in Lower Manhattan were killed or injured when the buildings collapsed. Hundreds were treated for cuts, broken bones, burns and smoke inhalation.

But the real carnage was concealed for now by the twisted, smoking, ash-choked carcasses of the twin towers, in which thousands of people used to work on a weekday. The collapse of the towers caused another World Trade Center building to fall 7 hours later, and several

Continued on Page A16

Awaiting the Aftershocks

Washington and Nation Plunge Into Fight With Enemy Hard to Identify and Punish

By R. W. APPLE JR.

WASHINGTON, Sept. 11 — To a sense of equilibrium, with warplanes and heavily armed helicopters crossing overhead, past and present national security officials earnestly debated the possibility of a Congressional declaration of war — but against precisely whom, and in what exact circumstances? Warships were maneuvering to protect New York and Washington. The North American Air Defense Command, which had adopted a posture of the cold war, adopted a posture

Continued on Page A24

MORE ON THE ATTACKS

RESCUERS BECOME VICTIMS Firefighters who rushed to the trade center were killed. **PAGE A7**

SEARCH FOR SURVIVORS Some people trapped in the rubble for hours were rescued. **PAGE A2**

OFFICIALS SUSPECT BIN LADEN Eavesdropping intercepts after the attacks were cited. **PAGE A7**

TERRORISTS EXPLOIT WEAKNESS Investigators had criticized precautions against hijacking. **PAGE A7**

CASUALTIES IN WASHINGTON An unknown number of people were killed at the Pentagon. **PAGE A8**

FOR HOME DELIVERY CALL 800-421-7877

0 12 5 4 6 1 3 8 3 7 3 0 1

Sumber: Situs Resmi the New York Times <<http://www.nytc.com/company>>

Universitas Indonesia

2.1 Pola Pemberitaan the New York Times Pasca 9/11

Pemberitaan terhadap isu terorisme pasca 9/11 menjadi poin penting dalam melihat sejauh apa eksposur media terhadap isu terorisme merebak. Sebelum terjadinya serangan terhadap WTC dan Pentagon, isu terorisme tidaklah terlalu penting. Kondisi ini berbalik pasca 9/11 bahwa hampir seluruh bagian dalam koran dipenuhi oleh berita seputar serangan mulai dari kondisi WTC dan Pentagon pasca serangan, korban yang ditimbulkan, reaksi pemerintah dan pemimpin kala itu, termasuk reaksi negara-negara lain. Secara umum, media membuka wacana baru terhadap isu keamanan, khususnya ketahanan nasional Amerika.

Selama sepuluh hari pasca 9/11, the New York Times memiliki pola pemberitaan yang lebih tematik bergeser dari pola episodik yang kerap disajikan the New York Times dalam pemberitaannya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Brigitte L. Nacos dan Oscar Torres-Reyna yang melihat pergeseran dari pola “..... meningkat secara tematik dan menurun secara episodik dalam melakukan *framing* terhadap berita dalam kurun waktu berbulan-bulan pasca 11 September.”⁹ Mereka mengkategorikan pergeseran pola ini sebagai perubahan yang positif.

Untuk melihat pola tematik dalam pemberitaan the New York Times pasca 9/11, perhatikan tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Tema Editorial dan *Headline* the New York Times dari 12 September 2001 – 21 September 2001

Tanggal	Editorial	Headline
12 September 2001	respon yang harus dilakukan AS terhadap peristiwa 9/11	kronologis peristiwa 9/11
13 September 2001	pemimpin menjadi harapan masyarakat AS	respon presiden AS
14 September	potret Afghanistan	pengumpulan data mengenai

⁹ Brigitte L. Nacos dan Oscar Torres-Reyna, “Framing Muslims American Before and After 9/11”, dalam Pippa Norris et.al. *Framing Terrorism: the News Media, the Government and the Public* (London and New York: Routledge, 2003), 133-158.

2001		pelaku
15 September 2001	negara pendukung terorisme termasuk musuh	proses meraih dukungan publik
16 September 2001	komparasi 9/11 dan Pearl Harbor	operasi militer sebagai bentuk respon
17 September 2001	respon terhadap serangan bercermin dari sejarah presiden terdahulu	dampak tragedi terhadap ekonomi US
18 September 2001	kondisi prosedur penerbangan AS pasca 9/11	ekonomi AS masih kuat di hari pertama dibukanya kembali pasar
19 September 2001	pidato retorik Bush dan perubahan isu keamanan di Timur Tengah	kebijakan counter-terrorism bersebrangan dengan kebebasan sipil
20 September 2001	ketidakseimbangan perlawanan di Afghanistan	pendekatan terhadap negara- negara sekutu AS
21 September 2001	review pidato Bush dan makna perang secara metafora dan harafiah	review thdp pidato Bush dan kebijakan GWOT

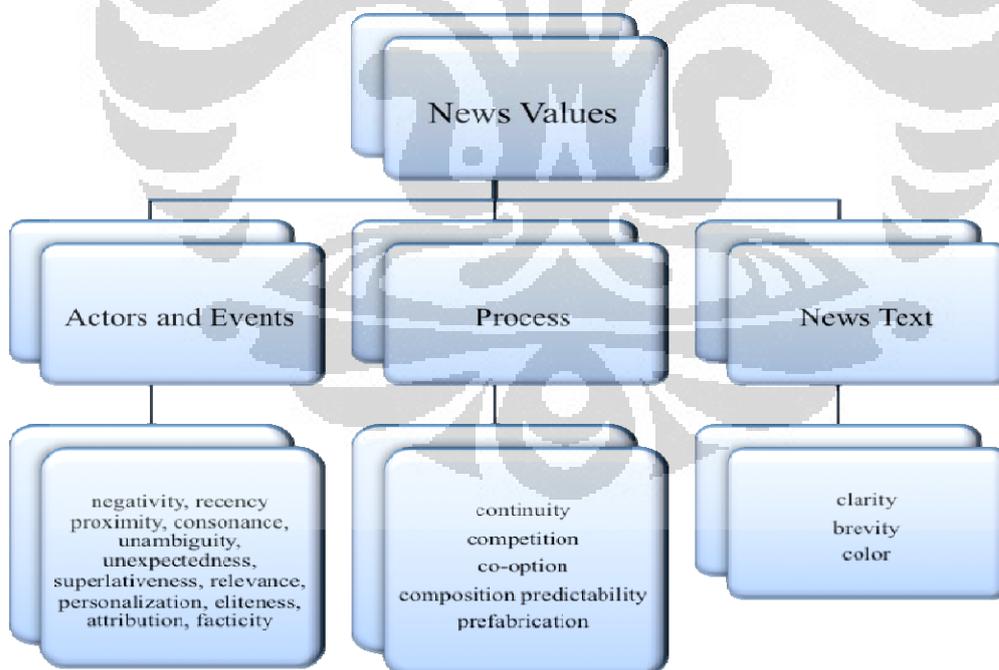
Tabel 2.1 di atas menggambarkan tema umum yang diangkat oleh the New York Times selama sepuluh hari pasca 9/11. Terlihat bahwa pemilihan tema didasarkan pada peristiwa yang terjadi sehari sebelumnya. Dikarenakan koran tidak dapat melakukan peliputan langsung seperti televisi, maka isu yang diangkat pada tanggal terbit merupakan gambaran peristiwa yang terjadi sehari sebelumnya. Namun kondisi tersebut tidak sepenuhnya berkorelasi, karena dalam sepuluh hari pemberitaan di atas, terdapat juga lompatan-lompatan tema sehingga tidak lagi bersifat episodik.

Lebih lanjut dalam menganalisis tema editorial dan *headline* the New York Times di atas, penulis melakukan pendekatan tekstual terlebih dahulu sehingga

menemukan keterkaitan tematik antara editorial dengan editorial, *headline* dengan *headline*, atau editorial dengan *headline*. Keterkaitan tematik ditinjau untuk melihat pemberitaan yang dilakukan the New York Times dari segi nilai berita. Nantinya melalui pola-pola ini akan dilihat titik temu bagaimana sebuah media meramu tema berita setiap harinya sehingga secara bertahap membangun persepsi di tengah masyarakat lalu “mengajarkan” apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Implikasinya, nilai pemberitaan baik secara langsung maupun tidak langsung mendemonstrasikan dukungan kepada pemerintah untuk mengambil langkah dan membuat kebijakan.

Untuk melihat nilai berita dalam editorial dan *headline* the New York Times, penulis menggunakan klasifikasi nilai berita menurut Monika Bednarek seperti yang terpapar dalam diagram berikut:

Diagram 2.1 Nilai Berita



Sumber: Monika Bednarek, *Evaluation in Media Discourse: Analysis of a Newspaper Corpus* (London and New York: Continuum, 2006) “telah diolah kembali oleh penulis”

Seperti yang tergambar dalam diagram 2.1 di atas, Monika Bednarek mengklasifikasikan nilai berita menjadi tiga: nilai berita yang dilihat dari aktor dan peristiwa, nilai berita dalam proses pemberitaan, dan nilai berita yang dilihat dari teks.¹⁰ Masing-masing nilai berita memiliki komponen-komponen yang secara eksplisit maupun implisit dapat dianalisis dari teks sebuah berita. Komponen-komponen itu akan lebih lanjut dijelaskan pada analisis tekstual terhadap editorial dan *headline* the New York Times berikut ini.

2.1.1 Editorial dengan Editorial

Sepuluh hari pasca 9/11, editorial dalam the New York Times mengangkat tema-tema yang erat kaitannya dengan repon pemerintah. Nilai berita yang diusung dalam editorial dari hari ke hari hingga dikeluarkannya Global War on Terror sangat performatif sehingga berpotensi membuat masyarakat melakukan aksi. Menurut Lilie Chouliaraki, penyampaian teks yang performatif bertujuan tidak hanya secara sederhana memberikan informasi kepada audiens yang menjadikan mereka terlibat secara sosial, namun juga memiliki kekuatan baik secara institusional maupun simbolik dalam mengkonstitusi audiens sebagai bagian dari aksi dalam proses narasi dan visualisasi peristiwa. Dalam konteks ini, teks media merupakan pengkondisian kemungkinan-kemungkinan untuk aksi sosial.¹¹

Selain itu, nilai berita yang paling dominan muncul adalah *negativity*, di mana kecenderungan ini terlihat dari diksi yang dilakukan oleh editorial the New York Times. Contohnya editorial di hari pertama pasca 9/11. Secara tematik membicarakan bagaimana reaksi yang seharusnya dilakukan Amerika terkait serangan WTC

¹⁰ Monika Bednarek, *Evaluation in Media Discourse: Analysis of a Newspaper Corpus* (London and New York: Continuum, 2006), 16-18.

¹¹ Lilie Chouliaraki, “Mediation, Text and Action”, dalam Vijay K. Bhatia et.al., *Advances Discourse Analysis*. (Eds.; London and New York: Routledge, 2008), 211-227.

kemarin. Editorial menekankan pada reaksi yang harus dilakukan Amerika terhadap ancaman. Serangan dipandang sebagai ancaman karena berdampak pada isu keamanan dan ketahanan nasional. Di sinilah kerja intelijen dan operasi keamanan harus ditingkatkan, bahkan kewaspadaan perlu ditingkatkan oleh negara sekutu Amerika. Namun editorial ini merasa penting untuk tetap mengedepankan nilai-nilai kebebasan dan hak sipil. Terlebih tindakan ini diduga dilakukan oleh Osama bin Laden, maka besar kemungkinan terjadinya *xenophobia*¹² terhadap warga Muslim Amerika.

Editorial lebih bersifat masukan baik kepada pemerintah maupun masyarakat secara umum bagaimana menyikapi serangan terhadap 9/11. Perlu pemikiran dan perencanaan yang matang dalam menangani terorisme sehingga tidak menimbulkan kebencian terhadap pihak yang tidak bersalah. Editorial ini memandang lebih luas makna ancaman yang mendera AS. Dilihat bahwa *collateral damage* atau kehancuran yang bersifat kolateral yang dihasilkan bersifat global. Dunia perlu waspada.

Secara umum, isu yang diusung cukup netral yakni bagaimana seharusnya Amerika merespon serangan. Kendati demikian, penyampaian editorial dibumbui sedemikian rupa dengan pemilihan kata yang cenderung berkonotasi negatif.

Dikarenakan editorial merupakan formulasi pemikiran editor atau penerbit, maka kecenderungan untuk menyampaikan pendapat terlihat lebih bebas. Lompatan-lompatan tema antara editorial di hari satu ke hari berikutnya cukup terlihat. Editorial the New York Times pada sepuluh hari pertama pasca 9/11 tidak terlalu mementingkan episode demi episode. Namun secara tematik mengedepankan hal yang dipandang krusial untuk dikritisi.

Pada dasarnya, editorial memegang kendali penting sebagai wadah bagi sebuah koran untuk melakukan kontrol dan kritik. Kondisi ini cukup terlihat pada editorial the New York Times pada timeline yang penulis tentukan. Akan tetapi kecenderungan kritik lebih kepada pihak yang diduga melakukan serangan WTC dan

¹² Menurut Oxford English Dictionary, *xenophobia* didefinisikan sebagai ketakutan atau kebencian tak beralasan terhadap orang asing atau sesuatu yang dipandang asing atau dari luar. *Xenophobia* berasal dari bahasa latin, yaitu kata “*xenos*” yang berarti orang asing dan “*phobos*” yang berarti takut.

Pentagon pada 11 September 2001. Kontrol sosial media terhadap pemerintah dalam hal ini tidak terlalu menonjol.

Lihat saja editorial yang muncul pada tanggal 13 September 2001 dan 14 September 2001. Di hari ke dua pasca 9/11, editorial dengan judul “*Demands for Leadership*” mengangkat harapan masyarakat terhadap sosok pemimpin untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan keamanan di Amerika. Editorial mengutarakan bahwa sosok presiden menjadi tumpuan dalam melakukan proses pengambilan keputusan yang tepat dan terarah. Tidak banyak kritikan yang dibuat terhadap Bush, juga tidak ada pujian berarti. Dalam editorial ini hanya memaparkan bagaimana seharusnya suatu tampuk kepemimpinan menyikapi sebuah peristiwa besar yang meninggalkan duka sekaligus ketakutan berarti bagi masyarakat, tidak hanya di Amerika tetapi di seluruh penjuru dunia.

Nilai berita yang diusung dalam editorial ini adalah *facticity* yang didefinisikan sebagai “.....tingkatan di mana sebuah narasi berita berisi tentang fakta dan gambar-gambar pendukung yang menunjukkan tujuannya sebagai ‘hard news’”.¹³

Sedangkan di tanggal 14 September 2001, *facticity* juga mendapat tempat untuk lebih dielaborasi dalam editorial. Dengan mengangkat judul “*Rendezvous with Afghanistan*”, editorial ini menitikberatkan pada penggambaran Afghanistan. Tentu saja penggambaran ini dipandang dari kacamata Barat. Nilai berita yang ingin diangkat adalah *facticity* yakni fakta-fakta dan data mengenai *suspect* Osama bin Laden yang menjadikan Afghanistan sebagai tempat untuk mengembangkan jaringannya.

Bedanya, bila pada editorial di hari ke dua, harapan terhadap sosok pemimpin untuk segera mencari jalan keluar permasalahan terorisme disampaikan dalam bentuk masukan kepada pemerintah, khususnya presiden, sebaliknya pada editorial di hari ketiga terdapat sebetulnya kritikan dalam menggambarkan Afghanistan. Upaya editorial dalam membentuk persepsi publik terhadap Afghanistan terlihat dari bagaimana kata editorial mendeskripsikan Afghanistan sebagai “*battleground*”, “*lawlessness*”, “*dictator*”, dan sebagainya.

¹³ Monika Bednarek, *Op. Cit.*16.

Yang menarik adalah editorial tanggal 16 September 2001 yang berjudul “*Fighting on Elusive Enemy*”. Penulis berpendapat bahwa editorial ini mempunyai nilai berita yang sangat berwarna (*colorful*), *color* mengindikasikan bahwa pemberitaan haruslah menitikberatkan pada aspek emosi yang relevan.”¹⁴

Editorial di hari kelima pasca 9/11 ini diawali oleh analisis komparatif dengan peristiwa Pearl Harbor. Secara historis, kedahsyatan dan dampak kedua peristiwa cukup meninggalkan trauma mendalam bagi pemerintah dan publik Amerika. Penggunaan kata sangat kaya dengan *tone* negatif maupun pemilihan kata dengan *tone* positif. Kendati, kata-kata dengan *tone* positif turut diangkat, kecenderungannya lebih menggunakan perumpamaan yang dihiperbola. Secara implisit masih mengacu ke hal yang negatif. Dalam *discourse analysis*, dikenal dengan istilah *negativity*. Menurut Fowler, “*negativity* dapat dilihat sebagai nilai dasar dari sebuah berita. Hal ini dimaksudkan bahwa keadaan yang negatif – kehancuran, kematian, bencana, kecelakaan, konflik, perang, dan sebagainya – menjadikan peristiwa tersebut sebagai berita. Sulit untuk menjelaskan mengapa kondisi negatif menjadi signifikan: tidak ada alasan yang alami mengapa kejadian buruk menjadi lebih menarik sebagai sebuah berita dibanding peristiwa biasa.”¹⁵

Sedangkan pemilihan kata dengan nada positif cenderung memakai pendekatan *superlativeness*. Fowler juga menyebutkan bahwa “*superlativeness* merupakan upaya untuk membesar-besarkan, membuatnya lebih cepat, lebih destruktif, lebih keras, dengan faktor X yang lebih baik. Pemberitaan umumnya sangat memperhatikan *superlatives*.”¹⁶

Untuk melihat bagaimana editorial di hari ini melakukan *word portrayal* atau pemilihan kata, perhatikan tabel 2.2 berikut:

¹⁴ *Ibid.*17.

¹⁵ *Ibid.*18. Lebih lanjut lihat Roger G. Fowler, *Language in the News: Discourse and Ideology in the Press* (London: Routledge, 1991).

¹⁶ *Ibid.*19.

Tabel 2.2 Pilihan Kata dalam Editorial the New York Times 16 September 2001

Pilihan Kata		
Negatif	Netral	Positif
carnage	civil	spectacularly
torrents	society	newness
fear	spectacle	liberties
outrage	adversaries	values
threat	reconfigure	commitments
destroy	security	attributes
demoralize		superficial
seize		pledges
chaos		solidarity
corrupt		mercy
restrictions		aspirations
distressing		diplomatic
elusive		neutralization
foe		ingenuity
diminish		miracle
infamy		martial
vengeance		affluence
attack		victory
tactic		ultimate
mystery		compromise
war		freedom
aggression		openness
doomed		delicate
ambitions		democracy
eerie		confidence
refusal		defenses

rivalry		passion
provocations		preserving
mustering		distinctive
catastrophic		incantations
isolationism		
vicious		
atrocities		
perpetrated		
capitulate		
anguish		
battle		
collateral		
damage		
portend		
assaults		
retaliate		
crimes		
peril		

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa secara dominan kata-kata dengan konotasi negatif mewarnai narasi editorial. Kata-kata yang tergolong netral hanya sedikit, justru kata dengan konotasi positif hampir menyamai kata dengan konotasi negatif. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kendati kata dengan konotasi positif cukup banyak digunakan, namun dalam konteks kalimat yang digunakan, makna leksikal yang diangkat lebih bersifat paradoks dan hiperbola dalam artian melebih-lebihkan namun cenderung untuk menampilkan kondisi yang ironis. Jadi, pada dasarnya, editorial secara dominan menyampaikan *tone* negatif kepada publik mengenai siapa musuh, apa yang harus dilakukan terhadap musuh.

Sehari setelahnya, editorial the New York Times mengangkat tema bagaimana presiden-presiden Amerika terdahulu menyelesaikan permasalahan keamanan. Narasi

dilakukan seperti kajian historis, hanya saja lebih bersifat deskriptif. Cara ini mengesankan adanya upaya untuk menjadikan contoh bagaimana pemimpin Amerika menunjukkan kekuatannya di mata dunia. Bisa dikatakan juga sebagai *lesson learned* atau pelajaran yang dipetik yang dijadikan aspirasi bagi masyarakat dalam memupuk rasa nasionalisme.

Di dalam editorial ini, ingin ditunjukkan bahwa karakter musuh yang dihadapi Bush sekarang ini jauh berbeda. Selain tidak dapat dilawan secara konvensional, pelaku bersifat klandestin dan *faceless* atau tidak tampak. Ini yang menjadikan Bush semakin sulit untuk segera merumuskan kebijakan kontra-terorisme. Perlu pemikiran yang matang dalam mengeluarkan kebijakan di era kebebasan sipil seperti sekarang ini.

Nilai berita yang ingin diusung dalam editorial ini yaitu *eliteness*. “*Eliteness* mengacu pada status aktor di dalam berita. Acuan pada kalangan elit seperti politikus, bintang film, atau orang-orang ternama termasuk negara-negara besar dinilai lebih menjual sebagai berita daripada menggunakan acuan aktor dari kalangan masyarakat biasa.”¹⁷

Dari penggambaran ini, publik ditatar untuk dapat “bersabar” atau “memaklumi” bila Bush hingga saat itu belum merumuskan kebijakan mengingat sulitnya “medan perang” yang akan dihadapi. Secara implisit, editorial ini mulai mencuri start untuk menggalang dukungan publik terhadap respon pemerintah dengan membuka kembali memori dengan presiden Amerika terdahulu, yang berpotensi menumbuhkan rasa nasionalisme secara simultan.

Lompatan tematik terlihat pada editorial tanggal 18 September 2001. Editorial kali ini mengangkat isu yang kurang *in-line* dari isu-isu yang diangkat sebelumnya. Bila penekanan di editorial terdahulu adalah pada respon dan bagaimana persepsi masyarakat dibawa untuk menyikapi serangan 9/11, namun pada editorial kali ini menggambarkan kondisi prosedur penerbangan di Amerika yang semakin diperketat mengingat pembajakan yang dilakukan dimulai dari bandara.

¹⁷ *Ibid.*19.

Editorial tanggal 19 September 2001 dengan judul “*Wartime Rhetoric*”, dan editorial tanggal 20 September 2001 dengan judul “*Editorial Observer: an Imbalance of Power: Afghanistan’s Deceptive Strengths*” mulai mengarahkan pembaca untuk “bersiap-siap” menyambut hadirnya kebijakan perang terhadap terorisme. Kedua editorial ini menerapkan pola berita dengan nilai pemberitaan *predictability*. “*Predictability* penting bagi proses pemberitaan untuk melihat sejauh mana peristiwa yang belum terjadi seolah dapat diliput lebih dahulu dari yang sudah direncanakan.”¹⁸ Informasi yang dikumpulkan penulis editorial mengenai reaksi dan respon dari pemerintah, mampu menjadikannya memformulasikan sebuah ide tentang suatu kondisi bilamana perang terhadap Afghanistan dilakukan. Dan memang pada tanggal 20 September 2001, doktrin Bush secara resmi dikeluarkan.

Spekulasi yang muncul adalah bahwa the New York Times cukup mampu membaca gejala yang terjadi di masyarakat termasuk perilaku pemerintah dalam merespon serangan 9/11. Terbukti isu-isu yang diangkat dari hari pertama pasca 9/11 tidak langsung menyentuh isu kebijakan. Tepat sehari sebelum dikeluarkannya kebijakan Global War on Terror, editorial the New York Times sudah lebih dulu menyinggung perihal kebijakan. Persepsi yang ingin dibangun adalah suatu kondisi kesiapan masyarakat bilamana kebijakan perang terhadap terorisme disahkan.

Keberlanjutan pembahasan mengenai kebijakan ini sangat terlihat di kedua hari itu. Tanggal 19 September 2001 menekankan pada diskursus perang sebagai retorika pemerintah yang sedikit mengkritisi lambannya Bush dalam menentukan langkah. Ini menjadi tanda tanya sekaligus pembenaran, bahwa kritisi yang dilontarkan dalam editorial tidak secara gamblang dimaknai sebagai sebuah kritikan. Justru kritikan ini sebagai pendorong agar Bush segera mengeluarkan kebijakan. Bila kondisi ini dimaknai masyarakat, tentunya pemerintah akan melihat polemik yang berkembang di masyarakat adalah ketidaksabaran sekaligus desakan untuk segera mengeluarkan kebijakan. Pola mengkritisi ini pun sebenarnya sebagai bentuk evaluasi sekaligus wacana retorik yang dibangun the New York Times selaku koran mainstream dengan pasar pembaca masyarakat berpendidikan. Dorongan-dorongan

¹⁸ *Ibid.* 20.

seperti ini menunjukkan bahwa media selaku aktor non-negara memiliki peran penting dalam mempengaruhi aktor-aktor lain dalam lingkup negara.

Penulis kemudian memutuskan untuk mengambil dua editorial di hari kesepuluh. Keputusan ini atas pertimbangan bahwa kedua editorial membahas tema yang hampir sama namun dengan sudut pandang berbeda. Editorial pertama meninjau pidato Bush saat mengeluarkan kebijakan Global War on Terror sehari sebelumnya, sedangkan editorial kedua menekankan pada wacana perang berdasarkan keputusan pemerintah lewat pidato Bush tersebut.

Pada editorial pertama, the New York Times melakukan evaluasi terhadap pidato Bush. Dalam hal ini Bush dinilai melakukan pidato yang paling kritis yang pernah dilakukannya. Karena berfokus pada sosok Bush dan pernyataannya, nilai berita yang diusung editorial ini adalah *eliteness* seperti halnya editorial pada 17 September 2001 yang melakukan komparasi terhadap “*success stories*” atau cerita di balik kesuksesan presiden-presiden Amerika terdahulu beserta kebijakan-kebijakan yang pernah mereka keluarkan di masa pemerintahannya.

Editorial kedua di tanggal 21 September 2001 bisa dikatakan sebagai kritik terhadap kebijakan Amerika mengenai perang. Editorial dengan judul “*First, Define the Battlefield*” meminta untuk terlebih dahulu mendefinisikan medan perang. Melihat aktor yang terlibat dalam peristiwa ini adalah Amerika sebagai negara dan Osama bin Laden sebagai aktor non-negara, sehingga sulit untuk mendefinisikannya sebagai perang. Karena secara konvensional, terminologi perang menggambarkan suatu kondisi bilamana antara negara satu dengan negara lain berkomitmen untuk melakukan peperangan.

Oleh karena itulah, editorial ini menekankan pada hal yang bersifat metafora, karena tidak dapat dijelaskan secara *real*. Bila mengacu pada media discourse, maka dari sisi nilai pemberitaan, editorial ini ingin mengusung *relevance*. “*Relevance* mengacu pada seberapa penting sebuah berita untuk diketahui oleh audiens.”¹⁹

The New York Times memandang penting untuk mengevaluasi hal ini karena sehari pasca dikeluarkan kebijakan perang Bush, masyarakat perlu dibimbing

¹⁹ *Ibid.* 22.

mengenai wacana Global War on Terror tersebut. Bila tidak diarahkan dengan cara seperti ini, maka akan timbul beragam spekulasi dan interpretasi.

Dari ulasan analisis tekstual yang dilakukan terhadap editorial the New York Times selama sepuluh hari pasca 9/11 dari tanggal 12 September 2001 sampai 21 September 2001, maka dapat dikatakan karakteristik pemberitaan yang dilakukan the New York Times bergeser dari pola episodik menjadi tematik. Pola ini sengaja dipilih oleh koran tersebut untuk lebih komprehensif membahas isu mengenai terorisme.

Menurut Bolivar, karakter editorial pada level lexico-grammar dapat dilihat melalui penggunaan kata ganti orang dan kata ganti yang mengacu pada penulis editorial, penggunaan modalitas sebagai bentuk ekspresi editor terhadap peristiwa, adanya penilaian, variasi verbal, penggunaan penghubung temporal, dan pertanyaan retorik sebagai bentuk penilaian terhadap informasi yang telah disampaikan.²⁰ Bila meletakkan karakter-karakter versi Bolivar pada editorial the New York Times, maka terlihat bahwa the New York Times menjadikan editorialnya sebagai perantara untuk menyampaikan ekspresi dan opini editor sekaligus melakukan evaluasi terhadap informasi yang disampaikan.

Nilai berita yang diangkatpun ditentukan sedemikian rupa yang secara dominan menempatkan pendekatan *eliteness* dalam merujuk pada pemerintah dan aktor-aktor pembuat keputusan sebagai sentra pembahasan. The New York Times secara tidak langsung mengajak pembaca untuk “melupakan” peristiwa dan mengalihkan perhatian kepada sosok pemimpin, pemerintah, termasuk pihak musuh agar peristiwa yang mengancam keamanan Amerika tersebut segera mendapat reaksi nyata.

Dengan mengangkat nilai berita *predictability* dan *facticity*, The New York Times, dalam editorialnya, berusaha mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan, melalui kritikan dan prediksi-prediksi yang dilakukan. Tidak hanya berhasil melakukan prediksi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan,

²⁰ A. Bolivar, “The Structure of Newspaper Editorials”, dalam M. Coulthard, *Advances in Written Text Analysis* (New York: Routledge, 1994), 276–294.

fakta-fakta yang diangkat pun mampu membenarkan kemungkinan-kemungkinan bila kebijakan tersebut diimplementasikan kepada musuh.

2.1.2 *Headline dengan Headline*

Secara kronologis, tema yang diangkat dalam *headline* the New York Times setiap harinya menggunakan klasifikasi nilai proses pemberitaan *continuity* dan *co-option*. *Continuity* dimaknai sebagai berita yang disampaikan berkelanjutan, dengan kata lain, berita satu melahirkan berita lainnya.²¹

Merujuk kembali ke tabel 2.1, pada lima hari pertama pasca 9/11, antara *headline* yang satu dengan *headline* di hari berikutnya secara berkelanjutan membicarakan peristiwa dan respon. Hari ke enam dan ke tujuh terdapat lompatan tema yakni mengangkat ekonomi Amerika. Meski secara umum terdapat korelasi dengan peristiwa 9/11, namun isu *national defense* dan ketahanan negara dilanjutkan di hari ke delapan pasca 9/11. Hal ini dalam proses pemberitaan menurut Bednarek diistilahkan dengan *co-option*. *Co-option* dimaknai sebagai “.....sesuatu yang tidak terlalu bernilai untuk menjadi berita dapat ditampilkan pula bersamaan dengan berita-berita penting lainnya karena memiliki keterkaitan sehingga menjadi bernilai berita.”²²

Ada beberapa fakta menarik dalam rangkaian *headline* the New York Times ini yang dapat ditinjau melalui klasifikasi nilai berita Bednarek. Seperti pada *headline* tanggal 14 September 2001, mendeskripsikan kronologis pembajakan pesawat yang ditabrakkan ke WTC. Detail keluarga korban dan komentar mereka mengenai peristiwa dijabarkan dalam teks. Pola ini menggunakan pendekatan *proximity* dan *personalization* dalam klasifikasi nilai berita dari aktor dan peristiwa. Adapun yang dimaksud dengan *proximity* adalah “kedekatan geografis terhadap peristiwa. Orang akan tertarik bila suatu kejadian dekat dengan mereka, di kota, wilayah, atau negara tempat mereka berada.”²³ Dengan membuatnya dekat kepada pembaca, maka

²¹ Monika Bednarek, *Op. Cit.* 16-18.

²² *Ibid.*17.

²³ *Ibid.*19.

pembaca seolah merasakan langsung peristiwa dibalik pembajakan pesawat yang hanya dirasakan oleh penumpang dan pelaku.

Selain itu, pemberitaan juga menggunakan pendekatan *personalization*. “*Personalization* mengindikasikan bahwa pemberitaan diolah sedemikian rupa sehingga menarik audiens dengan melakukan personalisasi atau seolah melibatkan audiens dibandingkan hanya melakukan penggambaran semata secara umum.” Aspek ini, menurut Fowler, lebih mengena dalam pers populer yang berfungsi mengangkat perasaan, empati, ataupun penolakan secara langsung.²⁴

Pola *proximity* dan *personalization* juga digunakan secara dominan di hari pertama pasca 9/11 yaitu pada *headline* tanggal 12 September 2001. Konten berita dituturkan sangat novel dengan detail waktu kejadian, reaksi publik yang menyaksikan, kondisi runtuhnya WTC, hingga menyentuh pendapat pemimpin Taliban yang menyangkal bahwa Osama sebagai pelaku. Secara tidak langsung memperlihatkan bagaimana kedahsyatan peristiwa disaksikan mata masyarakat dunia secara bersamaan. Nilai teks yang ingin disajikan adalah nyata, akurat dan, jelas. Penyampaian pun menggunakan metode *intertextuality* yang menggunakan kutasi sehingga menunjukkan apa dan bagaimana sebuah pernyataan dituturkan.

Metode *intertextuality* dalam melakukan pemberitaan secara dominan terlihat dalam *headline* tanggal 15 September 2001. Artikel yang ditulis Robert McFadden ini banyak mengutip ujaran Bush dalam pidatonya. Proses pemberitaan dengan melakukan *reporting speech* atau menyampaikan kembali ujaran yang dilakukan jurnalis untuk memberikan kesan *real* atau nyata kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah mendengarkan langsung. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Julia Kristeva di tahun 1986 untuk menjelaskan bagaimana cara teks menampilkan pernyataan yang merujuk pada aktor tertentu dan membangun teks dan diskursus lain.²⁵ Menurut Kristeva, *intertextuality* berpotensi menghasilkan “suara” lain, dalam

²⁴ *Ibid.* 22. Lebih lanjut lihat Roger G. Fowler, *Language in the News: Discourse and Ideology in the Press* (London: Routledge, 1991).

²⁵ Julia Kristeva, “The Kristeva Reader”, dalam Barbara Johnstone, *Discourse Analysis* (Oxford: Blackwell, 2002), 139-142.

hal ini suara jurnalis yang memberitakan, sehingga menyebabkan pergeseran perspektif.²⁶

Contohnya, setelah tanda kutip dalam pernyataan Bush dituliskan bagaimana cara Bush dan penduduk merespon yang dilaporkan dari pantauan jurnalis. Perhatikan potongan *headline* tulisan McFadden berikut:

“We can’t hear you!” someone yelled. “I can hear you,” the president bellowed back. “The rest of the world hears you, and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon.” “U.S.A.! U.S.A.! U.S.A.!” they chanted.

“Someone yelled”, “the president bellowed back”, dan “they chanted” bersifat deskriptif termasuk penggunaan tanda seru (!) untuk menegaskan sebuah tuturan. Ketika hal itu dilaporkan dalam teks, pembaca bermain dengan imajinasi untuk membayangkan cara yang digambarkan. Hal ini berpotensi menggeser perspektif yang dilakukan jurnalis terhadap bagaimana cara ujaran disampaikan.

Lompatan tematik terjadi di *headline* tanggal 17 dan 18 September 2001. Selama dua hari ini, the New York Times mengangkat isu lesunya perekonomian Amerika pasca serangan. Kendati ingin menyampaikan kondisi ekonomi yang tidak baik, terminologi positif yang menggambarkan pengharapan untuk segera mengakhiri kelesuan ekonomi banyak digunakan. The New York Times berusaha mengangkat wacana bahwa kelesuan ekonomi seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk membuktikan patriotisme masyarakat khususnya pengusaha dan investor terhadap bagaimana memperjuangkan kondisi krisis di tengah tragedi. Lompatan pemberitaan yang dilakukan ini, selain mengaplikasikan proses *co-option*, juga mengedepankan nilai peristiwa *facticity*.

Tema yang dipilih pada *headline* di hari ke delapan tanggal 19 September 2001 diarahkan kembali kepada kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah Amerika dalam merespon serangan 9/11. Menariknya dalam pemberitaan ini, media mulai

²⁶ *Ibid.*

menunjukkan fungsinya sebagai kontrol dalam pengeluaran kebijakan oleh pemerintah.

Upaya mengontrol kemungkinan kebijakan yang diambil Bush terlihat dari kritik yang diangkat dalam *headline* kali ini. Kritik menyangkut perihal kebebasan sipil yang tetap harus dijunjung kendati operasi militer dijalankan.

Melihat masih belum adanya kebijakan secara resmi dikeluarkan pemerintah Amerika di hari pemberitaan itu, sebagai media, the New York Times merasa *urgent* untuk membuka wacana mengenai kebijakan pemerintah. Proses pemberitaan semacam ini diistilahkan dengan *predictability*.

Prediksi dalam pemberitaan merupakan sesuatu yang umum dilakukan jurnalis. Khususnya dalam konteks 9/11, respon terhadap tindakan teroris telah diberitakan media pasca tragedi. Hal ini menjadi benang merah bagi media untuk memformulasi sebuah pandangan. Terlebih hingga artikel *headline* itu ditulis, belum ada kebijakan dalam melawan terorisme secara official dikeluarkan pemerintah Amerika.

Selama delapan hari pemberitaan, terminologi “war” memang sering digunakan, namun lebih kepada “acts of war”, “war against terrorism” atau “we are at war”. Terminologi Global War on Terrorism baru mulai muncul di pemberitaan tanggal 20 September 2001. Secara simultan, di hari itu, Bush Administration mengeluarkan kebijakan Global War on Terror. Ini menunjukkan bagaimana proses *predictability* yang dilakukan the New York Times terjawab dalam pemberitaan, di mana berita mengenai Global War on Terrorism tentunya telah ditulis sehari sebelum tanggal 20 September 2001.

Dalam pemberitaan di hari itu pula, Megawati Soekarnoputri, presiden Indonesia saat itu, disebut sangat lemah dalam mengatur kelompok Islam radikal dan separatis di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Wacana ini tentu akan berdampak pada dunia, khususnya masyarakat Amerika bahwa di belahan dunia lain seperti Indonesia, tindakan-tindakan yang mengarah kepada aksi terorisme sudah mengakar. Bukti kelemahan pemimpin dalam mengatur kebijakan menjadi sandungan besar. Ini sekaligus menjadi contoh buruk bagi Amerika yang tidak layak

untuk ditiru. Sehingga, manakala kebijakan perang terhadap terorisme dikeluarkan, maka akan mudah memperoleh pembenaran atau justifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Bush memiliki kekuatan besar dalam melumpuhkan aksi terorisme yang menyerang negaranya, tidak seperti Megawati Soekarnoputri.

Pidato Bush di tanggal 20 September 2001 menjadi *headline* paling hangat keesokan harinya sekaligus puncak dari semua pertanyaan publik selama ini. Pemberitaan yang dilakukan the New York Times lebih bersifat naratif dan menyampaikan hampir setiap isi pidato Bush dalam bentuk kutipan. Bahkan transkrip pidato Bush secara utuh ditampilkan secara terpisah di luar artikel. Transkrip pidato tersebut ditaruh di kolom B4.

Kendati transkrip pidato ditampilkan secara gamblang, namun the New York Times tidak menyia-nyiakan hal itu untuk diinterpretasi dan selanjutnya dicerna secara bebas oleh masyarakat. Upaya penggiringan persepsi pun dilakukan dengan menggunakan pendekatan *intertextuality*. Seperti halnya pemberitaan tanggal 15 September 2001, *intertextuality* mendominasi hampir separuh dari isi artikel. Bentuk-bentuk *intertextuality* dalam artikel yang ditulis Elisabeth Bumiller sebagai berikut:

He said of the terrorist groups, "Americans are asking: Why do they hate us?" and he was blunt in providing an answer: "They hate what we see right here in this chamber, a democratically elected government. Their leaders are self-appointed. They hate our freedoms, our freedom of religion, our freedom of speech, our freedom to vote and assemble and disagree with each other."

Adanya arahan untuk menunjukkan bagaimana Bush menyampaikan pidatonya dan bagaimana ia dengan datar merespon jawaban. Selain itu di sela-sela kutipan, penulis artikel menyelipkan pandangan dan analisisnya terkait yang diujarkan dalam pidato. Misalnya:

The speech, which was interrupted 31 times by applause and cheering, was the president's most extensive address to Americans since four hijacked

jetliners on suicide missions crashed into the World Trade Center, the Pentagon and a quiet field in southwestern Pennsylvania, killing more than 6,000 people.

Jumlah tepukan dan seruan publik Amerika yang mendengar pidatonya sebanyak 31 kali ditulis dalam naskah berita di antara kutipan. Tidak ada yang dapat memastikan ataupun menyangkal apakah jumlah tepuk tangan sebanyak itu benar-benar tepat sebanyak 31 kali, atau hanya perkiraan yang dihitung dari durasi pidato. Namun hal ini dalam *intertextuality* sah-sah saja dilakukan dan memberi suara baru bagi pembaca sehingga makna tepukan dan seruan publik yang hadir kala itu sebagai bentuk dukungan yang terus menerus berdatangan.

Intertextuality yang dilakukan jurnalis juga mempertegas batas “*us versus them*”. Dalam kutipan Bush, jelas terlihat penggunaan kata “*we*”, “*our*”, “*they*”, “*them*”. Ini memberi dampak pada proses *self-identification* atau identifikasi diri oleh pembaca untuk memposisikan diri mereka di dalam konteks perbedaan tersebut.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa keterkaitan antara *headline* dengan *headline* tidak terlalu episodik, namun lebih tematik. Kendati dalam proses pemberitaan, the New York Times mengusung pendekatan *continuity* atau “*news breeds news*”, namun tak jarang *co-option* dilakukan dengan mengacu pada peristiwa mutakhir yang terjadi. Beberapa tema menjelang dikeluarkannya kebijakan Global War on Terror tanggal 20 September 2001 terlihat sudah mulai mengarah kepada respon pemerintah. Pendekatan *intertextuality* dalam melaporkan pernyataan aktor dalam artikel berpengaruh terhadap pendiktean kondisi seragam yang ingin dibangun the New York Times melalui sudut pandang jurnalis. Selain itu, *personalization* dan *proximity* untuk mendekatkan pembaca dengan kejadian melalui narasi yang dilakukan, juga kerap mendominasi cara jurnalis memaparkan berita. Secara keseluruhan, the New York Times berusaha untuk mengunci persepsi masyarakat melalui tema dalam teks yang disampaikan di *headline*.

2.1.3 Editorial dan *Headline*

Dengan melakukan analisis tekstual terhadap editorial dengan editorial dan *headline* dengan *headline* seperti di atas, selanjutnya penulis akan melihat keterkaitan tematik antara editorial dan *headline*. Tujuan penulis mengaitkan keduanya adalah untuk melihat sejauh apa sebuah media menjadikan setiap kolom dalam korannya menjadi “bersuara” atau mampu membangun sebuah persepsi yang terus menerus dipenetrasikan kepada publik. Kolom editorial saja tidak cukup tanpa melihat keterkaitannya dengan *headline*. Bila hal itu dapat terkuak, maka akan mudah untuk melihat bagaimana *headline* dirancang untuk menarik perhatian pembaca, lalu editorial sebagai pengunci persepsi yang terlebih dahulu telah dibangun dalam *headline*.

Analisis tekstual keterkaitan antara editorial dan *headline* digambarkan dalam diagram 2.2 berikut ini:

Diagram 2.2 Relasi Tematik Editorial dan *Headline* the New York Times dari 12 September 2001 – 21 September 2001



Penulis menemukan tiga poin penting dalam melihat keterkaitan tematik antara editorial dan *headline* the New York Times pasca 9/11 seperti yang digambarkan diagram 2.2 di atas. Ketiga poin itu antara lain terkait dengan isu:

a) *Response*

Pemberitaan yang mengangkat bagaimana respon terhadap serangan 9/11 merupakan isu yang cukup dominan yang diangkat editorial dan *headline* the New York Times. Editorial tanggal 12 September 2001 mengangkat bagaimana respon yang seharusnya dilakukan Amerika terhadap ancaman global yang menyerang ketahanan nasional. Keesokan harinya tanggal 13 September 2001, respon terhadap serangan 9/11 ditampilkan dalam *headline* the New York Times. Namun penekanan lebih kepada respon pemerintah, dalam hal ini presiden Bush. Isu respon terhadap serangan 9/11 diangkat kembali dalam *headline* the New York Times pada 16 September 2001. Kali ini respon yang diangkat menyoroti perlunya operasi militer dan ekstensifikasi kerja intelijen. Terakhir, isu respon terhadap serangan 9/11 dibahas pada editorial tanggal 17 September 2001 yang mengajak pembaca untuk bercermin dari sejarah bagaimana presiden-presiden Amerika terdahulu merespon serangan terhadap negaranya.

Korelasi berita-berita tersebut dapat dilihat dari tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Relasi Tematik Editorial dan *Headline* untuk Tema “*Response*”

Sept 2001	Kolom	Judul	Kutipan
12	Editorial	The War Against America; the National Defense	“... <i>defensive strategies are inadequate and that the fight against terror must move from the periphery to the center of American national security planning and operations</i> ”

			<p><i>“It must be the occasion for a fundamental reassessment of intelligence and defense activities. There must be an exacting examination of how the country can face this threat without sacrificing its liberties.”</i></p>
13	Headline	<p>After the Attacks: Stunned Rescuers Comb Attack Sites, but Thousands Are Presumed Dead; F.B.I. Tracking Hijackers’ Movements</p>	<p><i>“President Bush, who had placed American military forces on alert around the world, called the attacks “acts of war,” and vowed to hunt down and punish those responsible in a “monumental struggle of good versus evil.”</i></p>
16	Headline	<p>After the Attacks: the Trail; Bush Tells the Military to ‘Get Ready’; Broader Spy Powers Gaining Support</p>	<p><i>“the C.I.A. should beef up its human intelligence gathering ability, officials should not move rashly to lift the ban on assassinations.”</i></p> <p><i>“American security services might need to adopt some elements of the Israeli approach.”</i></p>
17	Editorial	<p>Bush Faces the Greatest Test</p>	<p><i>“...history shows us how much presidential leadership can affect the way Americans react to a foreign assault”</i></p> <p><i>“Franklin Roosevelt had to guide Americans through the stunning</i></p>

			<p><i>realization that the Atlantic and Pacific could no longer protect us from foreign dangers. John Kennedy had to steer us through the most perilous moments of the Cold War. September 11, 2001, has shown us how vulnerable we are to terrorism. George W. Bush will have to improvise a means to fight not national armies but a new, furtive and faceless enemy.”</i></p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keempat tulisan tersebut sama-sama memberitakan tentang respon terkait serangan 9/11. Dalam memberitakannya, the New York Times menampilkan bentuk respon yang variatif, yang dibedakan dari:

1) bagaimana respon seharusnya dilakukan

Pemberitaan dengan mengangkat tema “*response*” menjadi penting bagi the New York Times dalam membangun persepsi publik terhadap bagaimana respon seharusnya dilakukan. The New York Times juga berusaha memasukkan pandangan korannya seperti dalam kutipan “...*defensive strategies are inadequate*”, “*how the country can face this threat without sacrificing its liberties*”, “*might need to adopt some elements of the Israeli approach*”, “*will have to improvise a means to fight...*”. Pandangan yang diajarkan the New York Times seperti dalam kutipan di atas menunjukkan bahwa the New York Times berusaha untuk memformulasi respon apa yang tepat.

2) siapa saja aktor yang terlibat untuk melakukan respon tersebut

The New York Times juga menyebutkan beberapa aktor dalam pemberitaannya. Penyebutan aktor-aktor ini sebagai jawaban dari poin sebelumnya. Secara langsung kita dapat menganalisis bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam respon adalah aktor keamanan seperti “*intelligence, American military forces, the C.I.A., American security services*”. Dengan mengangkat aktor

keamanan untuk merespon kejadian 9/11, secara tidak langsung bentuk-bentuk respon yang disampaikan poin sebelumnya adalah respon-respon terkait keamanan pula. Pertanyaan yang muncul adalah secara umum kapan dan bilamana bentuk respon ini dilakukan? Dengan mudah kita akan menjawab, bila sebuah negara merasa terancam. Namun kita harus melihat besaran intensitas ancaman yang dirasakan hingga membuat sebuah negara melakukan respon terkait keamanan ditambah pemobilisasian aktor-aktor keamanannya.

3) kepada siapa respon ditujukan

Dengan menyebutkan “*fight against terror,....., a new, furtive and faceless enemy*”, the New York Times menunjukkan bahwa respon keamanan seperti pada poin pertama akan ditujukan kepada musuh, dalam hal ini pelaku terorisme, yang akan dilakukan oleh aktor-aktor keamanan.

Variasi pemberitaan yang mengindikasikan “*response*” menunjukkan bagaimana the New York Times sangat paham bahwa satu isu dapat dilihat dari sudut pandang yang beragam. Dari pola pemberitaan ini, terlihat tendensi the New York Times untuk memaknai terorisme pada serangan 9/11 sebagai perang. Informasi yang disampaikan membuat publik menyimpulkan bahwa respon terkait keamananlah yang tepat diberlakukan. Dalam konteks ini pula, aktor-aktor keamanan yang biasanya dimobilisasi dalam perang diusung dalam pemberitaan sehingga bila negara merespon terorisme sebagai perang, maka aktor-aktor inilah yang akan berada pada garda paling depan. Respon ini tentu tidak akan berjalan bila tidak ada musuh, yang turut mendapat tempat untuk diekspos dalam pemberitaan the New York Times. Pola pemberitaan ini mengimplikasikan adanya sebuah strategi yang harus dijalankan pemerintah. Apakah pemerintah harus mendeklarasikan perang atau melakukan penguatan dan penegakkan instrumen hukum yang termanifestasi dalam sebuah kebijakan keamanan. Tentunya, kebijakan keamanan ini tidak akan terjustifikasi bila tidak adanya dukungan dari masyarakat.

b) *Support*

Editorial dan *headline* the New York Times secara bersamaan pada tanggal 15 September 2001 mengangkat tema dukungan. Bedanya, dukungan yang diusung

dalam *headline* mengindikasikan dukungan masyarakat Amerika terhadap pemerintah untuk menindak pelaku terorisme. Sedangkan dukungan dalam editorial mengulas dukungan terhadap terorisme oleh negara yang diduga mensponsori atau membiarkan terjadinya aksi terorisme. Dalam editorial juga makna dukungan dibangun dari dukungan masyarakat internasional dan negara-negara sekutu Amerika.

Acuan makna berbeda dari “dukungan” yang diusung bertujuan untuk membuka mata publik bahwa di balik aksi terorisme yang besar tentu ada kekuatan besar yakni negara, dukungan negara yang mensponsori terorisme, termasuk keterlibatan negara-negara lain dalam upaya mencegah terorisme.

Untuk itu, penting bagi publik untuk tahu bahwa memberantas terorisme beserta negara yang mendukungnya perlu dukungan segenap masyarakat Amerika. *Response* pada poin pertama terdahulu tidak akan berjalan bila tidak ada yang menjustifikasinya. Masyarakat, dalam negara demokrasi, menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan. Maka dukungan masyarakat penting untuk melegitimasi kebijakan yang akan dikeluarkan.

Tabel 2.4 berikut menggambarkan pemberitaan the New York Times dalam mengusung tema “*support*”:

Tabel 2.4 Relasi Tematik Editorial dan *Headline* untuk Tema “*Support*”

Sept 2001	Kolom	Judul	Kutipan
15	Editorial	War Without Illusions	<p>“.....<i>united international support to deal with some of the nations that support terrorist activities</i>”</p> <p>“<i>Even if Gen. Pervez Musharraf, the country’s military dictator, agrees to support American military action, other army leaders</i>”</p>

			<i>and powerful Islamic fundamentalist groups are closely aligned with the Taliban.”</i>
15	Headline	After the Attacks: the President; Bush Leads Prayer, Visits Aid Crews; Congress Backs Use of Armed Force	<p><i>“U.S.A.! U.S.A.! U.S.A.!” they chanted.</i></p> <p><i>“The Senate also approved a \$40 billion package for counterterrorism activities.”</i></p> <p><i>“Embarking on a broad campaign to rally national support for an aggressive new policy toward terrorists.....”</i></p>

Secara langsung ataupun tidak, the New York Times menyampaikan hal ini kepada publik guna menggalang dukungan, khususnya dari masyarakat Amerika. Masyarakat yang meneriakkan *“U.S.A.! U.S.A.! U.S.A.!”* pada saat Bush berpidato, menjadi celah bagi the New York Times untuk meng-*capture* momen ini dalam narasinya. Upaya ini tentu akan berdampak bagi pembaca the New York Times yang memaknai teriakan yang menyebutkan nama negara sebagai bentuk dukungan patriotik.

Selain itu, the New York Times juga menyampaikan informasi bahwa Senat telah menyetujui dana sebesar 40 miliar dollar Amerika untuk aktivitas kontra-terorisme. Informasi ini berguna untuk menyampaikan bahwa pemerintah dan jajarannya telah sepakat untuk mengeluarkan anggaran keamanan dengan jumlah yang relatif besar. Tentunya hal ini menjadi indikasi akan adanya tanda-tanda sebuah kebijakan dikeluarkan, buktinya pemerintah tidak tanggung-tanggung mengalokasikan anggaran khusus untuk memmemberantas terorisme.

Gejala akan dikeluarkannya kebijakan pun terdeteksi dari pemberitaan the New York Times yang menyebutkan bahwa “.....*campaign to rally national support for an aggressive new policy toward terrorists*”. Secara eksplisit mata publik dibuka untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah yang nantinya akan mengeluarkan kebijakan. Peran the New York Times dalam hal ini terlihat seperti tangan pemerintah, karena kurangnya upaya untuk mengkritisi apakah kebijakan nantinya itu akan tetap dipaksakan bila publik menolak.

Pemberitaan the New York Times yang mengusung “*support*” ini menjadi semacam justifikasi bila perang dikumandangkan oleh Amerika. Dengan menggalang legitimasi publik melalui *headline*, lalu melalui editorial pembaca diperingatkan bahwa sejatinya kekuatan negaralah yang dapat memberantas terorisme dan pendukung-pendukungnya.

c) *Policy*

Kendati kebijakan Global War on Terror baru dikeluarkan tanggal 20 September 2001, the New York Times telah lebih dulu mengangkat isu krusial ini. Sejak tanggal 19 September 2001 sampai sehari setelah dikeluarkannya kebijakan Global War on Terror, baik editorial maupun *headline* sama-sama membahas isu kebijakan, seperti pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5 Relasi Tematik Editorial dan *Headline* untuk Tema “*Policy*”

Sept 2001	Kolom	Judul	Kutipan
19	Editorial	Wartime Rhetoric	<i>“President Bush, who is waging a different kind of war, must also find the right rhetoric to lead the United States and a coalition of diverse nations in this unconventional battle.”</i>

			<i>“What the country needs from the president right now is consistency, in both message and tone.”</i>
19	Headline	A Nation Challenged: Policy and Legislation; U.S. Widens Policy on Detaining Suspects; Troubled Airlines Get Federal Air Pledge	<i>“While the pressure on the administration and Congress to act is immense in the wake of the terrorist attacks, there is rising concern on the left and the right that the rush to respond could erode basic constitutional freedoms.”</i>
20	Editorial	Editorial Observer; An Imbalance of Power: Afghanistan's Deceptive Strengths	<i>“Afghanistan could prove to be a more difficult battlefield for the United States than it was for the Soviet Union”</i>
20	Headline	A Nation Challenged: the Overview; Bush Orders Heavy Bombers Near Afghans; Demands bin Laden Now, Not Negotiations	<i>“President Bush ordered heavy bombers and other aircraft to within easy striking distance of Afghanistan today and insisted that its ruling Taliban turn over Osama bin Laden and other suspected leaders of a terrorist organization believed to be behind last week's attacks in New York and Washington.”</i>
21	Editorial	Mr. Bush's Most Important Speech	<i>“President Bush summoned a shaken but determined nation last night to wage a global struggle against terrorism.”</i>

			<p><i>“...urging the American people to be both brave and patient, the president rallied Congress, the nation and its allies abroad to what promises to be a long and painful fight against a ruthless enemy.”</i></p>
21	Editorial	First, Define the Battlefield	<p><i>“...in this “war” on terrorism three other things take precedence: intensive police work across national borders, an ideological campaign to engage all the arguments and excuses for terrorism and reject them, and a serious and sustained diplomatic effort.”</i></p>
21	Headline	A Nation Challenged: the Overview; Bush Pledges Attack on Afghanistan Unless It Surrenders bin Laden Now; He Creates Cabinet Post for Security	<p><i>“We will direct every resource at our command, every means of diplomacy, every tool of intelligence, every instrument of law enforcement, every financial influence and every necessary weapon of war to the disruption and defeat of the global terror network.”</i></p> <p><i>“They hate our freedoms, our freedom of religion, our freedom of speech, our freedom to vote and</i></p>

			<p><i>assemble and disagree with each other."</i></p> <p><i>"Either you are with us, or you are with the terrorists."</i></p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada 19 September 2001, editorial the New York Times membahas retorika perang yang diusung Bush, sedangkan *headline* menyoroti permasalahan kebebasan konstitusional bila kebijakan melawan terorisme dikeluarkan. Keduanya sama-sama melihat kemungkinan sebuah kebijakan lahir dan implementasinya.

Di tanggal 20 September 2001, isu kebijakan masih menjadi poin menarik bagi the New York Times. Editorial di hari itu telah berani memprediksi ketidakseimbangan perang dengan Afghanistan bila kebijakan perang dilaksanakan. Sementara *headline* menyuarakan kepada dunia, khususnya negara sekutu Amerika untuk mendukung kebijakan perang Amerika dalam menyerang Afghanistan. Secara bersamaan, prediksi-prediksi itu terjawab ketika di hari itu Bush dalam pidatonya mengeluarkan kebijakan Global War on Terror.

Prediksi-prediksi bahwa akan dikeluarkannya kebijakan pada dua hari itu umumnya tidak secara eksplisit disampaikan. Pada editorial 19 September 2001 misalnya, terdapat penekanan dengan menyebutkan "*What the country needs from the president right now is consistency*", konsistensi yang dimaksud tentunya mengacu pada apa yang selama ini telah digembar-gemborkan Bush kepada publik. Sejak peristiwa 9/11, Bush telah menyampaikan kecamannya sekaligus menyampaikan niatnya untuk melawan terorisme. Maka publik berharap Bush agar terus konsisten untuk memberantas terorisme. Selain itu kutipan "*While the pressure on the administration and Congress to act is immense,*" mengindikasikan bahwa the New York Times ingin menunjukkan bahwa publik sudah mendesak pemerintah untuk segera bertindak, tentu saja tindakan yang dimaksud adalah mengeluarkan kebijakan.

Sehari setelah dikeluarkannya kebijakan Global War on Terror, the New York Times langsung memberitakannya kepada publik. Baik editorial maupun *headline* di

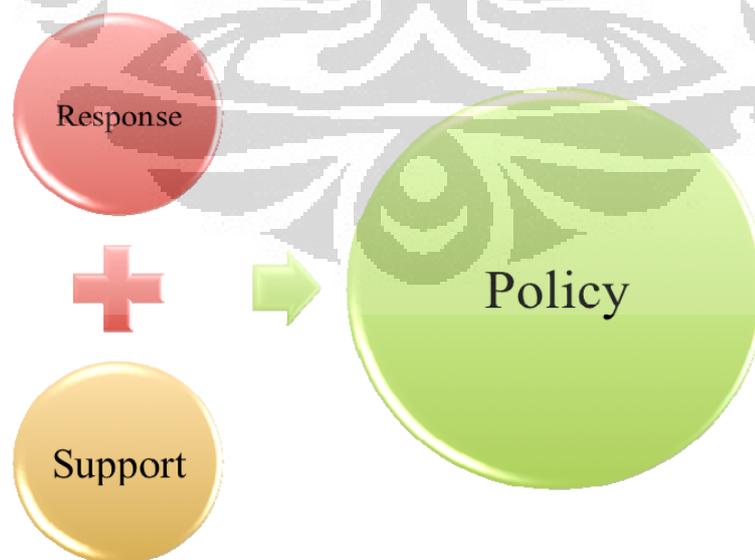
hari itu sama-sama membicarakan pidato Bush sehari sebelumnya. Bahkan transkrip pidato Bush turut dipublikasikan di satu kolom khusus. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan sekaligus mengomentari kebijakan yang diambil Bush dalam kaitannya dengan respon terhadap serangan 9/11.

Dengan demikian, terlihat bahwa isu kebijakan merupakan yang paling dominan diangkat oleh the New York Times selama tiga hari berturut-turut terhitung sejak sehari sebelum dikeluarkannya Global War on Terror sampai satu hari sesudahnya dari tanggal 19 September 2001 sampai 21 September 2001.

Response + Support = Policy

Dari uraian ketiga poin tersebut, penulis juga ingin menunjukkan suatu pola lain yang tergambarkan dalam diagram 2.2. Pola pemberitaan editorial dan *headline* the New York Times tersebut dapat digambarkan sebagai hubungan proses yang berinteraksi dari satu tema ke tema lain. Hal itu diilustrasikan seperti diagram 2.3 berikut.

Diagram 2.3 Relasi Proses Editorial dan Headline the New York Times dari 12 September 2001 – 21 September 2001



Relasi proses yang digambarkan diagram 2.3 di atas menunjukkan bahwa dalam membangun persepsi publik, the New York Times sangat menyadari pola yang paling mungkin dilalui selain melihat tren yang berkembang di masyarakat atau isu yang paling mutakhir. Dari relasi tematik yang digambarkan diagram 2.2, maka menghasilkan pola relasi baru yakni diagram 2.3 yang lebih menunjukkan hubungan tema satu menjadi dasar terbentuknya pengangkatan tema lainnya. Hal ini tidaklah sesederhana ataupun selinear “*news breeds news*” dalam nilai berita yang dikemukakan Bell. Relasi proses yang dimaksud adalah bagaimana sebuah isu dalam berita yang mengalami repetisi dengan sudut pandang berbeda, menghasilkan isu baru yang nantinya berimplikasi pada lingkup yang lebih besar.

Seperti yang dilakukan editorial dan headline the New York Times, tema respon terhadap serangan 9/11 diekspos langsung sehari pasca 9/11, lalu ketika respon yang “diajarkan” seharusnya seperti apa, publik akan bertanya: Siapa yang akan memimpin kita untuk merespon terorisme? Keberadaan Bush selaku tampuk kepemimpinan Amerika saat itu menjadi sentra perhatian masyarakat. Ketika Bush selaku presiden menunjukkan respon kerasnya terhadap terorisme, nasionalisme masyarakat Amerika mulai bangkit, dan kecenderungan dukungan mulai diperlihatkan. Pemimpin dan pemerintah selaku pembuat keputusan melihat kondisi yang berkembang di masyarakat. Dengan respon yang tepat dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, selaku pemimpin, menjadi sebuah ujian besar untuk dapat mengeluarkan kebijakan. Hasil akhir dari narasi itu, menarik sebuah garis yang mengarah pada kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Relasi proses ini tidak akan berhasil digambarkan bila media, dalam hal ini the New York Times, tidak memiliki pengaruh strategis selaku aktor non-negara dalam kaitannya dengan keputusan pemerintah untuk mengambil kebijakan.

Relasi *Response + Support = Policy* di atas juga dijelaskan dalam tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Response + Support = Policy

	Petikan	Response + Support	Response + Support = Policy
Response	HOW? "how the country can face this threat without sacrificing its liberties"	The country can face this threat by using its intelligence, military forces, and security services to fight against terror, a new, furtive, and faceless enemy. For that reason, the country should rally national support for an aggressive new policy toward terrorists. Look how the people support the government, "U.S.A.: U.S.A.: U.S.A.!" They need consistency from the president, so the immense pressure on administration and Congress to act are made.	"We will direct every resource at our command, every means of diplomacy, every tool of intelligence, every instrument of law enforcement, every financial influence and every necessary weapon of war to the disruption and defeat of the global terror network."
	WHO? <i>intelligence, American military forces, the C.I.A., American security services</i>		
Support	AGAINST WHOM? "fight against terror,....., a new, furtive and faceless enemy"		
	".....campaign to rally national support for an aggressive new policy toward terrorists"		
Policy	"What the country needs from the president right now is consistency"; "While the pressure on the administration and Congress to act is immense"		
Konteks	Ketika masyarakat dikagetkan dengan serangan 9/11, muncul pertanyaan bagaimana respon yang tepat, siapa yang melakukan respon, terhadap siapa respon ditujukan. The New York Times memformulasikan pandangan dengan menarasikan jawaban pertanyaan tersebut. Proses selanjutnya, the New York Times menunjukkan adanya dukungan termasuk desakan masyarakat kepada pemerintah dan kongres, sehingga memunculkan pertanyaan: apa yang dibutuhkan negara ini? The New York Times menjawab pertanyaan retorika tersebut dengan prediksi-prediksi terhadap kemungkinan kebijakan yang akan dikeluarkan.	Penulis menginterpretasi relasi pemberitaan the New York Times dan mengkonstruksinya seperti kalimat di atas.	Pernyataan Bush dalam pidatonya tanggal 20 September 2001 menjadi bukti proses pemberitaan yang dibangun the New York Times terjawab seiring reaksi-reaksi yang terjadi.

2.2 Framing dalam Editorial dan *Headline* the New York Times Pasca 9/11

Setelah melihat karakter pemberitaan the New York Times melalui editorial dan *headline* serta melihat keterkaitan secara tematik antara keduanya, selanjutnya, melalui analisis tekstual yang dilakukan di atas, telah memudahkan penulis untuk melihat karakter pemberitaan yang menggambarkan cara yang dipilih the New York Times dalam mengangkat tema-tema pemberitaan setiap harinya. Dengan melihat hal ini, penulis telah dapat melihat tendensi yang dilakukan the New York Times dalam memberitakan isu terorisme pasca 9/11. Kecenderungan ini berpengaruh dalam melihat konsep-konsep terkait ketika menganalisis konten pemberitaan. Dengan memahami tematik yang diangkat the New York Times, alasan mengangkat tema pemberitaan, dan tendensi yang ditunjukkan the New York Times ketika memberitakan isu terorisme pasca 9/11, maka penulis selanjutnya akan melihat korelasi hal itu dengan kerangka konseptual yang penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Berikut ini akan dipaparkan framing yang dilakukan editorial dan *headline* the New York Times selama sepuluh hari pasca 9/11 dari tanggal 12 September 2001 sampai 21 September 2001.

2.2.1 Konsepsi Metafora Terorisme

Dalam menganalisis editorial dan *headline* the New York Times pasca 9/11, penulis menemukan adanya upaya mengangkat diskursus terorisme ke dalam dua bentuk, pertama terorisme didefinisikan sebagai perang, kedua terorisme dipandang sebagai fenomena yang natural.

Judul editorial di hari pertama pasca 9/11 menunjukkan bahwa konsepsi metafora yang diusung the New York Times terhadap isu terorisme adalah terorisme sebagai perang. Sesuai dengan penelitian Spencer terhadap penggunaan “kata” dan peran “kata” yang dibangun media, maka judul “*The War against America; the National Defense*” dapat dimaknai sebagai upaya untuk membangun persepsi publik Amerika terhadap kondisi negara mereka. Secara sederhana, diskursus yang ingin diangkat adalah bahwa Amerika dalam keadaan berperang melawan terorisme,

sehingga implikasinya, pemerintah perlu segera mengambil langkah dan mengeluarkan kebijakan terkait terorisme.

Konsepsi metafora yang menjelaskan diskursus terorisme sebagai perang juga terlihat dalam editorial 15 September 2001 “*War Without Illusions*”, 16 September 2001 “*Fighting an Elusive Enemy*”, 19 September 2001 “*Wartime Rhetoric*”, dan 20 September 2001 “*Editorial Observer; An Imbalance of Power: Afghanistan’s Deceptive Strengths*”.

Bila mengacu pada konsepsi perang, maka negaralah dalam hal ini selaku aktor yang dapat mengeluarkan kebijakan perang. *Just war theory* mengatur bagaimana sebuah perang dideklarasikan oleh negara dan dijustifikasi. Maka, konsekuensi politik yang mungkin akan timbul dari editorial ini adalah penentuan kebijakan, dan pada tahap yang lebih tinggi, pendeklarasian perang oleh Amerika.

Kalimat “*Terrorism is a global threat*” dalam editorial di hari ke dua pasca 9/11 mengindikasikan adanya upaya pendefinisian terorisme. Dengan memperlakukan terorisme sebagai perang, maka terorisme menjadi sebuah ancaman. Permasalahannya adalah *framing* yang diusung menunjukkan adanya penegasan bahwa terorisme sebagai ancaman global. Makna kata “global” yang erat kaitannya dengan sesuatu yang bersifat satu atau kesatuan bagi seluruh dunia (*worldwide*), mengindikasikan adanya dimensi retorik yang digunakan untuk menginterpretasikan peristiwa sebagai sesuatu menyangkut seluruh tatanan kehidupan di dunia. Mengacu pada definisi globalisasi oleh M. Albrow dan E. King: “.....segala proses di mana orang-orang di dunia terintegrasi ke dalam masyarakat dunia yang satu.”²⁷, maka editorial berupaya untuk menyerukan kepada seluruh masyarakat dunia bahwa terorisme harus diperangi bersama.

Di hari ke dua itu pula *headline* the New York Times menunjukkan upaya pendefinisian terorisme sebagai perang pada pemberitaannya. Terminologi “*acts of war*” pun dimunculkan dalam artikel *headline* di hari itu. Posisi Amerika sebagai *state-actor* atau aktor negara menjadi sentra dalam pemberitaan di hari itu.

²⁷ Martin Albrow & Elizabeth King, *Globalization, Knowledge and Society*, (London: Sage Publications, 1990), 9.

Penyebutan negara-negara sekutu Amerika pun secara tidak langsung mengusung paradigma liberalisme yang memandang hubungan *interdependence* atau saling ketergantungan antarnegara. Selain itu, posisi negara Amerika dalam hubungan dan interaksinya dengan negara-negara lain yang tergambar dalam artikel mempertegas asumsi paradigmatik liberalisme.

Secara tematik, keputusan untuk mengeluarkan editorial tanggal 13 September 2001 cukup mengindikasikan adanya dorongan media terhadap pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan. Diskursus terorisme yang diusung lebih mengarah kepada terorisme yang didefinisikan sebagai suatu yang natural atau suatu fenomena. Konsepsi metafora terorisme sebagai sebuah fenomena membenarkan temuan Spencer. Perhatikan kutipan editorial sebagai berikut:

“.....The president has always been good at connecting with average Americans, and his rightful place now is lending support to the people who have lived through these catastrophes.....The challenges, after all, may include a rethinking of priorities on defense and security, something that cannot be carried out without transcending partisan politics.....”

Dalam menjelaskan terorisme, pilihan kata “*catastrophes*” mengindikasikan sesuatu yang alamiah, suatu malapetaka yang dari waktu ke waktu secara natural terjadi. Sementara kata “*challenges*” menjadi implikasi dari sesuatu yang alamiah tersebut. *Framing* yang ingin dimunculkan adalah bahwa terorisme secara alami dapat terjadi dan tentunya wajar dan secara alami pula akan muncul reaksi mengingat kondisi ancaman yang dipandang sebagai tantangan.

Diskursus terorisme yang diangkat pada editorial tanggal 15 September 2001 adalah terorisme sebagai perang. Kutipan “.....*the opening salvos in the first American war of the 21st century*” mempertegas bahwa Amerika menjadikan serangan 9/11 sebagai awal dimulainya perang di abad 21. Entitas negara (*state*) menjadi fitur utama dalam editorial ini. Menurut pemikiran realisme, negara menjadi

aktor penting dalam dunia internasional yang memiliki kekuatan (*power*) dan kedaulatan (*sovereignty*). Dengan mengangkat serangan 9/11 yang menyerang Amerika sebagai sebuah negara, ditambah dengan indikasi adanya dukungan negara di Timur Tengah terhadap Al-Qaeda, maka tentunya negara pulalah yang harus mengambil keputusan. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan berperang dengan justifikasi terhadap teori *just war* di mana konsep perang dilakukan atas dasar keseimbangan kedua pihak yang bertikai, dalam hal ini negara melawan negara. Kendati secara nyata publik mengenal Al-Qaeda dan Osama bin Laden sebagai aktor non negara, namun editorial mengajarkan dan menggiring persepsi publik untuk melihat entitas di balik kelompok teroris. Dengan melakukan *framing* terhadap aktor negara sebagai pihak yang bertikai, maka kondisi realita ketidakseimbangan antara negara melawan aktor non-negara seolah ditutupi. Teori *just war* seolah menjadi tidak relevan ketika justifikasi negara menyerang aktor non-negara memperoleh legitimasi publik.

Penggambaran Afghanistan sebagai negara yang kurang bersahabat urusan keamanan dan militer diuraikan sedemikian rupa sehingga editorial ini memprediksi perang akan sangat lama dalam kurun waktu yang tidak bisa diprediksi. Penggambaran ini tentu menjadi “ketakutan” tersendiri yang dapat merebak di tengah masyarakat. Hal ini berimplikasi pada munculnya desakan kepada pemerintah untuk segera mengakhiri ketakutan masyarakat itu.

Upaya editorial ini dalam mengangkat aktor-aktor yang terlibat seperti Afghanistan, Osama bin Laden, Pakistan, Saudi Arabia, termasuk Amerika dalam konsep identitas Milliken menunjukkan adanya upaya untuk melegitimasi tuduhan yang dilakukan Amerika terhadap Al-Qaeda. Lebih jelasnya dalam tatanan hubungan internasional, pengkonstitusian aktor non negara (baik Osama maupun Al-Qaeda) ditarik ke ranah negara (Afghanistan, dan dukungan Pakistan serta Saudi Arabia) menjadi justifikasi terhadap *just war* bila Amerika mendeklarasikan perang terhadap negara-negara tersebut. Intinya, editorial yang dibuat sebelum doktrin perang terhadap terorisme dikeluarkan, mengindikasikan sebetulnya dukungan terhadap pemerintah bila nantinya Amerika mendeklarasikan perang.

Pemilihan kata yang digunakan pun cenderung berkonotasi negatif yang berpotensi memprovokasi masyarakat untuk mengancam tindakan terorisme sekaligus menjadikan masyarakat untuk mendukung sekiranya negara mengeluarkan kebijakan perang melawan terorisme. Lihat diksi yang ada dalam editorial berikut: “*fighting, terrorism, pressure, severe, sanctions, eradicate, assault, dictator, war, hostility, fundamentalist, enemy, battle, intimidation, invading, suspect, attack, power, dislodge, nightmare, guerrilla, encounter, striking, problematic, dictator, catastrophic, anger, revulsion, sanctuaries.*” Pilihan kata tersebut secara dominan mengindikasikan adanya kekuatan, kekerasan, fenomena dan sebagainya sehingga konsepsi metafora terorisme sebagai perang dicampur dengan sebuah serangan yang fenomenal sebagai kondisi yang alamiah.

Secara dominan, diskursus terorisme yang diangkat the New York Times ada dua yakni pertama, terorisme sebagai perang, sebuah ancaman yang melanda negara dan dengan cara berperanglah maka terorisme dapat diberantas. Kedua adalah bahwa terorisme merupakan sebuah fenomena yang secara natural terjadi dari waktu ke waktu. Kedua diskursus terorisme ini, dalam dunia hubungan internasional memiliki implikasi berbeda terhadap kebijakan. Bila terorisme dipandang sebagai perang, implikasinya adalah kebijakan perang yang dideklarasikan oleh negara. Hal ini tentunya berkaitan dengan pengoperasian kekuatan militer, sedangkan bila terorisme dipandang sebagai sebuah fenomena, penanganannya pun dilakukan melalui pemberantasan akar terorisme secara struktural dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan.

2.2.2 Diskursus Identitas dan Identitas Peradaban

Konsep identitas peradaban sangat kental diangkat dalam editorial the New York Times. Menurut Goff & Dunn²⁸ identitas peradaban menjadi premis dari aspirasi terhadap nilai dan norma yang bersifat universal, bukan dari identitas agama, etnis, dan bahasa tertentu. “*The other*”, dalam konteks ini, merupakan kelompok yang

²⁸ Goff & Dunn, *Op. Cit.* 3.

berupaya merusak tatanan nilai dan aspirasi tersebut. Perhatikan potongan kalimat yang dikutip dari editorial 12 September 2001:

“.....America must let its economic partners and allies know that they can no longer stay on the sidelines of this global conflict.....Americans must rethink how to safeguard the country without bartering away the rights and privileges of the free society that we are defending.....The nation must now recognize and address the fact that hatred has turned into a malignant threat that can destabilize the underpinnings of the world economy and civil society.....the fight against terror must move from the periphery to the center of American national security planning and operations.....”

Bila menggunakan konsep identitas Neumann, maka terlihat bagaimana editorial mengkonstruksi diskursus identitas dengan membentuk pemaknaan diri, dalam hal ini siapa itu Amerika, dan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang Amerika. Dengan mengkonstitusi diri dalam pemberitaan, maka pembaca akan mengalami proses membangun *sense of identity* atau pemaknaan identitas. Hal ini diperkuat oleh temuan Jackson bahwa praktik-praktik bahasa dalam media mengkonstitusi realitas sosial dan politik. Penelitiannya terhadap pemberitaan 9/11 mengindikasikan adanya upaya media dalam “mengajarkan” kepada publik apa itu ancaman terorisme dan bagaimana respon yang tepat. Penggunaan kata “*must*” yang secara linguistik memberi tingkatan urgensi yang tinggi, diulang sedemikian rupa sehingga pola-pola pengajaran terhadap seorang dengan identitas Amerika menunjukkan ketegasan dan kondisi yang harus segera ditangani. Penegasan tingkat urgensi ini menjadi menarik mengingat diskursus identitas tidak hanya mampu mengkonstitusi aktor, tetapi juga mampu membentuk kemungkinan-kemungkinan, membentuk legitimasi, dan membentuk apa yang diharapkan.²⁹ Dari kutipan editorial, terlihat adanya pengkonstitusian aktor yakni *Americans, nation*, termasuk *partners*

²⁹ Jeniffer Milliken, *Op. Cit.* 27-28.

dan *allies of American* yang menurut Milliken berimplikasi pada legitimasi terhadap apa yang diharapkan, yakni memerangi ancaman.

Kembali ke konsep identitas peradaban, maka terlihat adanya upaya untuk mengkonstitusi aktor yang menjadi sorotan dalam editorial yakni masyarakat Amerika, termasuk aktor yang menjadi “*the other*”. Tanpa harus menunjukkan suatu agensi atau aktor tertentu, nilai-nilai yang diusung seperti “*rights*”, “*privileges*”, “*free society*” mengindikasikan adanya pihak lain sebagai *the other* yang berupaya untuk merusak tatanan nilai Amerika karena tidak mampu mengusung nilai-nilai tersebut. Pemilihan kata yang kontradiktif dengan nilai Amerika dan berkonotasi negatif seperti “*hatred*”, “*destabilize*” membenarkan konseptualisasi identitas peradaban yang dipandang sebagai proses tunggal, sehingga *the other* dikonstitusikan sebagai sesuatu yang *barbarian*.³⁰

Dalam editorial 13 September 2001, aktor-aktor yang dikonstitusi dalam narasi membangun diskursus identitas sekaligus mengusung konsep identitas peradaban. Presiden Bush sebagai individu, yang oleh paradigma Liberalisme, dipandang berpengaruh besar sesuai kapasitas dan interaksinya dalam dunia hubungan internasional. Bush selaku aktor non negara di dalam sebuah institusi negara, dalam hal ini, negara hegemoni Amerika, menjadi sorotan dunia tentang apa dan bagaimana ia merespon tindakan terorisme.

Dengan mengangkat peran Bush selaku individu di dalam sebuah institusi negara, narasi editorial berupaya mengangkat diskursus identitas Amerika yakni seorang individu Amerika. Bila penggambaran Bush berhasil dideskripsikan sedemikian rupa, maka nilai-nilai Amerika secara tidak langsung tertuang dalam narasi. Nilai-nilai itu pulalah yang nantinya mempertegas siapa pihak lawan yang menentang nilai tersebut dalam hal ini dialamatkan kepada Al-Qaeda dan Osama bin Laden, yang dalam pandangan liberalisme juga dikategorikan sebagai aktor non negara. Dengan *framing* terhadap Bush yang mendominasi narasi editorial, maka terlihat adanya upaya media untuk menyeimbangkan “kawan dan lawan”, yakni

³⁰ Goff & Dunn, *Op. Cit.* 4.

sama-sama aktor non-negara yang secara intersubjektif memiliki pengaruh kuat terhadap institusi yang menaungi mereka masing-masing.

Selanjutnya, lihat kutipan editorial tanggal 13 September 2001 berikut:

“What matter now is what Mr. Bush plans to do next.....Americans are more than ready to rise up and give him their support”

Kutipan narasi editorial di atas mulai mengindikasikan bagaimana masyarakat Amerika mendukung Bush dalam mengeluarkan kebijakan. Narasi tersebut mengisyaratkan adanya *hidden-agenda* atau agenda tersembunyi dari pemerintah yang “mengajarkan” kepada masyarakat Amerika bahwa yang terpenting adalah rencana Bush ke depan dan masyarakat Amerika mendukungnya. Narasi cukup bersifat persuasif, namun melihat kondisi di mana Bush belum menelurkan kebijakan terkait terorisme, terlihat adanya penggiringan masyarakat bahwa apapun yang menjadi keputusan Bush nanti, selalu akan mendapat dukungan. Ini juga mengindikasikan ketergesaan yang dilakukan media untuk membangun persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan Bush, terlepas apakah kebijakan tersebut melanggar norma-norma kebebasan sipil atau bahkan mampu merugikan negara secara moral maupun finansial.

2.2.2.1 Jurnalisme Perang

Selanjutnya, konsep jurnalisme perang (*war journalism*) yang cenderung mereduksi aktor-aktor yang bertikai menjadi dua pihak saja yaitu kawan atau lawan, perlu mendapat perhatian dalam menganalisis editorial dan *headline* the New York Times. Tidak jauh berbeda dari konseptualisasi identitas peradaban, war journalism yang mengusung penggambaran “*us versus them*” selalu memposisikan “*them*” sebagai pembuat masalah.³¹ Dengan demikian, implikasinya terhadap sebuah perang dijalankan adalah bahwa penggunaan kekuatan militer sebagai respon terhadap

³¹ Tjahjo Purnomo Wijadi, “The WTC Tragedy and the US Attack on Afghanistan: the Press Joins in Beating the War Drums”, dalam *Media, War and Terrorism* (London and New York: Routledge, 2004), 71-76.

terorisme menjadi legal sebagai bentuk reaksi untuk membela diri. Perhatikan kutipan headline di tanggal 21 September 2001 berikut yang merupakan potongan pidato Bush:

“They hate our freedoms, our freedom of religion, our freedom of speech, our freedom to vote and assemble and disagree with each other.....Either you are with us, or you are with the terrorists.....The enemy of America is not our many Muslim friends, it is not our many Arab friends,” Mr. Bush said. “Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them.”

Aktor yang terlibat dalam headline direduksi menjadi dua, secara eksplisit dinyatakan oleh penggunaan kata *“they”* yang merujuk pada *“enemy”* dan *“our”* yang merujuk pada “Amerika”.

2.2.3 Konsep Keamanan Nasional

Framing yang dilakukan the New York Times dalam mengangkat isu keamanan nasional paling mendominasi hampir selama sepuluh hari pasca 9/11 baik di dalam editorial maupun *headline*-nya. Bila berbicara mengenai keamanan, maka perihal yang terkait adalah *“legitimate use of force”* atau penggunaan kekuatan militer yang dilegitimasi. Editorial di hari pertama pasca 9/11 misalnya, secara eksplisit langsung menggambarkan definisi keamanan dari para ahli yang telah penulis jabarkan dalam kerangka konseptual penelitian ini.

“.....defensive strategies are inadequate and that the fight against terror must move from the periphery to the center of American national security planning and operations”

Kutipan di atas mengindikasikan domain di mana ancaman terlihat seperti yang dikemukakan Buzan, khususnya pada domain keamanan militer, yang

memperhatikan dua level kekuatan negara: ofensif dan defensif dan persepsi masing-masing negara terhadap intensi satu sama lain.

“It must be the occasion for a fundamental reassessment of intelligence and defense activities. There must be an exacting examination of how the country can face this threat without sacrificing its liberties.”

Upaya mendefinisikan keamanan pun terlihat dalam kutipan di atas. Arnold Wolfers mendefinisikan keamanan dalam pengertian objektif mengukur ketiadaan ancaman untuk mendapatkan nilai-nilai dan dalam pengertian subjektif mengukur ketiadaan rasa takut akan terserangnya nilai-nilai tersebut. Ancaman yang dimaksud tentu saja ancaman terorisme yang diupayakan agar tidak menyentuh nilai-nilai kebebasan Amerika.

Dari sini pula terlihat bagaimana penggambaran *“the nature of threats”* atau kondisi alamiah ancaman dari aksi terorisme yang tergambar dari kutipan *“These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat.....the “evil, despicable acts of terror”*.

Dengan menggambarkan kondisi alamiah ancaman, secara spesifik the New York Times mengusung konsep keamanan nasional yang menggambarkan bagaimana sebuah negara mengeluarkan strategi kemananan. Selain itu, pertimbangan lain suatu negara terhadap keamanan nasional adalah bagaimana pandangan pemerintah melihat kondisi alamiah ancaman itu. Perhatikan kutipan dari *headline* 13 September 2001 berikut:

“President Bush, who had placed American military forces on alert around the world, called the attacks “acts of war,” and vowed to hunt down and punish those responsible in a “monumental struggle of good versus evil.”

Bush selaku representasi pemerintah Amerika saat itu mengemukakan pandangan negara terhadap serangan 9/11. The New York Times mengutip frase *“the*

acts of war” dalam “*monumental struggle of good versus evil*” sebagai penggambaran pandangan pemerintah terhadap serangan 9/11 yang mempertaruhkan keamanan nasional Amerika.

Headline tanggal 16 September 2001 mengangkat aktor-aktor keamanan sebagai perihal yang dipertimbangkan pemerintah untuk mengeluarkan strategi keamanan. Agen-agen keamanan seperti CIA dan militer diperbincangkan sebagai bentuk operasi melawan terorisme.

Dari *framing* yang dilakukan the New York Times, terdapat tiga konsep penting yang bisa kita taruh dalam konteks pemberitaan yang tergambar dalam editorial dan *headline* the New York Times pasca 9/11. Tiga konsep itu antara lain 1) diskursus terorisme, 2) diskursus identitas, dan 3) keamanan nasional. Ketiga poin yang terkonseptualisasi dalam pemberitaan the New York Times, akan dikorelasikan dengan pola pemberitaan berdasarkan relasi tematik dan proses seperti yang penulis lakukan sebelumnya, sehingga nantinya akan terlihat bagaimana interaksi pemberitaan dengan dorongan terbentuknya kebijakan pemerintah, dalam hal ini doktrin Bush, Global War on Terror.

BAB 3

PEMBERITAAN THE NEW YORK TIMES DAN DOKTRIN BUSH

Penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana media mainstream Amerika berpengaruh strategis terhadap pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Untuk konteks tragedi 9/11, kebijakan yang dimaksud adalah doktrin Bush yakni Global War on Terror. Melalui pemberitaan isu terorisme pasca 9/11, penulis meneliti konten editorial dan *headline* the New York Times selama sepuluh hari dari 12 September 2001 sampai 21 September 2001.

Sebelum melihat bagaimana pemberitaan the New York Times mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan Global War on Terror, penulis terlebih dahulu menjabarkan kerangka pemikiran terhadap bagaimana sebuah kebijakan dikeluarkan, faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan dalam konteks yang lebih luas, bagaimana proses pengambilan keputusan itu terjadi.

Menurut Michael Barker, *policymaking* atau pembuatan kebijakan adalah sebuah proses politik yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik sosial maupun ekonomi, dan sistem media memegang peran yang integral dalam pembentukan konteks sosial di mana kebijakan dibangun.¹ Melalui media, masyarakat tahu bagaimana kebijakan pemerintah nantinya mempengaruhi kehidupan mereka sehingga pemerintah mendapatkan umpan balik dari kebijakan dan program mereka. Sistem media memegang peran primer sebagai perantara antara mereka yang mungkin menginginkan adanya pengaruh terhadap kebijakan dan pembuat kebijakan untuk mengatur lingkup diskursus politik dan mengatur aliran informasi. Standar sebuah pembuatan kebijakan mengikuti urutan mulai dari identifikasi masalah, pengkategorisasian solusi, adopsi kebijakan, implementasi, dan terakhir evaluasi. Dalam kenyataannya, P. A. Sabatier berpendapat bahwa proses pembuatan kebijakan

¹ Michael Barker, *Manufacturing Policies: the Media's Role in the Policy Making Process* (Australian School of Environmental Studies, Griffith University dipresentasikan dalam Journalism Education Conference, Griffith University, 29 November – 2 December 2005), 2.

terbilang lebih *fluid* atau cair, di mana kebijakan dibentuk dari pergulatan bermacam-macam ide dari berbagai koalisi.²

Por Monica Pena mengilustrasikan bagaimana pemberitaan media mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Dengan meminjam penelitian Livingston mengenai penggambaran krisis senjata Uni Soviet di Bay of Pigs di masa pemerintahan John F. Kennedy. Selama enam hari, Kennedy dan penasihatnya memutuskan untuk merahasiakan tindakan apa yang akan diambil terkait krisis senjata Uni Soviet. Kemampuan untuk menjaga situasi rahasia inilah menjadikan para pembuat keputusan terhindar dari histeria publik dan tekanan media.³

Pena kemudian menyebutkan bahwa konteks ini mulai berubah perlahan sejak 1962. Menurut Pena, faktor yang menyebabkan ada dua, pertama, perkembangan teknologi, dan kedua, sejak berakhirnya Perang Dingin, dunia tidak lagi bipolar. Muncul ketidakpastian dalam kebijakan luar negeri, khususnya kebijakan luar negeri Amerika. Perubahan konteks ini secara perlahan pula mulai meredefinisi hubungan media dengan proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di Barat, kendati masih banyak perdebatan dan batasan-batasan yang dilontarkan.⁴ Pena kemudian menjabarkan Manufacturing Consent Theory yang diusung Piers Robinson yang berpendapat bahwa media tidak dapat membuat kebijakan, akan tetapi media dimobilisasi atau bahkan dimanipulasi agar mendukung kebijakan pemerintah.⁵

Proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dalam dunia demokrasi Barat, khususnya Amerika, dilakukan dengan menitikberatkan pada kepentingan nasional. James F. Hoge berpendapat bahwa “parameter pemberitaan pers cenderung menjadi kebijakan luar negeri di mana pemberitaan itu dilakukan..... pers

² P. A. Sabatier, “Toward Better Theories of the Policy Process”, *Political Science and Politics*, (24), 1991, 147-156.

³ Por Monica Pena, *Media and Foreign Policy Decision-Making Process*, CNN or Washington? diakses dari <<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n32/mpena.htm>> pada 23 Mei 2012, pukul 13:36 WIB.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

umumnya kritis, akan tetapi eksekusi kebijakan jauh lebih esensial sebagai tujuan utamanya.”⁶

Di samping itu, kehancuran Uni Soviet, menurut pandangan Joseph Nye, merubah cara Amerika memperlakukan kepentingan nasionalnya. Dikarenakan kepentingan nasional adalah sebuah konsep yang cukup multidefinisional, maka hal itu digunakan untuk mendeskripsikan sekaligus mengatur kebijakan luar negeri. Nye juga mengutip pernyataan Samuel P. Huntington yang berpendapat bahwa “tanpa pemaknaan identitas nasional yang kuat, bangsa Amerika tidak mungkin bisa mendefinisikan kepentingan nasional mereka, hasilnya kepentingan komersial subnasional dan kepentingan transnasional serta etnik non nasional mendominasi kebijakan luar negeri.”⁷

Joseph Nye berpendapat bahwa pembuatan kebijakan dewasa ini menjadi semakin sulit dikarenakan adanya kompleksitas kekuatan (*power*). Ia memaknai kekuatan itu ke dalam tiga dimensi: dimensi pertama adalah kekuatan militer yang bersifat unipolar, dimensi kedua adalah ekonomi yang bersifat multipolar, dan dimensi ketiga adalah hubungan transnasional yang terdispersi ke dalam struktur kekuatan. Pada kesimpulannya, Nye menyatakan bahwa kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri harus memasukkan variabel-variabel lain.⁸

Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan Nye, Chanan Naveh berpendapat bahwa peran media dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah sangat kompleks. Ketika suatu peristiwa yang menyentuh dimensi internasional terjadi, pemimpin politik senantiasa mengikuti perkembangannya melalui media. Informasi ini diproses melalui komponen-komponen yang bervariasi. Keterlibatan pihak lain seperti penasihat pemerintah maupun konsultan media menjadi penting

⁶ James F. Hoge, *Media Pervasiveness* (Foreign Affairs, 2004, July/August), diakses dari <<http://www.foreignaffairs.com/articles/50108/james-f-hoge-jr/media-pervasiveness>> pada 26 Mei 2012, pukul 11: 54 WIB.

⁷ Joseph Nye, *Redefining the National Interest* (Foreign Affairs, 1999, July/August), diakses dari <<http://www.foreignaffairs.com/articles/20124/joseph-nye/redefining-the-national-interest>> pada 26 Mei 2012, pukul 14:11 WIB.

⁸ *Ibid.*

dalam proses pemformulasian kebijakan. Mereka menjadikan media sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan.⁹

3.1 Kemerdekaan Pers di Amerika

Dalam pandangan penulis, pengaruh media dalam formulasi kebijakan yang dikeluarkan suatu negara tidak akan signifikan bila kemerdekaan pers tidak mendapat tempat. Untuk konteks Amerika, penulis perlu menjabarkan bagaimana kemerdekaan pers atau *freedom of the press* di negara adidaya itu. Dari sinilah, nantinya menjadi dasar bagi kita untuk memahami pengaruh the New York Times, selaku media yang merdeka, dalam proses pengambilan keputusan sehingga keluarlah kebijakan Global War on Terror.

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan salah satu prinsip dasar bagi masyarakat Amerika. Mereka menekankan bahwa kekuatan pengetahuan harus ditempatkan di tangan masyarakat. Untuk memastikan aliran informasi berjalan tanpa hambatan, para perumus konstitusi Amerika memasukkan kebebasan pers ke dalam hak-hak dasar yang dilindungi konstitusi. Sepuluh amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat diinstrumentasikan dalam hukum pada tahun 1791.¹⁰ Bagian dari amandemen pertama mengatakan, “*Congress shall make no law... abridging the freedom of speech, or of the press...*”¹¹ Hadirnya perangkat hukum ini menjadi indikasi bahwa perlindungan ada di tangan pemerintah dan siapa saja berhak mempublikasikan apa yang diinginkannya.

Media di Amerika sering disebut sebagai the Fourth Estate, sebutan yang menunjukkan kesetaraan dengan pilar-pilar lain dalam pemerintahan Amerika di

⁹ Chanan Naveh, The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making: A Theoretical Framework, *Conflict & Communication Online*, 1 (2), 2002, 1.

¹⁰ Dalam sejarah jurnalistik Amerika, pertahanan John Peter Zenger melawan tuduhan fitnah pada tahun 1735 sering dipandang sebagai awal munculnya kebebasan pers di Amerika. Setelah Revolusi Amerika, beberapa negara bersedia untuk mendukung kebebasan pers. Lebih lanjut lihat Katherine Gammon, *Freedom of the Press* diakses dari <www.livescience.com/21312-freedom-of-the-press.htm> pada 30 Juni 2012, pukul 21:03 WIB.

¹¹ *The Media in the United States: Freedom of the Press*, diakses dari <usa.usembassy.de/media-freedom.htm> pada 30 Juni 2012, pukul 20:42 WIB.

bawah konstitusi. Posisi media dalam pilar keempat ini memainkan perang penting sebagai tonggak demokrasi di Amerika.¹²

Bila meretrospeksi dari sejarah, maka terlihat bahwa media di Amerika telah menempuh perjalanan panjang sejak koran pertama terbit di Boston, Massachusetts pada tahun 1690. Dalam 50 tahun, berbagai majalah pun mulai muncul di beberapa kota besar di Amerika. Munculnya radio komersial di awal abad ke-20 mengakhiri monopoli media cetak yang memberikan audiens baik di tingkat nasional maupun global kemudahan untuk mengakses informasi. Televisi, yang dipandang memiliki pengaruh yang lebih kuat, mulai memasuki kancah persaingan media tak lama setelah Perang Dunia II. Terlebih teknologi satelit di Amerika memungkinkan televisi Amerika merambah khalayak luas hingga masyarakat internasional. Di akhir abad ke-20 dan memasuki awal abad ke-21 inilah, media interaktif mewakili tren informasi dengan didorong kemajuan teknologi digital dan konvergensi komputer, telepon, dan televisi kabel.¹³

Media cetak dan elektronik di Amerika Serikat menawarkan berbagai berita dan pilihan hiburan sehingga menjadi elemen yang diserap dalam masyarakat Amerika. Menurut sebuah survei oleh Mediamark Research, 98% dari Amerika memiliki televisi; 82% dari orang-orang menonton “*prime time*” dan program kabel 71% dalam rata-rata per minggu. Survei juga menunjukkan bahwa sebesar 84% persen orang Amerika mendengarkan radio secara teratur, dan 79% persen pembaca surat kabar. Selain itu, 45% persen dari populasi seluruh Amerika memiliki akses ke Internet, sementara untuk kelompok-kelompok demografis tertentu persentase bisa mencapai hampir 70%.¹⁴

Dari sinilah, media di Amerika sudah menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat bahkan bisa dikatakan sebagai kebutuhan, yakni kebutuhan akan informasi. Maka akan sangat tepat bila melihat pengaruh media dalam membangun persepsi publik termasuk pembuat keputusan. Melalui refleksi sejarah kebebasan pers seperti yang penulis uraikan di atas, tampak bahwa perkembangan media di Amerika

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

berjalan beriringan membentuk sebuah tatanan nilai budaya dalam perubahan sosial di tengah masyarakat, termasuk perubahan sosial di tingkat pemerintahan dalam pengambilan keputusan.

Dengan mengasumsikan kebebasan pers Amerika dalam mengekspresikan pendapat sehingga arah pengaruh yang ditimbulkan cenderung mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan, selanjutnya penulis lebih spesifik lagi melihat perbedaan mendasar antara media mainstream dan media alternatif serta bagaimana pengaruh keduanya dalam perubahan sosial. Perbedaan antara media mainstream dan media alternatif secara garis besar diilustrasikan dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Perbedaan Media Mainstream dan Media Alternatif

Variabel	Media Mainstream	Media Alternatif
Karakter	Konvensional, terformulasi, bergantung pada konten yang menarik pembaca sebanyak mungkin	Independent, termarginalisasi, konten sangat kontekstual dan mengabaikan haluan
Target	Masyarakat luas	Kelompok kecil atau individu dengan pandangan tertentu
Fungsi	Mereduksi hal-hal minor, membangun perspektif biner	Sebagai advokasi perubahan sosial

Dari tabel 3.1 di atas terlihat bahwa media mainstream memiliki kecenderungan membangun keteraturan dalam tatanan masyarakat luas. Linda Jean Kenix lebih dalam mengeksplor perbedaan antara media mainstream dan media alternatif dalam tulisannya, “*Alternative and Mainstream Media: The Converging Spectrum*” dan melihat pengaruh masing-masing dalam perubahan sosial. Dengan meminjam konsep Gramsci di tahun 1971 dan Gitlin di tahun 1980, Kenix berpandangan bahwa pemberitaan media, khususnya media mainstream, secara historis telah menunjukkan adanya dukungan terhadap relasi hegemoni dan

institusional yang tertuang dalam sebuah sistem sehingga menjadi perhatian massa dalam membangun keteraturan di tengah masyarakat luas.¹⁵

Tabel juga mengindikasikan bahwa media mainstream bersifat konvensional sehingga formulasi pemberitaan yang dilakukan cenderung merepresentasikan persepsi masyarakat banyak. Permasalahan muncul bila, dalam tesis ini, persepsi yang diangkat tersebut tidak sepenuhnya bersumber dari masyarakat, maka terdapat insersi-insersi ide yang seolah menjadi keterwakilan pendapat publik dalam pemberitaan. Dalam konteks 9/11 melalui the New York Times yang penulis analisis, terlihat bahwa peran the New York Times selaku media mainstream sejatinya menjadi dasar pemformulasian persepsi publik Amerika yang berkembang terkait pemberitaan isu terorisme pasca 9/11. Kemerdekaan pers the New York Times yang dilindungi konstitusi menggiringnya untuk mengambil sikap dalam menentukan *framing* apa dan bagaimana yang bisa diusung dalam memberitakan peristiwa 9/11.

Tanpa mengabaikan haluan yang dibawa the New York Times, perubahan atau *shifting* karakter pemberitaan the New York Times yang penulis analisis dalam tesis ini, menunjukkan bagaimana sebuah koran mainstream secara independen melakukan *framing* terhadap sebuah isu sehingga mengkonstruksi realita sosial secara kolektif.

Lalu pertanyaan yang muncul, apakah kebebasan pers yang dimiliki the New York Times tersebut turut bergeser pasca 9/11? Keith Werhan berpendapat bahwa pasca 9/11, penting untuk memikirkan kembali yurisprudensi pers. Werhan menunjukkan adanya hirarki dalam doktrin kebebasan pers yang secara historis telah kuat melindungi kebebasan pers. Menurut pengamatannya, peristiwa 9/11 telah memberi ruang bagi pemerintah untuk “menonaktifkan” pers dalam melakukan fungsi inti selama masa krisis nasional. Para elit berupaya menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan semata atas nama rakyat Amerika demi menjaga keamanan nasional.¹⁶

¹⁵ Linda Jean Kenix, *Alternative and Mainstream Media: The Converging Spectrum*, Bloomsbury Academic diakses dari <www.bloomsburyacademic.com> pada 30 Juni 2012, pukul 21:52 WIB.

¹⁶ Keith Werhan, “Rethinking Freedom of the Press after 9/11”, *Tulane Law Review*, 82 (07-11), 2008, 22.

Inilah yang menurut pengamatan penulis sebagai solidaritas bersama yang ditunjukkan oleh the New York Times pasca 9/11. Kendati tidak secara langsung pemerintah “menonaktifkan” pers terkait pemberitaan 9/11, upaya pemerintah mengatasnamakan publik dalam merespon peristiwa 9/11 demi keamanan nasional menjadi dasar bagi the New York Times untuk mengikuti arus pemberitaan. Secara simultan dengan media-media lainnya, the New York Times pun turut menunjukkan perilaku heroik dengan cara “aman” dalam pemberitaan krisis nasional tersebut.

Pendapat penulis ini tentunya didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Doris A. Graber yang menyebutkan bahwa terdapat tiga pendekatan terhadap dilema antara aspek kebebasan pers dan keberlangsungan keamanan.¹⁷ Ketiga pendekatan itu antara lain:

1. Penyensoran Formal (*Formal Censorship Approach*)

Pendekatan pertama ini menurut Nacos dan Torres-Reyna merupakan yang paling umum. Pendekatan ini melibatkan legislasi dalam menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dipublikasikan. Peraturan semacam itu bervariasi tergantung pada lingkup penyensoran dan umumnya memasukkan penindakan tegas bila terdapat pelanggaran. Pers masih diizinkan untuk menentukan apa yang layak dipublikasikan menurut aturan pemerintah. Dengan kata lain, keputusan terhadap apa yang boleh dan yang tidak boleh dipublikasikan berada di tangan pemerintah yang menggunakan unsur kerahasiaan dalam melakukan sensor terhadap informasi yang sensitif pada masa-masa tertentu.

2. Kebebasan Pers (*Free Press Approach*)

Pendekatan ini berlawanan dengan pendekatan pertama, di mana jurnalis diberi kebebasan untuk menentukan apa yang aman untuk dipublikasikan dalam kondisi tertentu. Jurnalis dapat memilih untuk mengikuti aturan yang diberlakukan pemerintah atau merespon secara khusus kepada pejabat pemerintahan. Dalam hal ini, jurnalis terbebas dari tekanan formal kendati ada etika-etika yang harus dilewati khususnya menyangkut keamanan.

¹⁷ Doris A. Graber, “Terrorism Censorship and the 1st Amendment: In Search of Policy Guidelines”, dalam Pippa Norris, et.al., *Framing Terrorism: the News Media, the Government, and the Public* (Eds.; New York and London: Routledge, 2003), 27-28.

3. Penyensoran Informal (*Informal Censorship Approach*)

Skema pendekatan ketiga menunjukkan kombinasi antara kedua pendekatan sebelumnya. Tidak ada penyensoran dilakukan pemerintah dan pers dibiarkan secara bebas menentukan apa yang ingin dipublikasikannya. Namun dalam hal ini, pemerintah secara informal menunjukkan perilaku yang koersif sehingga pers melakukan *self-censorship* atau penyensoran sendiri. Pendekatan ketiga ini sering dikritik para ahli bahwa upaya suka rela yang dilakukan pers dalam melakukan sensor pemberitaannya menjadi potensi bagi adanya sensor formal dari pemerintah.¹⁸

Ketiga pendekatan yang diusung Graber ini menunjukkan bahwa dalam kebebasan pers di Amerika, potensi adanya intervensi dari pemerintah baik secara formal maupun informal kerap terjadi, tentunya dengan menggantungkan pada dalih demi menjaga keamanan nasional. Di samping itu, Toby Miller melihat bahwa hampir semua pemberitaan media Amerika menghasilkan umpan balik dengan proporsi yang mengedepankan kepentingan sendiri. Penelitiannya ini berdasarkan informasi yang dibocorkan dan arahan-arahan yang diberlakukan pemerintah, yang berujung pada pemberitaan yang objektivitasnya berkorelasi dengan posisi pemerintah.¹⁹ Toby Miller juga mengungkapkan bahwa pasca peristiwa 9/11, terdapat perubahan dalam pemberitaan sebagaimana nasionalisme telah membangun persepsi terhadap terorisme sebagai ancaman eksternal yang dialami di dalam negeri yang mendukung adanya invasi di mana-mana. Media Amerika dan para perencana perang telah berhasil mensuplai kerangka pemikiran sempit dalam menginterpretasikan terorisme ke dalam sebuah konsep meningkatnya kekerasan secara global.²⁰

¹⁸ Perdebatan mengenai standardisasi dan lingkup penyensoran sendiri merebak setelah penasihat keamanan nasional Condoleezza Rice menelpon pimpinan eksekutif dari jaringannya televisi besar pada 10 Oktober 2001, satu bulan pasca serangan teroris 9/11, yang meminta untuk tidak menyiarkan pesan dari Osama bin Laden, otak dari serangan WTC dan Pentagon. Rice memberi peringatan bahwa rekaman video yang disebar Osama bin Laden mengandung pesan tersirat bagi para teroris. Hal ini dapat menuntun mereka untuk melakukan serangan lebih banyak dengan pola rekrutmen para pengikut-pengikutnya khususnya dari negara berpenduduk Muslim mayoritas. Lebih lanjut lihat *Ibid.* 36.

¹⁹ Toby Miller, "U.S. Journalism: Servant of the Nation, Scourge of the Truth?", dalam Benjamin Cole, *Conflict, Terrorism and the Media* (Ed.; London and New York: Routledge, 2006), 9.

²⁰ *Ibid.* 10.

3.2 Media dan Formulasi Kebijakan Luar Negeri

Dalam melihat hubungan media dan pengaruhnya terhadap formulasi kebijakan luar negeri, Steven Livingston menawarkan tiga tipologi efek yang menggambarkan intervensi media yang bersifat kondisional dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Amerika. Efek pertama adalah media sebagai *accelerant* (aktor yang mempercepat) dalam hal ini, media diasumsikan sebagai aktor yang mempersingkat waktu menuju proses pengambilan keputusan. Media juga dapat menjadi “*force multiplier*” sebagai metode untuk mengirimkan sinyal kepada lawan. Efek ini paling sering muncul pada pemberitaan perang konvensional.²¹

Efek kedua adalah media sebagai *impediment* (penghalang), yang tergambar dalam dua bentuk, media sebagai aktor yang meneruskan emosi, dan sebagai ancaman terhadap keamanan operasional. Salah satu manifestasi dari penerus emosi adalah “*Vietnam syndrome*” di mana dukungan publik digali melalui penggambaran korban perang dalam pemberitaan media. Dikatan sebagai ancaman bagi keamanan operasional bahwa media menyampaikan kesuksesan sebuah operasi keamanan yang sekaligus menguak informasi strategis kepada lawan. Efek ini paling sering ditemukan pada pemberitaan perang konvensional, termasuk operasi perdamaian.²²

Livingston selanjutnya menjelaskan efek ketiga yakni media sebagai *agenda setting*. Hal ini diasumsikan mengingat pemberitaan krisis kemanusiaan dapat menempatkan isu tersebut pada agenda kebijakan luar negeri sekaligus mengintervensinya.²³

Penelitian terhadap pengaruh media terhadap pembuatan keputusan kebijakan luar negeri juga dilakukan Nik Gowing. Menariknya, Gowing mewawancarai orang-orang yang terlibat langsung secara diplomatik terhadap pemformulasian kebijakan. Gowing menemukan bahwa mereka sering mendapat tekanan dan pengaruh media dalam mengambil keputusan dan mengeluarkan kebijakan. Ini menguak fakta bahwa

²¹ Steven Livingston, Clarifying the CNN Effect: an Examination of Media Effects According to Type of Military Intervention, *Research Paper*, 1997, 4.

²² *Ibid.* 7.

²³ *Ibid.*

hubungan pembuat kebijakan dan media tidaklah satu arah, melainkan terkait lewat pengaruh yang resiprokal. Gowing menyatakan bahwa kendati media mempengaruhi para pembuat kebijakan, yang turut membentuk agenda kebijakan, namun media tidak mendikte respon yang diharapkan. Media mengangkat dilema dalam proses pengambilan kebijakan, namun tidak berupaya untuk mengatasi hal itu. Dengan kata lain, keputusan akhir tetap berada pada pembuat kebijakan, media tidak dapat memutuskan sebuah kebijakan.²⁴

Untuk melihat apakah media memiliki kekuatan dalam mempengaruhi pembuatan keputusan, Robinson membaginya ke dalam *'policy-media interaction model'*²⁵ seperti pada tabel 1.3 berikut, dengan menggunakan kerangka teori "*press-state relations*" atau hubungan pers-negara yang diusung oleh Hallin dan Bennet.²⁶ Model ini pernah terjadi di sejumlah intervensi kemanusiaan Amerika di era tahun 1990an. Hasilnya menunjukkan bahwa laporan media dengan framing yang kuat terhadap pro-intervensi berperan dalam membentuk kebijakan pemerintah Amerika ketika para pembuat keputusan belum pasti dengan apa yang mereka lakukan, seperti pada intervensi Amerika terhadap Bosnia di tahun 1995. Akan tetapi hasil penelitian juga menunjukkan peran yang lemah dari media ketika kebijakan pemerintah telah disepakati, seperti pada kerjasama militer di Kosovo Maret – Juni 1999.²⁷

Berikut tabel 3.2 tentang penggambaran hubungan media dan kebijakan pemerintah yang diusung Robinson:

Tabel 3.2 Model Robinson untuk Interaksi Kebijakan dan Media

	Arah Kebijakan Pemerintah	Arah Pengaruh	Pemberitaan Media	Hubungan Kebijakan dan Media
Pengaruh Media	Belum Pasti	←	Ekstensif dan Kritis	Dalam skenario ini, pengaruh media terjadi. Ketiadaan arah

²⁴ Nik Gowing, "Real Time TV Coverage from War", dalam *Bosnia by Television* (London: British Film Institute, 1996), 21.

²⁵ Piers Robinson, The Policy-Media Interaction Model: Measuring Media Power during Humanitarian Crisis, *Journal of Peace Research*, 37 (5), 2000, 615.

²⁶ *Ibid.* 618.

²⁷ *Ibid.* 620.

				kebijakan pemerintah yang disampaikan secara jelas, menyebabkan pemerintah rentan terhadap kritikan dan perhatian media. Tergantung bila berita di media diangkat dengan <i>framing</i> yang kritis. Hal ini dapat mengadvokasi sebuah tindakan tertentu. Pemerintah didesak untuk melakukan sesuatu atau menghadapi kondisi carut-marut di masyarakat. Di sini, media dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan secara signifikan.
Tidak Ada Pengaruh Media	Pasti	→	Terindex dalam agenda pemerintah	Ketika pemerintah jelas dalam menentukan arah kebijakannya dan secara jelas disampaikan, maka cenderung telah menentukan agenda pemberitaan. Pemberitaan mungkin akan menjadi kritis bila terdapat perbedaan pendapat di tingkat elit politik. Dengan keputusan jelas di tingkat eksekutif, pemberitaan media seperti tidak berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan.

Sumber: Piers Robinson, Operation Restore Hope and the Illusion of a News Media Driven Intervention, *Political Studies*, 49, 2001, 952 “telah diolah kembali oleh penulis”

Ketika media dilihat berperan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri seperti pada kasus intervensi kemanusiaan di Somalia (Operation Restore Hope 1992 – 1993), penelitian menunjukkan kejadian sebaliknya. Menurut Robinson, sebelum media memberitakan kasus Somalia, pemerintah menyampaikan pesan melalui press release yang kerap tidak diperhatikan media. Media mulai serius menanggapi kasus intervensi Somalia ini setelah terkuak informasi bahwa presiden

memutuskan untuk menawarkan pasukan militer kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Robinson mencatat bahwa setelah terkuaknya informasi tersebut, media seperti the New York Times, the Washington Post, dan CBS News mulai melakukan *framing* melalui pemberitaan dukungan terhadap keputusan presiden dengan upaya pemberitaan empati kepada masyarakat Somalia dan menggarisbawahi aspek positif dari intervensi.²⁸

Dari penelitiannya, Robinson mengemukakan bahwa media berperan sebagai “*manufacturing consent*” atau *indexing*.²⁹ Pemerintah secara langsung dapat mengambil manfaat dari hubungan ini dengan memberikan kesan kepada pendapat masyarakat yang mereka identikkan dengan pemberitaan media, kendati fakta bahwa mereka telah jauh lebih dulu membuat keputusan terhadap suatu kebijakan sebelum isu diangkat oleh media.³⁰ Dalam kondisi tersebut, media berperan sebagai alat bagi pembuat keputusan dengan merefleksikan kepentingan dan pendapat elit serta pembentukan perhatian publik.

Mengacu pada model Robinson di atas, arah pengaruh the New York Times melalui pemberitaannya pasca peristiwa 9/11 menunjukkan indikasi ke arah kebijakan pemerintah. Sebelum dikeluarkannya Global War on Terror pada 20 September 2001, the New York Times melakukan *framing* yang menunjukkan kecenderungan mengadvokasi sebuah tindakan. Dalam hal ini, the New York Times “mendesak” pemerintah untuk melakukan sesuatu melalui pola tematik seperti yang penulis uraikan dalam bab terdahulu. Signifikansi pengaruh the New York Times semakin terlihat manakala menjelang dikeluarkannya kebijakan Global War on Terror, koran mainstream itu melakukan prediksi-prediksi terhadap respon pemerintah yang bersifat sangat menjurus dan mewakili suara publik kala itu.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Piers Robinson, Operation Restore Hope and the Illusion of a News Media Driven Intervention, *Political Studies*, 49, 2001, 952.

³⁰ Benjamin M. Compaine, Global Media, *Foreign Policy*, 133, 2002, 21.

3.3 Media Sebagai Faktor Eksternal Pendorong Formulasi Kebijakan

Uraian di atas telah menjelaskan bagaimana media berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan, kendati dengan batasan-batasan tertentu. Untuk itu, perlu melihat bagaimana media selaku faktor eksternal mampu mendorong para pembuat keputusan untuk memformulasi kebijakan.

Glenn Snyder et al., menyatakan bahwa: “Para pembuat keputusan bertindak, merespon kondisi dan faktor yang ada di luar mereka dan organisasi pemerintah di mana mereka bernaung. Pengaturan memiliki dua aspek: eksternal dan internal..... pengaturan merupakan seperangkat faktor yang dikategorisasi secara relevan dan dapat mempengaruhi tindakan setiap negara.”³¹

Demikian juga menurut Michael Brecher yang membangun kerangka pemikiran yang lebih detail terhadap analisis pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Ia secara eksplisit menyebutkan bahwa media sebagai jaringan komunikasi di dalam sistem politik yang mempermudah arus informasi mengenai kondisi di lapangan secara operasional kepada elit politik. Brecher percaya bahwa “Sistem kebijakan luar negeri terdiri dari lingkungan dan *setting*..... lingkungan operasional mendefinisikan *setting* di mana kebijakan luar negeri diambil. Konsep dari *setting* mengacu pada seperangkat faktor dan kondisi relevan yang potensial, yang memengaruhi perilaku eksternal sebuah negara. Lingkungan operasional kemudian membentuk parameter atau batasan yang di mana di dalamnya pembuat keputusan harus mengambil sikap.”³²

Selanjutnya, bahwa media sebagai faktor lingkungan, juga dikemukakan oleh Naveh. Ia membaginya ke dalam enam variabel: pertama, rezim komunikasi politik di suatu negara; kedua, kebijakan komunikasi yang diadopsi oleh pemerintah negara itu; ketiga, pengaturan ekonomi politik media massa; keempat, berbagai saluran komunikasi dan teknologi yang ada di negara itu; kelima, fungsi khas yang dilakukan

³¹ Glenn Snyder et.al, “The Decision-making Approach to the Study of International Relations”, dalam James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy (2nd ed., Ed.; The Free Press, 1969)*, 203.

³² Michael Brecher, *The Foreign Policy of Israel (Yale University Press, 1972)*, 2-4.

oleh saluran media; dan keenam, nilai-nilai berita, kriteria yang mengarah kepada media sebagai panjaga gerbang untuk memasukkan isu dan peristiwa dalam berita.³³

Temuan Naveh menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri terjadi di dalam lingkungan yang sebagian diciptakan oleh media. Kinerja media dalam lingkungan ini ditentukan oleh komunikasi politik rezim suatu negara, kebijakan komunikasi pemerintah, struktur-ekonomi politik dan saluran komunikasi tertentu yang menampilkan relevansi fungsi media. Suasana media yang diciptakan mencerminkan kondisi kebijakan luar negeri melalui perspektif penyusunan agenda yang mempengaruhi para pengambil keputusan, dan menarik mereka untuk merespon melalui media. Naveh merasa perlu untuk menyebutkan bahwa konsep lingkungan media meliputi proses umpan balik, yang dalam konteks ini berarti keputusan kebijakan luar negeri berorientasi kepada media.³⁴

Naveh juga melihat bahwa proses keterlibatan media sangat kompleks, terutama dalam dua hal: pertama, media sebagai sumber input bagi pengambilan keputusan, kedua, media sebagai suatu lingkungan di mana pemimpin harus mempertimbangkan dan mengacu pada media ketika mereka membuat keputusan termasuk mempertimbangkan untuk menyebarkannya kepada masyarakat. Para pemimpin dan pembuat kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh media. Mereka belajar tentang peristiwa internasional dari pers, dan melalui pesan yang masuk dari dunia internasional yang menembus saluran komunikasi publik. Pada tahap ini media berfungsi sebagai sumber, bagian dari input terhadap proses pengambilan keputusan, yang mensuplai pemimpin dengan informasi dan data.³⁵

Selain itu, fase output turut diikutsertakan ke dalam proses yaitu bagaimana para pengambil keputusan menggunakan media, dalam hal ini karakteristik dan efek media dalam memberitakan hasil akhir yang diformulasi para pembuat kebijakan, termasuk proses perumusan kebijakan. Di fase output ini, para pemimpin dan penasihat harus mempertimbangkan apakah pesan media dapat digunakan hanya untuk tujuan eksternal dalam mengirim pesan ke pemimpin lain, atau dapat juga

³³ Chanan Naveh, *Loc. Cit.* 5.

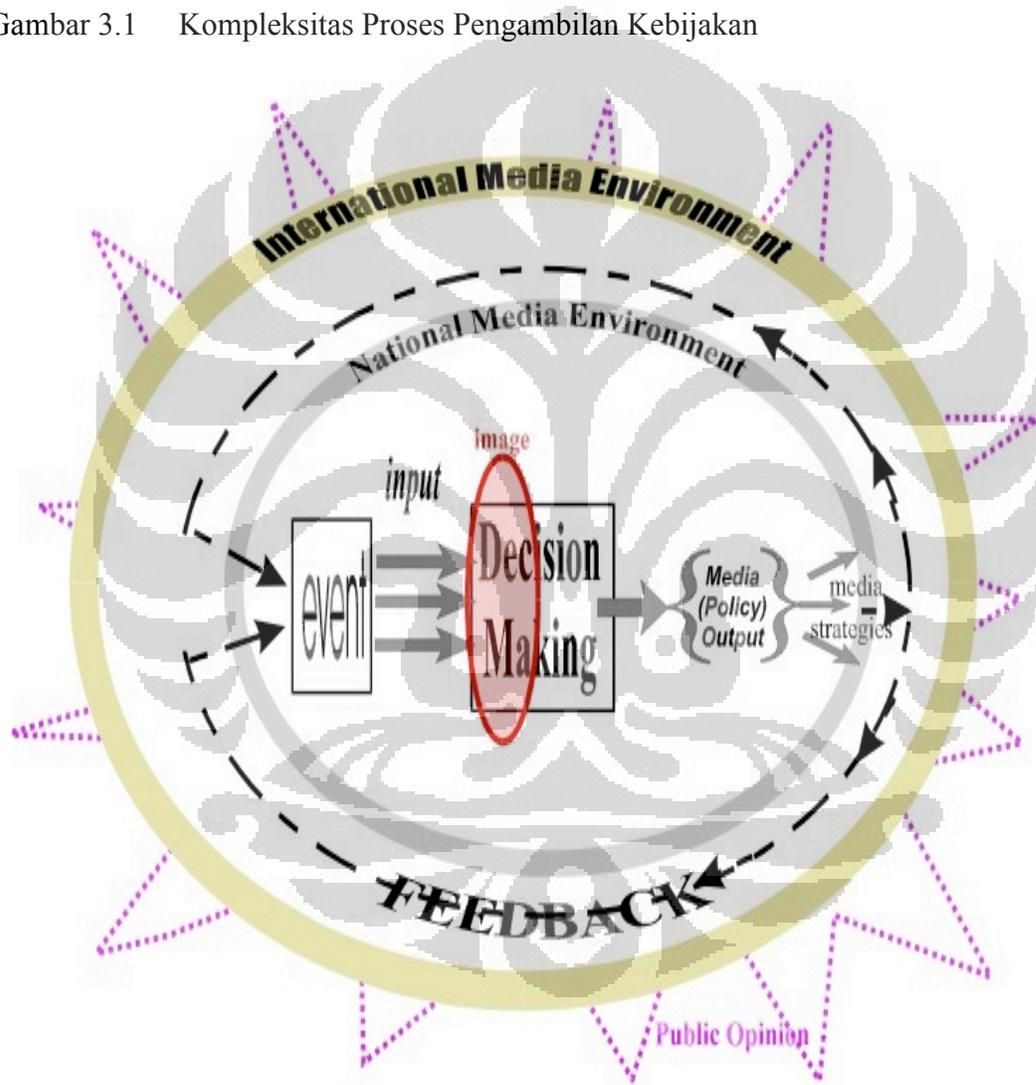
³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* 8-9.

digunakan secara internal misalnya, menciptakan legitimasi terhadap kebijakan. Ini mempengaruhi proses publikasi dan cara-cara bagaimana pembuat keputusan melakukan pendekatan kepada media.³⁶

Selanjutnya, Naveh mengilustrasikan kompleksitas proses tersebut seperti terlihat pada gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1 Kompleksitas Proses Pengambilan Kebijakan



Sumber: Chanan Naveh, The Role of the Media in Foreign Policy Decision Making: a Theoretical Framework, *Conflict and Communication Online*, 1 (2), ISSN 1618-0747, 2002.

³⁶ *Ibid.*10.

Ilustrasi Naveh di atas menggambarkan kondisi bahwa ketika suatu peristiwa internasional terjadi, para pemimpin mengetahui tentang hal itu dari media; di sinilah proses input terjadi. Kemudian informasi diproses melalui berbagai komponen, dan lantas pengambilan kebijakan atau proses perumusan mulai diagendakan. Penasihat media turut andil dalam proses ini, dan para elit politik berkonsultasi dengan mereka serta mempertimbangkan saran yang diajukan. Ketika keputusan dibuat, atau kebijakan dirumuskan, di sinilah fase output berlangsung; pemimpin mempertimbangkan lingkungan media baik di tingkat nasional dan internasional, terutama dalam proses publikasi. Selain itu, perlu dicatat bahwa pendapat publik nasional dan internasional mempengaruhi proses ini sekaligus ikut terlibat di dalamnya.

Proses ini pada hakikatnya lebih kompleks dari yang digambarkan. Naveh menambahkan bahwa berbagai tahapan bisa terjadi secara bersamaan, dan tidak mudah untuk mengidentifikasi masing-masing tahapan selama proses peristiwa sebenarnya berlangsung. Tetapi jelas Naveh menegaskan bahwa keputusan tidak dibuat dalam ruang hampa dan bahwa lingkungan media adalah salah satu ekologi di mana proses ini berlangsung.³⁷

3.4 Peran the New York Times dalam Formulasi Kebijakan Global War on Terror

Pada pembahasan di BAB 2 sebelumnya, penulis telah melakukan analisis terhadap editorial dan *headline* the New York Times dari 12 September 2001 sampai 21 September 2001 dengan melihat pola tematik dan proses pemberitaan. Penulis juga telah menelaah konsep-konsep yang terkait melalui analisis konten *framing* isu pemberitaan. Selanjutnya, kedua proses analisis ini penulis korelasikan sebagai sebuah model analisis pola pemberitaan dan *framing* isu.

Dengan menggabungkan kedua analisis ini, penulis ingin menunjukkan bahwa dalam waktu yang bersamaan dengan proses pemformulasian kebijakan, proses

³⁷ *Ibid.* 11.

membangun dan menggiring opini publik (juga pembuat keputusan) oleh media secara simultan saling berinteraksi. Maka, “misteri” di balik kompleksitas yang digambarkan Naveh di atas, dapat terpecahkan.

Analisis berikut ini, penulis bagi ke dalam tiga poin utama. Pertama, penulis melihat bagaimana diskursus yang dibangun dalam pemberitaan the New York Times mengindikasikan tema-tema yang muncul beserta proses pemberitaannya. Dari sini, penulis akan menjelaskan pola tematik dan proses pemberitaan tersebut menjadi sistem yang terintegrasi dalam mempengaruhi formulasi kebijakan oleh pemerintah. Kedua, setelah melihat sistem yang terintegrasi tersebut, penulis akan meletakkannya pada kompleksitas proses pengambilan kebijakan, sehingga nantinya terlihat seberapa besar interaksi yang terjadi antara media dan pembuat kebijakan. Terakhir, penulis akan mendemonstrasikan output dari kebijakan sebagai hasil akhir dari kompleksitas interaksi yang simultan dan terintegrasi tersebut.

3.4.1 Interkonektivitas Diskursus dalam Pola Pemberitaan the New York Times

Tiga poin utama yang penulis temukan dalam editorial dan *headline* the New York Times dari 12 September 2001 sampai 21 September 2001 dengan melihat pola tematik dan proses pemberitaan adalah *response*, *support*, dan *policy*. Ketiga poin utama ini memiliki konektivitas dengan diskursus yang diusung the New York Times dalam pemberitaannya dan saling mempengaruhi satu sama lain.

1) Diskursus Terorisme $\leftarrow \rightleftharpoons \rightarrow$ Response

Konsepsi metafora terorisme sebagai perang mengindikasikan bagaimana respon yang tepat diberlakukan. Ketika media mengangkat pemberitaan dengan melakukan pendefinisian aksi, maka implikasinya adalah bagaimana memberantas aksi tersebut. Dengan kata lain, ketika media menggembar-gemborkan wacana perang, publik dilibatkan dalam perang yang terkondisi sedemikian rupa.

Dalam pemberitaan the New York Times, diskursus terorisme dimunculkan pertama kali dalam editorial sehari pasca 9/11. Brewster Smith berpandangan bahwa tidak diragukan lagi, “ metafora perang melawan terorisme sangat dominan di awal-

awal pemberitaan.”³⁸ Akan tetapi, metafora perang bukan pertama kali digunakan dalam melakukan *framing* terhadap isu tertentu. Contoh lainnya, penggunaan metafora ‘*war on poverty*’ yang diusung pemerintah Amerika di bawah Lyndon B. Johnson di era 60an dan ‘*war on drugs*’ oleh Richard Nixon di era 70an.³⁹ Menurut Keith Shimko, alasan mempopulerkan metafora ‘*war*’ yang dianggap sebagai isu mengancam, sederhana karena pertama, perang merupakan konsep yang secara luas mudah ditelusuri; semua orang tahu apa itu perang, dan kedua karena perang merupakan fenomena kompleks dan multifaset. Banyaknya aspek dalam perang menjadikannya banyaknya dimensi yang dapat dimaknai seperti sebuah perang.⁴⁰

Untuk konteks the New York Times selaku media mainstream yang pembacanya sebagian besar dari kalangan menengah ke atas, *framing* yang mengangkat metafora perang ini menjadi diskursus yang dengan mudah dicerna pembacanya, kendati dimaknai sebagai sesuatu yang kompleks. Terlebih the New York Times dikenal sebagai korannya pejabat, sehingga konsep perang merupakan sesuatu yang akrab di mata mereka. Tidak sulit bagi the New York Times membangun persepsi publik terhadap metafora ini. Tidak hanya mengandalkan sirkulasinya yang bersifat masif, potensi keberhasilan framing terhadap metafora perang yang ingin disuntikkan kepada pembacanya pun besar. Oleh karenanya, isu ini dibombardir kepada masyarakat di awal pemberitaan pasca 9/11 sebagai dasar untuk membangun kerangka berpikir masyarakat terhadap sebuah serangan: yakni apa itu terorisme?

Lalu bagaimana metafora perang mengkonstitusi terorisme dan kebijakan apa yang paling mungkin dan logis dilakukan? Orang mengasosiasikan banyak hal terhadap perang lalu pengasosiasian ini ditransfer dari sumber domain ‘*war*’ kepada target domain ‘*terrorism*’. Misalnya pengalokasian dana perang. Susan Sontag

³⁸ Brewster Smith, The Metaphor (and Fact) of War, *Peace and Conflict*, Journal of Peace Psychology, 8 (3), 2002, 249.

³⁹ John Collins and Ross Glover, *Collateral Language: A Users Guide to America's New War*. (Eds.; New York: New York University Press, 2002), 208-209.

⁴⁰ Keith Shimko, “Foreign Policy Metaphors: Falling “Dominos” and Drug “Wars””, dalam L. Neack, J. A. K. Hey dan P. J. Haney, *Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in its Second Generation* (Eds.; Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1995), 80.

berpendapat bahwa: “[w]ar-making is one of the few activities that people are not supposed to view “realistically”; that is, with an eye to expense and practical outcome. In an all out war, expenditure is all out, unprudent – war being defined as an emergency in which no sacrifice is excessive”.⁴¹ Maka, perhatian terhadap anggaran dan pemahaman mengenai analisis ‘cost-benefit’ atau untung rugi muncul ke permukaan sehingga setiap industri dalam suatu negara harus dimobilisasi dan dikorbankan guna memperoleh kemenangan.

Dalam headline the New York Times tanggal 15 September 2001, diuraikan bahwa Senat Amerika telah menyetujui anggaran untuk aktivitas kontra terorisme sebesar \$40 miliar.⁴² Kendati terbilang bukan jumlah yang kecil, publik hanya diberi informasi mengenai respon pemerintah, dalam hal ini pengalokasian anggaran, sebagai bentuk kondisi yang darurat.

Di samping itu, perang dianggap sebagai suatu kondisi normal, dalam kurun waktu yang tidak lazim di mana langkah-langkah yang tidak lazim pula harus diimplementasikan dalam upaya mengalahkan musuh. Upaya melindungi batas-batas negara dan mencegah musuh memasuki perbatasan merupakan sesuatu yang wajar dalam perang. Musuh dalam hal ini adalah negara lain, mereka yang berasal dari suatu negara atau wilayah yang diduga mendukung lawan. Shimko juga berpendapat bahwa “kondisi darurat perang mendorong legislasi baru di mana proses cek dan balans dikurangi dan kebebasan sipil semakin ditekankan; keduanya dikorbankan dalam upaya perang.”⁴³

Selain itu, metafora perang mensimplifikasi isu sebagaimana *framing* dilakukan. Permasalahan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dikelola karena dipersempit hanya pada taraf bagaimana mengalahkan lawan dan memenangkan peperangan. Pencarian akar permasalahan tidak dianjurkan karena suara-suara kritis dibungkam. Kritik terhadap perang dipandang sebagai sesuatu yang tidak patriotik,

⁴¹ Susan Sontag, *Illness as a Metaphor and AIDS and its Metaphors* (New York: Doubleday, 1989), 33.

⁴² Robert McFadden, *After the Attacks: the President Bush Leads Prayer, Visits Aid Crews; Congress Backs Use of Armed Force* (New York: the New York Time, 2001, September 15), A1.

⁴³ *Ibid.*

pengecut, yang justru berbahaya. Permasalahan menjadi *apolitical*, sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan dalam ranah publik. Lori Hartmann-Mahmudd mengatakan bahwa “Umpan balik apa yang diizinkan dalam masa perang? Pertanyaan yang paling mungkin adalah “Apakah kita menang?” “Senjata apa yang harus kita gunakan untuk mengalahkan musuh?” “Strategi perang seperti apa yang harus kita gunakan?” Kita tidak dapat mempertanyakan hal itu bila perang menjadi penting atau musuhnya adalah diri kita sendiri. Kita tentunya tidak mungkin mundur dan berbalik mengatakan bahwa kita telah salah langkah.”⁴⁴

Kondisi ini bila dikaitkan dengan penyetujuan anggaran untuk kontra-terorisme yang penulis uraikan sebelumnya mengindikasikan bahwa publik seolah hanya pasrah menerima situasi ini. Karena bila keberatan, akan dipandang tidak memiliki patriotisme. Segala bentuk pengorbanan menjadi ujian baik bagi pemerintah maupun masyarakat Amerika kala itu.

Sangat terlihat bahwa gaya militeristik dalam terorisme era baru telah menyebabkan adanya panggilan terhadap respon militer. Di awal tahun 1987 Jeffrey Simon dari RAND Corporation, yang merupakan ahli analisis metafora, menyadari pentingnya metafora perang dalam melawan terorisme. Simon mengatakan “menyamakan terorisme dengan perang secara efektif mengakhiri perdebatan apapun mengenai respon militer yang dijustifikasi. Jika sebuah negara dalam kondisi berperang, maka negara tersebut haruslah merespon secara militer.”⁴⁵ Kondisi yang sama diamini oleh Benjamin R. Bates yang menyatakan bahwa metafora perang mempengaruhi persepsi publik terhadap musuh dan menjadikan respon militer sebagai bentuk perlawanan paling logis.⁴⁶ Pendapat serupa dikemukakan T. R. Sarbin dengan mengatakan bahwa pentingnya metafora perang diusung mengingat permasalahan terkait aksi terorisme dapat dituntaskan melalui mobilisasi kekuatan

⁴⁴ Lori Hartmann-Mahmud, *War as Metaphor*, *Peace Review*, 14 (4), 2002, 432.

⁴⁵ Jeffrey Simon, *Misperceiving the Terrorist Threat*, RAND Publication Series, R-3423-RC, 1987, June 9.

⁴⁶ Benjamin R. Bates, *Audiences, Metaphors, and the Persian Gulf War*, *Communication Studies*, 55 (3), 2004, 449.

militer.⁴⁷ Di atas itu semua, asosiasi publik terhadap perang terkait kekerasan, insecurity, dan mobilisasi kekuatan militer untuk memperoleh kemenangan dipandang sebagai suatu yang tepat.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ketika the New York Times membuka pemberitaan sehari pasca 9/11 dengan melakukan *framing* terhadap konsepsi metafora terorisme sebagai perang, maka peringatan dini kepada publik menjadi alarm penting; bahwa negara dalam keadaan terancam. Ancaman yang datang dari luar ini menyedot perhatian semua pihak bahwa Amerika diserang terorisme, dan perang harus dijalankan. Publik tentu bertanya, siapa yang akan berperang? Sebagai negara adidaya yang terkenal dengan kekuatan militernya, pertanyaan itu tentu hanya menjadi retorika belaka, karena mereka sadar betul bahwa keamanan negaranya dilindungi oleh pemerintah lewat tangan-tangan militer. Pada realisasinya, serangan terorisme sebagai ancaman yang dimaknai sebagai perang, mendorong Amerika untuk memobilisasi kekuatan militer.

Singkatnya, dapat dijelaskan bahwa pemberitaan diskursus terorisme menyebabkan munculnya *response*. Terorisme yang dimaknai sebagai perang, menuntut respon yang tepat yakni dengan mobilisasi kekuatan militer. Logika ini nantinya akan penulis kaitkan dengan relasi-relasi *framing* dan pola pemberitaan the New York Times berikutnya. Diagram 3.1 berikut mengilustrasikan uraian di atas secara sederhana.

Diagram 3.1 Relasi Diskursus Terorisme dan *Response*



⁴⁷ T. R. Sarbin, The Metaphor-to-Myth Transformation with Special Reference to the “War on Terrorism”, *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 9 (2), 2003, 150–151.

Dengan mangacu pada pola tematik “*Response*” yang telah penulis jabarkan di bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa diskursus terorisme sebagai perang yang diangkat the New York Times mengindikasikan bagaimana perang dijalankan, siapa yang menjalankan perang, dan kepada siapa peperangan ditujukan.

Pada konteks penelitian ini di mana kebijakan Global War on Terror belum dikeluarkan, mendefinisikan terorisme menjadi hal pertama yang dilakukan dilakukan the New York Times sebagai bentuk bayangan bahwa sebuah serangan 9/11 perlu mendapat perhatian baik masyarakat maupun pemerintah. Definisi yang mengusung metafora perang, oleh the New York Times, diracik sedemikian rupa seperti pada kutipan berikut:

“the first American **war** of the 21st century” (METAPHOR)

“President Bush, who is waging a **different kind of war**, (METAPHOR) must also **find the right rhetoric to lead** (HOW) the United States and a coalition of diverse nations in this **unconventional battle**. (METAPHOR)

“President Bush, who had placed American **military forces** (WHO) on alert around the world, called the attacks “**acts of war**,” (METAPHOR)

“**Afghanistan** (AGAINST WHOM) could prove to be a more difficult battlefield for the United States than it was for the Soviet Union.”

The **War** (METAPHOR) Against America; the **National Defense** (HOW)

“After the Attacks: the Trail; Bush Tells **the Military** (WHO) to ‘Get Ready’; Broader **Spy Powers Gaining Support** (HOW)”

Dari kutipan di atas terlihat bagaimana upaya pendefinisian serangan 9/11 dilakukan dengan mengangkat metafora terorisme sebagai perang. Dalam hal ini, the

New York Times mempertegas definisi tersebut dengan turut serta menjabarkan bagaimana, siapa, dan kepada siapa respon dilakukan sehingga respon tersebut dapat mendukung pemaknaan terorisme yang dimetaforakan. Singkatnya, korelasi positif antara diskursus terorisme dengan “*Response*” dalam pola tematik pemberitaannya berhasil diangkat oleh the New York Times dalam pemberitaannya pasca 9/11.

2) Diskursus Identitas $\leftarrow \rightleftharpoons \rightarrow$ Support

Upaya the New York Times melakukan *framing* terhadap isu identitas dalam pemberitaannya, tentunya dengan tendensi agar persepsi publik tentang siapa kawan dan siapa lawan semakin jelas. Bila kejelasan ini mampu disampaikan media, masyarakat Amerika dengan mudah mendukung negara yang mereka cintai.

Muncul pertanyaan, mengapa harus mengangkat identitas? Konsep identitas terbilang kompleks dan abstrak. Namun, konsep ini mampu menjelaskan siapa kita, dan apa yang kita lakukan. Upaya ini tentu saja bukan tanpa alasan, the New York Times mengerti betul bahwa kebanggaan masyarakat Amerika terhadap jati dirinya dan bangsanya sangat kuat. Namun, sekuat apapun rasa nasionalisme itu, tetap harus dipersatukan melalui persepsi yang dibangun. Dengan mengekspos nilai-nilai Amerika, dan secara bersamaan, bagaimana tatanan nilai tersebut mendapat gangguan dari pihak musuh yang berada dalam lingkaran identitas berbeda, maka mengangkat isu identitas menjadi cara untuk membuat masyarakat Amerika melakukan proses pemaknaan diri yang menurut Neumann mampu berbanding lurus dengan proses pemaknaan identitas, yakni sebagai seorang Amerika.

Upaya the New York Times tidak sampai di situ. Pemberitaan juga mempertegas batas antar *us versus them* yang disampaikan lewat metode war journalism serta turut mengangkat isu kontroversial *the West and the rest* yang diusung Huntington. Semua pola-pola ini dilakukan agar membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat Amerika yang secara emosi saat itu berada dalam keadaan di bawah ancaman terorisme, ketakutan, dan perasaan tidak aman. Nasionalisme menjadi kunci keberhasilan bila masyarakat Amerika mau bersatu menunjukkan rasa patriotisme lewat dukungan untuk bersama-sama pemerintah melawan musuh.

Penulis berpendapat the New York Times berhasil mengusung *framing* identitas ini sehingga keseragaman pandangan masyarakat Amerika dalam melihat permasalahan yang melanda negaranya mendorong mereka untuk mendukung bila pemerintah mengeluarkan kebijakan.

Identitas Amerika: What does it mean to be American?

Deborah J. Schildkraut dalam tulisannya “*National Identity in the United States*” mempertanyakan perihal “*What does it mean to be American?*”. Ia berpendapat bahwa masyarakat Amerika telah memaknai identitas nasional Amerika sejak negara tersebut berdiri.⁴⁸ Kondisi ini menurut Sheldon Hackney sejalan dengan munculnya perihal mengenai arti menjadi seorang Amerika dikarenakan negara Amerika didirikan atas dasar ide, bukan budaya atau etnisitas.⁴⁹ Kemudian prinsip-prinsip yang diusung dalam memaknai arti identitas Amerika menjadi pusat perhatian. Gunnar Myrdal dalam tulisannya di tahun 1940an menyatakan bahwa identitas Amerika berdasarkan pada sekumpulan ide yang diterminologikannya menjadi the American Creed. Ide ini dibangun oleh individu-individu yang menyepakati bahwa seorang Amerika adalah sosok pekerja keras, percaya terhadap norma hukum, kebebasan dan kesamaan. Namun masih menjadi perdebatan apakah prinsip-prinsip liberal ini dalam praktiknya telah mengarahkan keseluruhan ide dalam pembentukan identitas Amerika.⁵⁰

Seolah telah menjadi kesepakatan bahwa kepercayaan akan the American Creed itu menjadi komponen utama dalam memaknai arti menjadi seorang Amerika dan bahwa Amerika dipandang sebagai sesuatu yang unik di antara negara-negara lain yang didefinisikan oleh keyakinan itu, bukan dibentuk oleh budaya atau leluhur. Meskipun perihal apakah ide tersebut dinilai cukup menyatukan dan mempertahankan sebuah bangsa, masyarakat Amerika yang merupakan sekelompok patriot, dan kunci

⁴⁸ Deborah J. Schildkraut, “National Identity in the United States”, dalam Seth J. Schwartz et al. *Handbook of Identity Theory and Research*, Vol. 1 Structures and Processes. (Eds.; London and New York: Springer, 2011), 845.

⁴⁹ Sheldon Hackney, *One America, Indivisible: A National Conversation on American Pluralism and Identity* (Washington, DC: National Endowment for the Humanities, 1997)

⁵⁰ Deborah J. Schildkraut, *Op. Cit.* 847.

dari patriotisme atau rasa cinta kepada negara menggantungkan hal itu pada seperangkat ide tersebut, yang melekat pada sistem politik negara yakni kebebasan, individualisme, dan egalitarianisme. Masyarakat Amerika secara konsisten menunjukkan bahwa mereka bangga dan bahkan sangat bangga terhadap apa yang telah dicapai negaranya.⁵¹ Di tahun 2004 misalnya, survei yang dilakukan National Election Study (NES) menyatakan bahwa 80% dari responden mengutarakan perasaan “*extremely*” atau “*very good*” ketika mereka melihat bendera Amerika dikibarkan.⁵²

Kendati secara konsisten survei selalu menunjukkan angka yang tinggi, pola-pola yang menunjukkan perubahan kerap dapat dideteksi. Misalnya, patriotisme Amerika memuncak selama the Gulf War di tahun 1991 dan sesaat setelah serangan teroris 11 September 2001. Angka tinggi lainnya yang mengindikasikan perasaan “*very patriotic*” diikuti oleh publikasi yang besar terhadap serangan militer Amerika terhadap Libya di tahun 1986.

Schildkraut juga menerangkan bahwa perdebatan terkait perbedaan manifestasi patriotisme, bagaimana variasi diukur, dan apakah tipe tertentu seperti “*blind patriotism*” atau patriotisme buta lebih mengkhawatirkan dari pada “*constructive patriotism*” atau patriotisme konstruktif masih kerap terjadi. Robert T. Schatz et.al. mendefinisikan bahwa patriotisme buta tidak memberikan ruang untuk melakukan kritik, dan karakternya adalah kesetiaan terhadap bangsa yang tidak dapat dipertanyakan. Ketika seseorang mengkritisi dengan “*love it or leave it*”, maka ia menunjukkan patriotisme tipe ‘buta’ ini. Sedangkan patriotisme konstruktif didorong oleh hasrat untuk membangun negaranya, oleh karena itulah, kritikan mendapat tempat dalam hal ini.⁵³ Protes terhadap kebijakan domestik dan atau luar negeri dipandang sebagai upaya untuk membantu negaranya agar lebih menjalankan perangkat ide yang melekat dalam nilai Amerika.

⁵¹ *Ibid.* 848.

⁵² The National Election Studies 2004 dalam Deborah J. Schildkraut, *Op. Cit.* 851.

⁵³ Robert T. Schatz, et.al., On the Varieties of National Attachment: Blind versus Constructive Patriotism, *Political Psychology*, 20 (1), 1999, 156.

Selain itu, dikatakan bahwa kecintaan akan negara dapat meningkatkan keterlibatan secara sipil dan politik. Leonie Huddy & Nadia Khatib mengemukakan bahwa fakta bahwa seseorang mengidentifikasi dirinya dalam kelompok nasional cenderung terbawa untuk melakukan sesuatu sesuai norma kelompok, dan partisipasi politik merupakan hal yang penting dalam norma Amerika.⁵⁴ Seperti yang ditekankan sebelumnya, patriotisme konstruktif dapat memotivasi orang untuk mendukung dan melakukan upaya pengembangan negaranya.

Alasan mengapa nasionalisme dipandang lebih problematik dari patriotisme, menurut Erick McDaniel & Irfan Nooruddin adalah bahwa patriotisme dapat menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Sementara nasionalisme cenderung membawa masyarakat ke arah *xenophobia*, sikap anti imigran, dan pendefinisian identitas Amerika sebagai sesuatu yang atributif, misalnya mengatakan bahwa seorang Amerika yang sebenarnya adalah umat Kristiani; termasuk dukungan yang besar terhadap penggunaan nuklir.⁵⁵ Mereka berpendapat bahwa kendati para nasionalis lebih memiliki pandangan yang asli terhadap definisi identitas Amerika dibanding para patriot di tahun 1996, perbedaan ini hilang di tahun 2004. Mereka juga berpendapat bahwa peristiwa 9/11 dan perang terhadap Iraq dan Afghanistan memiliki batas-batas yang kabur antara nasionalisme dan patriotisme. Penelitian mereka secara tegas mengatakan bahwa konteks politik eksternal merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam melihat implikasi dari tingginya patriotisme dalam masyarakat.⁵⁶

Isu identitas yang diangkat the New York Times dalam pemberitaannya pasca 9/11 sangat terlihat jelas. Penegasan mengenai batas antara “*us versus them*” diformulasi sedemikian rupa sehingga masyarakat Amerika menjadi sadar betul siapa mereka, siapa yang berada di pihak mereka, siapa pula yang menjadi musuh mereka. Tidak sampai di situ, dengan diangkatnya isu identitas ini, masyarakat Amerika

⁵⁴ Leonie Huddy & Nadia Khatib, *American Patriotism, National Identity, and Political Involvement*, *American Journal of Political Science* 51, 2007, 77.

⁵⁵ Erick McDaniel & Irfan Nooruddin, *Proud to Be an American: How National Pride Affects Visions of National Identity* (University of Michigan Press, 2008), 56.

⁵⁶ *Ibid.*

memandang bahwa nilai-nilai yang mereka usung yakni demokrasi saat itu menjadi target teroris yang ingin merusak tatanan nilai kebebasan yang dianut bangsa Amerika.

Dalam analisis penulis sebelumnya terhadap pola pemberitaan the New York Times, penulis melihat isu identitas ini dominan diberitakan pada 15 September 2001 baik dalam editorial maupun *headline*. Namun bukan berarti the New York Times tidak menyentuh isu identitas pada pemberitaan di hari sebelumnya atau sesudahnya hingga tanggal 20 September 2001. Hanya saja, dalam analisis ini, penulis ingin memperlihatkan isu utama yang mendominasi pemberitaan setiap harinya.

Porsi peletakkan isu yang dominan setiap harinya inilah yang menarik untuk penulis analisis. Pada isu identitas ini, hal yang ingin diusung di balik eksposur the New York Times terhadap siapa kawan siapa lawan sebenarnya adalah penguatan nasionalisme dan patriotisme. Penguatan nasionalisme dan patriotisme tentu bukan perihal mudah, namun untuk konteks Amerika yang secara historis memiliki kebanggaan dan kecintaan yang besar terhadap negaranya, hal ini menjadi perkara yang tidak sulit terlebih di awal pemberitaannya, the New York Times telah “mengunci” pemahaman masyarakat terhadap terminologi terorisme sebagai perang.

Dengan pemahaman ini, masyarakat Amerika seperti disulut dengan narasi yang menguji rasa cinta dan kesetiannya pada negara. Uraian penulis mengenai diskursus identitas menjadi dasar pemikiran bagaimana perasaan berbangsa dan bernegara masyarakat Amerika menjadi kunci bagi the New York Times untuk dengan mudah menggiring mereka terhadap sebarang dukungan yang, nantinya akan ditujukan kepada pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.

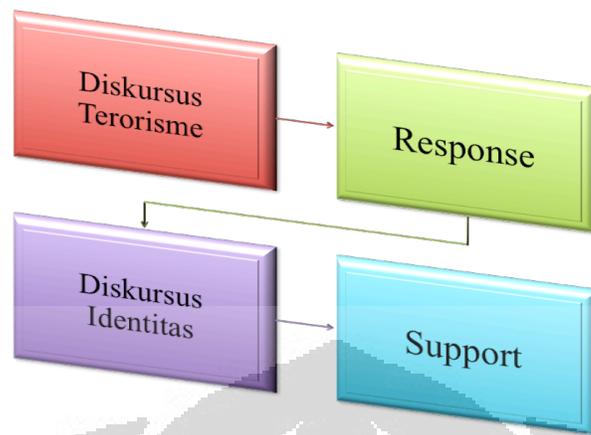
Logika ini menjadi mudah diterima mengingat sentimen negatif masyarakat terhadap pihak yang dianggap musuh kala itu seolah telah mencabik-cabik harga diri bangsa Amerika. Sebagai negara adidaya, hal ini tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja. Semua lapisan masyarakat, semua kalangan, termasuk media sendiri terdorong untuk menunjukkan rasa nasionalisme dan patriotisme mereka dengan berbagai cara, termasuk memberitakannya kepada publik seperti yang dilakukan the New York Times ini.

Hal ini mengindikasikan adanya *collective solidarity* atau solidaritas bersama yang dilakukan media di mana selama ini media menjadi kontrol negara, namun konteks peristiwa 9/11 dengan kehancuran yang bersifat kolateral mampu sedikit banyak menggeser fungsi media tersebut. Seperti yang juga penulis ungkapkan sebelumnya bahwa para ahli sepakat melihat adanya perbedaan antara nasionalisme dan patriotisme; di mana nasionalisme dipandang lebih berimplikasi pada aksi yang cenderung negatif seperti *xenophobia*, sikap anti imigran, dan sikap menjadikan identitas Amerika sebagai atribut sedangkan patriotisme lebih bersifat konstruktif. Kendati dari perbedaan itu, menurut para ahli, terdapat kekaburan batas di antara keduanya pada konteks 9/11, the New York Times tidak menjadikannya sebagai suatu masalah berarti.

The New York Times mengangkat kedua terminologi nasionalisme dan patriotisme ini dalam pemberitaan 9/11. Penulis berpendapat, terminologi nasionalisme mendapat porsi yang lebih dibanding mengangkat dan mempromosikan patriotisme Amerika. Hal ini terlihat dari cara narasi the New York Times yang mengizinkan pembacanya untuk mengkonstitusi aktor khususnya mengidentifikasi musuh dan termasuk bagaimana Amerika seharusnya memandang dan memperlakukan musuh mereka.

Keterkaitan hal ini terlihat dari uraian penulis sebelumnya di mana the New York Times “mengunci” pemahaman terhadap apa itu terorisme: sebuah ancaman yang harus diperangi. Setelah pemahaman masyarakat dibangun, kemudain (ataupun secara simultan) isu identitas diangkat melalui promosi nasionalisme dan patriotisme. Melalui isu ini, masyarakat secara kolektif menunjukkan solidaritas mereka kepada bangsa dengan menunjukkan sebetuk dukungan terhadap pemerintah. Diagram 3.2 berikut mengilustrasikan keterkaitan poin pertama dan ke dua dalam uraian ini.

Diagram 3.2 Relasi Diskursus Identitas dan *Support* serta Keterkaitannya dengan Relasi Diskursus Terorisme dan *Response*



3) Konsep Keamanan Nasional \longleftrightarrow Policy

Untuk melihat bagaimana konsep keamanan nasional Amerika ini menjadi pertimbangan utama dalam mengeluarkan kebijakan Global War on Terror, uraian berikut akan menelaah lebih lanjut mengenai doktrin Bush. Uraian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana konteks keamanan nasional Amerika memandang terorisme dan respon apa yang menjadi pertimbangan Amerika sehingga mengeluarkan kebijakan Global War on Terror. Dalam hal ini penulis menampilkan perdebatan para ahli yang mengkritisi hal yang mendorong Amerika mengeluarkan kebijakan keamanan nasionalnya dilanjutkan dengan hal-hal yang terjadi di balik informasi yang disampaikan intelijen kepada pemerintah Amerika sehingga berimplikasi pada pembuatan kebijakan.

Perdebatan di balik doktrin Bush

John T. Rourke menjelaskan pandangan yang berlawanan terhadap doktrin Bush, khususnya mengacu pada Bush Administration dan strategi keamanan nasional Amerika Serikat. Bush menyatakan bahwa kekuatan Amerika Serikat ada pada kekuatan militer dan ekonomi serta pengaruh politik. Ia lalu mengusulkan untuk melakukan *preemptive force* atau serangan pertama kepada musuh dalam melawan terorisme. Alasan mendukung doktrin ini adalah bahwa kontra-terorisme tidak mampu mengontrol terorisme global dan strategi penangkalan nuklir pada perang dingin juga tidak cukup. Dua masalah terkait doktrin kontroversial ini adalah

pertama, kesulitan dalam mendefinisikan terorisme dan menunjuk siapa lawan siapa kawan. Masalah kedua adalah pemerintah Amerika terlalu menaruh penekanan pada militer yang awalnya dipersiapkan untuk perang konvensional ketika agen penegak hukum berperan dalam kontra terorisme. Pihak yang menentang pendapat ini mengklaim bahwa ini merupakan tindakan neoimperialisme dan melukai perekonomian Amerika, menjatuhkan citra Amerika sebagai negara adidaya. Alternatif terhadap doktrin Bush adalah dengan mengajak komunitas internasional untuk menggunakan kekuatan preemptif menjadi bermanfaat tidak hanya secara eksklusif bagi Amerika. Pendukung pendapat ini mengklaim bahwa doktrin Bush merupakan bentuk respon positif terhadap negara-negara seperti Iraq dan Korea Utara.⁵⁷

Richard Shultz & Andreas Vogt mengatakan bahwa secara moral, strategi preemptif diarahkan ke dalam doktrin *just war*. Strategi preemptif dipandang esensial oleh suatu negara sebagai institusi bagi keamanan dan perkembangan penduduknya. Pandangan ini sangat kuat karena tidak dapat membatasi aksi untuk tindakan defensif dan bahkan ofensif dalam melindungi hak-hak dasar dan kepentingan yang terancam oleh negara lain atau aktor-aktor non negara seperti teroris.⁵⁸

Doktrin *just war* telah membawa banyak perdebatan. Melalui sejarah, banyak negara atau kelompok bergantung pada filosofi ini dalam meyakini bahwa penyebab perang adalah “*just*” dan musuh sebagai “*unjust*”. Richard A. Falk mengatakan bahwa “pemikiran bahwa kekuatan militer dapat merestorasi keamanan bagi masyarakat Amerika sangatlah berbahaya. Hanya pendekatan terhadap akar permasalahan terorisme yang dapat memberi harapan kepada masyarakat dunia Muslim, dan mengakhiri kondisi reseptif bagi mereka yang berhaluan ekstrem.”⁵⁹ Ekaterina

⁵⁷ John T. Rouke, *International Politics of the World Stage (10th edn.*; New York: McGraw-Hill, 2003), 49.

⁵⁸ Richard Shultz & Andreas Vogt, It’s War! Fighting Post – 11 September Global Terrorism through a Doctrine of Preemption, *Terrorism and Political Violence*, 15, 2006, 26.

⁵⁹ Richard A. Falk dalam Philip P. Purpura, *Terrorism and Homeland Security: An Introduction with Applications* (Oxford: Elsevier, 2007), 110.

Stepanova berpendapat bahwa militer tidak didesain untuk kontra terorisme dan tidak seharusnya diasumsikan memegang peran primer.⁶⁰

Kritikan terhadap doktrin Bush ini menunjukkan bahwa pertimbangan-pertimbangan Bush dan pemerintahannya untuk mengeluarkan kebijakan keamanan adalah pertama, bahwa kekuatan Amerika Serikat ada pada kekuatan militer dan ekonomi serta pengaruh politik; kedua, kontra terorisme tidak mampu mengontrol terorisme global; dan ketiga, strategi penangkalan nuklir pada perang dingin tidak cukup ampuh. Pertimbangan inilah yang menjadikan pemerintah Amerika mengasumsikan militer memegang peran primer bila terdapat ancaman terhadap keamanan nasionalnya.

Informasi intelijen dalam pengambilan keputusan di Amerika Serikat

Jelas bahwa di dalam segala bentuk interaksi manusia, selalu ada kebutuhan untuk melakukan proses pengambilan keputusan yang memungkinkan kompleksitas masyarakat menjalankan fungsinya. Formulasi kebijakan yang didesain untuk mengarahkan masyarakat diperkenalkan oleh pemimpin-pemimpin dengan tujuan mengumpulkan rekomendasi dan saran sebelum memerintahkan masyarakatnya melakukan suatu aksi. Proses pengambilan keputusan didefinisikan sebagai hasil dari distribusi kekuatan, otoritas, dan legitimasi konstitusional, bilamana tidak digunakan secara tepat maka berpotensi menimbulkan kehancuran atau *moral hazard* di tengah masyarakat.

Dalam konteks Amerika, Central Intelligence Agency (CIA) secara konsisten terus memberi peringatan kepada Congress dan Bush Administration mengenai organisasi Al-Qaeda dan Osama bin Laden.⁶¹ Di tahun 1996, Amerika telah melacak bahwa Osama bin Laden lebih dari sekedar penggalang dana bagi teroris. Salah satu penentang Al-Qaeda mengatakan bahwa Osama bin Laden merupakan petinggi organisasi terorisme dunia dengan dewan direksi yang termasuk di dalam seperti

⁶⁰ Ekaterina Stepanova, *Anti-terrorism and Peace-building During and After Conflict*, *Stockholm International Peace Research Institute*, 2003, June 12.

⁶¹ Thomas A. Johnson, *The War on Terrorism: A Collision of Values, Strategies, and Societies* (London and New York: CRC Press, 2009), 10.

Ayman al-Zawahiri. Osama bin Laden berkeinginan untuk menyerang Amerika, dan mendapatkan informasi bahwa Al-Qaeda tengah membangun kekuatan material yang dapat menghancurkan seperti material kimia, biologi, radiologi, dan senjata nuklir.⁶²

Setahun sebelumnya, National Intelligence Estimate on the Foreign Terrorist telah memperingatkan pemerintah akan ancaman Islam radikal dan memprediksi bahwa target serangan teroris paling mungkin adalah simbol-simbol negara seperti Gedung Putih dan simbol-simbol kapitalisme Amerika seperti Wall Street. Laporan tersebut juga menyampaikan bahwa penerbangan sipil Amerika juga rentan menjadi target teroris. Tahun 1997, National Intelligence Estimate yang berkoordinasi dengan penilaian komunitas intelijen mengidentifikasi bahwa penerbangan sipil merupakan target yang menarik di mata teroris.⁶³

Laporan-laporan ini berjalan sudah sejak tahun 1995, terhitung enam tahun sebelum terjadinya peristiwa 11 September 2001 yang menyerang WTC dan Pentagon. Pendekatan dan kebijakan dalam menangani Osama bin Laden diambil dalam dua format berbeda, satu di bawah Presiden Clinton yang melihat hal ini sebagai masalah penegakan hukum dan menjadikan hal itu sebagai kasus hukum dalam menindak Osama bin Laden dan militan Islam lainnya. Pada Juni 1998, Osama bin Laden didakwa atas rencana pembunuhan pasukan Amerika di Yaman yang terjadi pada tahun 1992. Tahun 1998, Osama bin Laden juga didakwa atas pengeboman kantor kedutaan Afrika Timur.⁶⁴

Pendekatan kedua, yang diaplikasikan Presiden Bush, bergantung pada penggabungan kekuatan militer dan komunitas intelijen dalam kapabilitasnya menguak aksi klandestin.⁶⁵ Semua pejabat pemerintah, termasuk Congress, sangat menyadari akan adanya ancaman Osama bin Laden dan Al-Qaeda; setidaknya tahu betul akan informasi tersebut.

⁶² George Tenet, *At the Center of the Storm: My Years at the CIA* (New York: Harper Collins, 2007), 426.

⁶³ *Ibid.* 427.

⁶⁴ Thomas A. Johnson, *Op. Cit.* 11.

⁶⁵ Jared Diamond, *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed* (New York: Penguin, 2005), 420.

Para petinggi intelijen pada saat itu merasa bahwa mereka tidak memiliki informasi yang cukup untuk menindaklanjuti permasalahan dan melihat bahwa pemerintah, pejabat dan Kongress tidak fokus pada perhitungan intelijen termasuk laporan yang mereka sampaikan. Terlebih di saat itu, skandal bersama Monica Lewinsky menarik perhatian masyarakat domestik maupun internasional.⁶⁶

Meskipun jelas terjadi kesalahan dan permasalahan dalam badan intelijen dalam menangani isu Osama bin Laden dan Al Qaeda, ketidakseimbangan dalam memandang permasalahan dan menyalahkan intelijen merupakan respon yang tidak fungsional terhadap realitas dan konteks dua masa kepresidenan. Efektivitas pemimpin bangsa, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan keseluruhan eksekusi baik kebijakan jangka pendek dan panjang dapat diilustrasikan dengan meninjau faktor yang terjadi di lapangan yang mempengaruhi masyarakat. Poin-poin inilah yang penting bagi masyarakat untuk melihat tantangan yang dihadapi mereka sebagai proses yang akan dioperasionalisasikan negara dalam melawan terorisme.

Uraian mengenai proses informasi intelijen yang turut menjadi bagian dalam pengambilan keputusan pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bagaimana perhatian pemerintah Amerika memandang aktor-aktor keamanannya, khususnya yang terkait dengan serangan 9/11. Fakta-fakta yang menunjukkan bagaimana pemerintah Amerika memperlakukan informasi intelijen saat itu menggambarkan tingkat urgensi yang dirasakan pemerintah Amerika terhadap aktor keamanannya saat itu belum menjadi prioritas hingga terjadinya serangan 9/11.

Bila disimpulkan, maka bagaimana sebuah negara mendesain strategi keamanan nasionalnya didasarkan pada 1) *the nature of threats* atau kondisi alamiah ancaman, 2) pandangan negara terhadap keamanan nasionalnya, 3) aktor-aktor keamanan nasional, dan 4) pendekatan keamanan nasional.⁶⁷

The New York Times, dalam hal ini, selaku aktor yang berada di luar sistem yang tergambarkan dalam uraian mengenai relasi konsep keamanan nasional dan

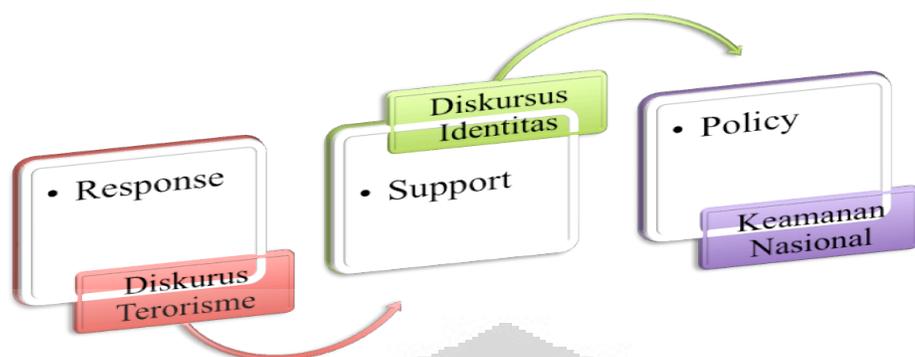
⁶⁶ Maraknya pemberitaan terkait skandal Monica Lewinsky di masa itu menjadikan media, publik, dan pemerintah mengabaikan akan adanya ancaman terorisme yang bersumber dari Osama bin Laden dan Al-Qaeda. Lebih lanjut lihat *Ibid.* 428.

⁶⁷ George Tenet, *Op. Cit.* 438.

policy yang penulis jabarkan. Melihat pemberitaan the New York Times dari 12 September 2001 sampai 21 September 2001 dalam melakukan *framing* terhadap isu keamanan terlihat bahwa adanya upaya untuk menggambarkan kondisi ancaman sebagai pertimbangan negara dalam mengeluarkan kebijakan keamanannya. Bagaimana negara memandang isu keamanan negaranya dan aktor keamanan turut mendapat porsi dalam pemberitaan, sehingga berujung pada pendekatan apa yang tepat untuk melawan terorisme.

Bila mengaitkannya pada *framing* diskursus terorisme dan *response* serta *framing* diskursus identitas dan support, terlihat bahwa korelasi positif yang muncul dari *framing* konsep keamanan nasional dan *policy* ini sebagai hasil dari kombinasi keduanya. Setelah publik Amerika “dikunci” dengan pemahaman terorisme sebagai perang, yang mendorong mereka termasuk pemerintah memikirkan respon apa yang tepat, upaya *framing* dilanjutkan dengan menggalang dukungan dari masyarakat dengan mempertebal rasa nasionalisme dan patriotisme. Sebagaimana analisis penulis sebelumnya, bahwa pertimbangan aktor keamanan menjadi penting bagi negara untuk mengeluarkan kebijakan keamanan, maka hal ini berkorelasi dengan konstruksi pemahaman terorisme sebagai perang yang ditempa dari awal pemberitaan. Implikasinya adalah perhatian baik pemerintah maupun masyarakat langsung terpusat pada aktor keamanan negaranya khususnya militer dan intelijen. Melihat kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki sebagai negara adidaya, keyakinan untuk memobilisasi aktor keamanan ini besar bila pendekatan kebijakan yang dikeluarkan sesuai, yakni kebijakan perang melawan terorisme. Diagram 3.3 berikut mengilustrasikan uraian penulis di atas.

Diagram 3.3 Relasi Keamanan Nasional dan *Policy*



Namun perlu digarisbawahi, bahwa relasi pada diagram 3.3, pada tataran realitas, tidaklah linear seperti yang terlihat. Kompleksitas dalam relasi antar fase terjadi dalam *framing* pemberitaan the New York Times, penulis hanya mengilustrasikan bentuk paling sederhana dari analisis tersebut.

3.4.2 Osama bin Laden di Mata the New York Times Sebelum Peristiwa 9/11

Berikut secara sekilas penulis akan menelaah bagaimana pemberitaan dilakukan the New York Times sebelum serangan 9/11 terjadi. Pemberitaan yang dimaksud terkait dengan isu yang diangkat the New York Times dalam memandang adanya ancaman dari Osama bin Laden bagi Amerika. Melihat uraian mengenai informasi intelijen seperti yang penulis uraikan sebelumnya, maka pemberitaan yang dilakukan the New York Times pun kurang lebih serupa dengan rentetan informasi dan laporan yang sempat disampaikan intelijen kepada pemerintah, namun tidak terlalu mendapat perhatian.

Dari penelusuran penulis, terdapat 87 artikel yang telah dikeluarkan the New York Times sebelum serangan 9/11 yang berkenaan dengan Osama bin Laden. Pemberitaan dimulai pada tanggal 28 Agustus 1998 berturut-turut selama tiga tahun hingga tanggal 21 Agustus 2001.⁶⁸ Kendati laporan intelijen tentang Osama bin

⁶⁸ Penelusuran penulis terhadap artikel terkait pemberitaan the New York Times sebelum peristiwa 9/11 dilakukan dengan memasukkan kata kunci “osama bin laden” dan “al Qaeda” melalui pencarian cepat dalam arsip the New York Times “NYT Archive Since 1981” yang disortir dari “Oldest First”. Dari pencarian cepat ini, penulis menemukan sebanyak 87 artikel yang muncul sejak 28 Agustus 1998

Laden telah lebih dulu disampaikan kepada pemerintah di tahun 1996, namun peristiwa pengeboman di dua kedutaan besar Amerika di Nairobi, Kenya dan Dar es Salam, Tanzania pada 7 Agustus 1998⁶⁹ menjadi awal di mana the New York Times mulai ‘mencium’ adanya ancaman berarti bagi Amerika.

Salah satu artikel yang dipublikasikan pada tanggal 25 September 1998 yang berjudul, “*U.S. Directs International Drive on Bin Laden Networks*” menunjukkan bahwa saat itu the New York Times menyadari ancaman Osama bin Laden bukan perkara biasa. Bagaimana Amerika saat itu berupaya berkoordinasi dengan negara-negara Eropa dan Afrika menjadi isu yang diangkat oleh the New York Times. The New York Times mulai menyadari pentingnya hal tersebut diberitakan mengingat besarnya potensi ancaman Osama bin Laden yang bersifat global, sehingga Amerika merasa perlu mendapat dukungan dari negara-negara lain untuk menangkap Osama bin Laden dan jaringannya yang melakukan pengeboman.

The New York Times pun tak luput memberitakan sosok Osama bin Laden. Dalam tulisan Tim Weiner, “*U.S. Hard Put to Find Proof Bin Laden Directed Attacks*” yang terbit pada 13 April 1999, tidak hanya memberitakan bagaimana sulitnya pemerintahan Amerika kala itu dalam membuktikan keterlibatan Osama bin Laden dalam pengeboman kedua kedutaan besar Amerika di Afrika Timur, namun juga sekaligus menampilkan sosok Osama bin Laden lewat deskripsi dan figurisasi yang dilakukannya. Dalam artikel disebutkan bahwa Osama bin Laden dilahirkan dari keluarga penguasa di Saudi Arabia yang kekayaannya diperkirakan mencapai 5 miliar dollar Amerika. Disebutkan pula bahwa Osama bin Laden di usianya yang ke-22 pindah ke Afghanistan dan menggunakan kekayaannya untuk membantu para pemberontak Afghan melawan tentara Uni Soviet hingga akhirnya membentuk basis

hingga artikel pertama terkait peristiwa 9/11 muncul pada 12 September 2001. Artikel dapat dilihat di <<http://query.nytimes.com/search/>>, diakses pada 1 Juli 2012, pukul 02:25 WIB.

⁶⁹ Artikel pertama terkait Osama bin Laden, “*After the Attacks; Excerpts from Court Charges: to Terrorists, ‘It Was Proper to Kill Americans’*” memberitakan keputusan pengadilan terhadap kasus pengeboman di kedua kedutaan besar Amerika. Artikel dapat dilihat di <www.nytimes.com/1998/08/28/world/> diakses pada 1 Juli 2012, pukul 02:39 WIB.

kelompok Al Qaeda yang bagi pemerintah Amerika dikategorikan ke dalam jaringan teroris global.⁷⁰

Pemberitaan mengenai Osama bin Laden oleh the New York Times kerap terus dilakukan hingga pada 21 Oktober 2000, dalam tulisan Benjamin Weiser, Osama bin Laden berhasil dibuktikan keterlibatannya dalam serangan bom di kedutaan Amerika di Nairobi, Kenya. Hal ini terkait pengakuan mantan militan Afghan, Ali A. Mohamed yang mengaku telah diperintahkan oleh Osama bin Laden di tahun 1993 untuk mengintai target-target penyerangan di kedutaan Amerika, Inggris, Prancis, dan Israel di Nairobi.⁷¹ Pengakuan Mohamed ini menjadi pembenar bahwa ancaman Osama bin Laden tidak main-main, dan karenanya the New York Times turut mengendus hal yang sama.

Hingga pada pemberitaan terakhir mengenai Osama bin Laden sebelum peristiwa 9/11, dilakukan the New York Times pada 21 Agustus 2001 terkait peristiwa pengeboman USS Cole di pelabuhan Yemen, Aden pada 12 Oktober 2000. Artikel yang ditulis oleh John F. Burns ini menyampaikan informasi seputar investigasi F.B.I. terhadap keterkaitan Osama bin Laden dengan serangan USS Cole.⁷² Bila ditelusuri lebih lanjut, F.B.I. menemukan korelasi positif antara serangkaian serangan mulai dari pengeboman kedutaan besar Amerika di Afrika Timur sampai pengeboman USS Cole.

Melalui pemberitaan yang dilakukan the New York Times seperti yang penulis uraikan di atas, maka dapat dilihat bahwa the New York Times telah menyadari akan adanya ancaman Osama bin Laden sebelum peristiwa 9/11 namun masih menganggapnya sebagai ancaman di luar kawasan Amerika yang kecil kemungkinan dapat menyentuh keamanan nasional atau *homeland security*. Perdebatan muncul manakala pemberitaan mengenai Osama bin Laden dianggap sebagai bentuk pengkonstitusian ‘musuh baru’ bagi Amerika setelah Perang Dingin.

⁷⁰ Tim Weiner. *U.S. Hard Put to Find Proof Bin Laden Directed Attacks* (New York: the New York Times, 1999, April 13).

⁷¹ Benjamin Weiser. *Bin Laden Linked to Embassy Blast by an Ex-Soldier* (New York: the New York Times, 2000, October 21).

⁷² John F. Burns. *F.B.I.'s Inquiry in Cole Attack Is Nearing Halt* (New York: the New York Times, 2001, August 21).

Hal ini tentunya harus dibuktikan lebih lanjut mengingat pemberitaan yang dilakukan media Amerika secara general pada saat itu terbatas hanya pada peristiwa yang terjadi seperti pengeboman-pengeboman ditambah informasi intelijen yang terkuak. Bahkan keberadaan pemberitaan ini sempat dipandang sebelah mata manakala pemerintahan Clinton tidak terlalu memperhatikan Osama bin Laden sebagai ancaman serius. Barulah ketika peristiwa 9/11 terjadi, pemerintah Amerika langsung kelabakan, namun tidak sulit bagi pemerintah Bush untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab di balik serangan 9/11.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa sebelum terjadinya peristiwa 9/11, the New York Times telah mensinyalir adanya ancaman serius yang datang dari Osama bin Laden. Namun the New York Times tidak berupaya untuk memprediksi bahwa potensi ancaman tersebut sangat besar terjadi di dalam kawasan Amerika. Dengan kata lain, the New York Times memandang Osama bin Laden sebagai musuh Amerika yang mengganggu keamanan di luar kawasan. Inilah yang penulis sebut sebagai bentuk ‘kecolongan’ baik dari pihak pemerintah Amerika beserta aktor keamanannya maupun media.

3.4.3 Posisi Pemberitaan the New York Times dalam Kompleksitas Proses Formulasi Kebijakan Global War on Terror

Dengan melihat bagaimana ketiga konsep yang diusung melalui *framing* isu dalam the New York Times dan mengaitkannya dengan relasi pola tematik dan proses pemberitaan editorial dan *headline* the New York Times, maka selanjutnya penulis akan menempatkan hal itu ke dalam model analisis yang menggambarkan posisi pemberitaan the New York Times dalam kompleksitas proses formulasi kebijakan Global War on Terror.

Dalam meletakkannya pada konteks pemberitaan 9/11, penulis ingin menunjukkan bagaimana pengaruh pemberitaan the New York Times terhadap formulasi kebijakan Global War on Terror. Dalam hal ini, penulis memodifikasi model analisis Chanan Naveh yang mendemonstrasikan lingkungan media baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara, modifikasi yang penulis lakukan

lebih menekankan pada proses interaksi dalam lingkup media dan proses pengambilan keputusan yang menghasilkan output kebijakan.

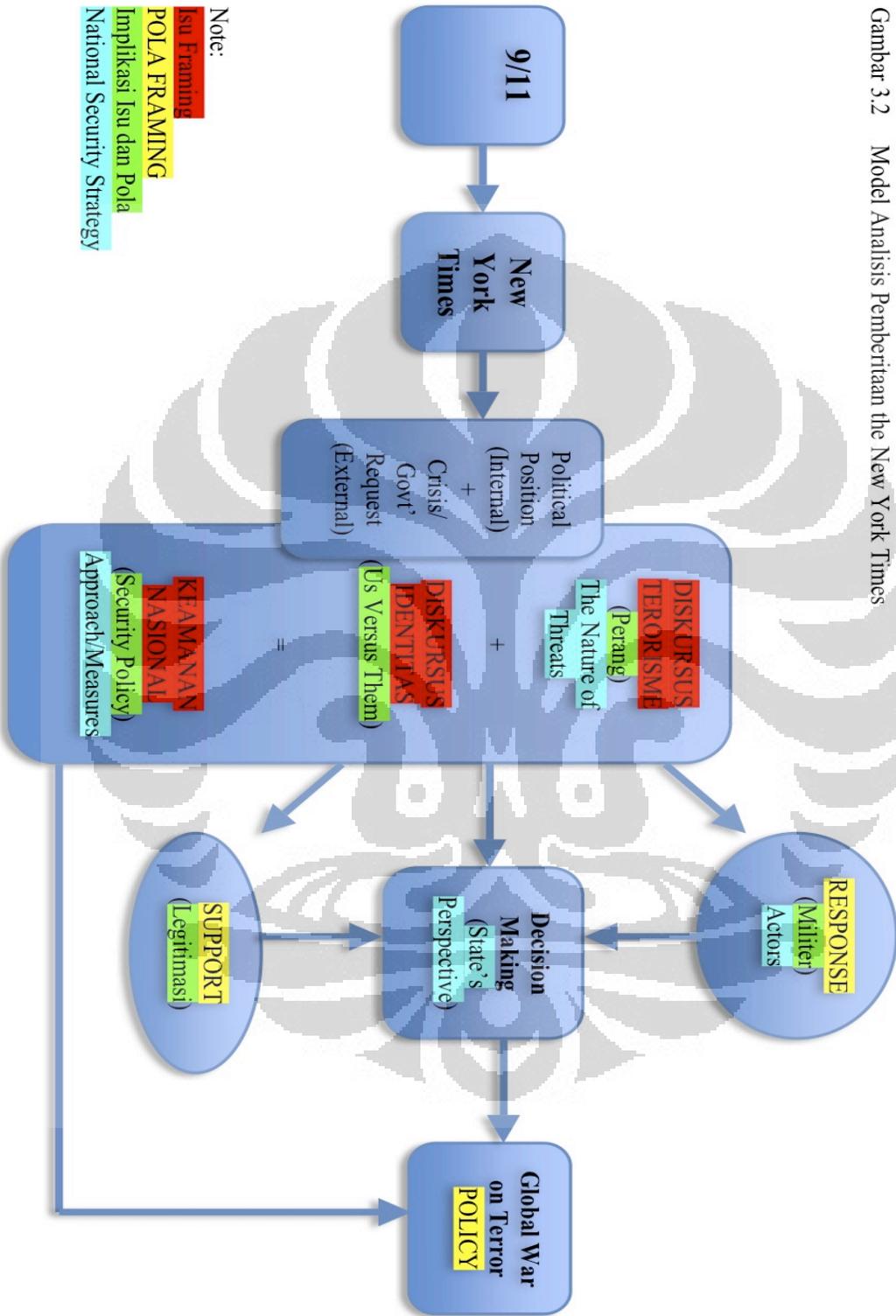
Selain itu, dalam model analisis, penulis juga mengikutsertakan variabel internal dan eksternal yang mempengaruhi pemberitaan the New York Times. Analisis ini dibangun dengan alasan bahwa interaksi yang terjadi antara media, proses pengambilan keputusan dan kebijakan tidaklah sesederhana itu. Pertimbangan-pertimbangan adanya faktor internal dan eksternal yang mengintervensi pemberitaan the New York Times pasca 9/11 patut mendapat perhatian dalam analisis ini.

Gambar 3.2 berikut menjelaskan bagaimana model analisis pemberitaan the New York Times dan implikasinya dalam proses pengambilan keputusan:

- Fase pertama menandakan peristiwa 9/11 sebagai sebuah momentum yang menjadikan media mainstream Amerika, khususnya the New York Times, mulai melakukan pemberitaan.
- Fase kedua menggambarkan the New York Times, dengan segala reputasinya, tentunya telah memiliki haluan yang jelas dalam melakukan pemberitaan.
- Di fase ketiga, haluan the New York Times mulai mendapat pengaruh. Pengaruh pertama tentu saja datang dari peristiwa 9/11. Interaksi yang terjadi ini menunjukkan adanya pengaruh dua arah baik secara internal maupun eksternal. Ketika sebuah peristiwa sebesar 9/11 terjadi, the New York Times sebagai sebuah entitas yang erat kaitannya dengan entitas-entitas lain, turut terpengaruh dalam kondisi carut marut pasca serangan 9/11. Kondisi ini menjadikan the New York Times meredefinisi haluan mereka dalam melakukan pemberitaan.
- Redefinisi haluan ini berdampak pada pola-pola dan karakteristik pemberitaan the New York Times. Cara the New York Times memberitakan peristiwa 9/11 tidak hanya menjadi pihak yang berada di luar menyoroti kejadian, namun the New York Times turut terlibat dalam kondisi saat itu.
- Dampaknya adalah ketika the New York Time melakukan *framing* terhadap isu terorisme, berpotensi sangat besar untuk terjadi bias atau berubah karakter pemberitaannya akibat proses redefinisi haluan tadi.

- Hal ini tentu saja tidak dapat dikalkulasikan, namun terefleksikan dalam pemberitaan dan *framing* yang dilakukan terhadap diskursus yang diangkat.
- The New York Times yang selama ini dikenal kritis karena berhaluan liberal kiri, ketika memberitakan mengenai respon dalam menghadapi terorisme yang dimaknai sebagai perang, menjadi seruan kepada publik bahwa koran sekritis the New York Times dengan pembacanya yang dari kalangan menengah ke atas, bisa menunjukkan dukungannya kepada pemerintah.
- Dalam mengusung diskursus identitas, the New York Times berusaha menunjukkan hubungan yang dekat antara pembaca dan koran untuk merepresentasikan pendapat yang dipandang benar secara universal.
- The New York Times yang mampu menunjukkan solidaritasnya kepada negara Amerika menjadikan para pembuat kebijakan merujuk pada the New York Times untuk informasi seputar peristiwa 9/11.
- Ketika *framing* yang dilakukan the New York Times terhadap diskursus-diskursus mendominasi persepsi publik Amerika, maka kondisi realitanya tentu tidak jauh berbeda dari yang diskursus itu sendiri.
- Kondisi ini menyebabkan pemerintah berada pada posisi yang rentan, di mana penetrasi informasi dari the New York Times yang seolah diamini publik Amerika, menjadi desakan bagi pembuat kebijakan untuk segera mengambil keputusan.
- Pada tahap ini, sangat mungkin terbangun interaksi yang tidak seimbang, bila posisi pemerintah lebih kuat, maka pemberitaan the New York Times dijadikan landasan untuk melegitimasi kebijakan yang memang sudah direncanakan.
- Namun bila sebaliknya, maka pemerintah hanya bisa pasrah dan mengikuti “*request*” atau permintaan the New York Times untuk segera mengeluarkan kebijakan.

Gambar 3.2 Model Analisis Pemberitaan the New York Times



Note:
Isu Framing
POLA FRAMING
Implikasi Isu dan Pola
National Security Strategy

The National Research Council Committee on Disasters and the Mass Media menemukan bahwa selama masa krisis, media menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. memberi peringatan terhadap kemungkinan dan memprediksi bencana;
2. menyampaikan informasi kepada pemerintah, agen penyelamat, dan publik;
3. mengikuti perkembangan penyelamatan dan perbaikan;
4. menarik pelajaran untuk tujuan kesiapan di masa mendatang;
5. ambil bagian dalam proses edukasi masyarakat jangka panjang;
6. dan mendefinisikan krisis.

Dalam melakukan fungsi-fungsi di saat krisis, media menurut Colby and Cook “.....berita mengenai krisis cenderung tidak berupaya untuk menjadi sensasional, melainkan untuk menjadi penegas informasi. Secara umum, jurnalis bergantung pada pemerintah atau para akademisi yang secara resmi mampu memberikan bukti-butki dari pemberitaan.”⁷³

Dari uraian tersebut, penulis melihat bahwa tendensi pemberitaan media pada masa krisis mengalami perubahan karena pengaruh-pengaruh di luar media tersebut yang menyebabkan fungsi mereka menjadi seperti yang dijabarkan di atas. Bila melihat konteks pemberitaan the New York Times pasca tragedi 9/11, maka terlihat bahwa the New York Times menjalankan fungsi-fungsi di atas dalam pemberitaan isu terorisme. Kondisi ini tentu saja berpengaruh kepada bagaimana the New York Times melakukan *framing* terhadap isu terorisme yang tergambar dari pola pemberitaannya. Pernyataan yang muncul adalah apakah variabel eksternal yang mengintervensi the New York Times dalam melakukan pemberitaan 9/11 merubah karakternya?

Pertanyaan ini sukar untuk menemukan jawaban bila tidak mengukur besar kecilnya pengaruh variabel eksternal yang mengintervensi pemberitaan the New York Times. Selain mengukur besaran pengaruh eksternal, faktor internal the New York Times turut berperan dalam membentuk *framing* terhadap pemberitaan 9/11.

⁷³ Colby and Cook dalam Xigen Li & Ralph Izard, *9/11 Attack Coverage Reveals Similarities, Differences*, Newspaper Research Journal, 24 (3), 2007, 217.

Salah satu faktor internal the New York Times yang mendorong pola pemberitaan seperti yang sudah diuraikan adalah posisi politiknya. Riset yang dilakukan Riccardo Puglisi of Massachusetts Institute of Technology menyatakan bahwa the New York Times dikenal dengan reputasinya sebagai koran berhaluan liberal kiri. Hal ini terlihat dari tendensi yang ditunjukkan the New York Times dalam kecenderungannya untuk lebih memilih the Democratic Party selama masa kampanye kepresidenan. Berdasarkan hasil temuannya, ia mengatakan bahwa “the New York Times memiliki kecenderungan mendukung Democratic Party, dengan aspek “*watchdog*” di mana selama kampanye presiden, the New York Times secara sistematis memberikan penekanan terhadap topik yang berkenaan dengan Democratic Party, dan melakukannya hanya pada saat pemerintahan presiden yang berasal dari Republican Party.”⁷⁴

Selain itu, posisinya sebagai koran menengah ke atas mempengaruhi *literary style* atau gaya tulis yang diusung the New York Times. Gaya menulis formal namun komunikatif menjadikan the New York Times peduli untuk menyampaikan pemberitaannya sesuai target pembacanya. Mengapa hal ini signifikan? Mengingat penulis melihat peranan the New York Times dalam formulasi kebijakan Global War on Terror, maka sebuah pesan retorik yang disampaikan pada pembaca yang tepat (termasuk pembuat keputusan) menunjukkan peran the New York Times semakin berpengaruh.

Dari variabel internal dan eksternal tersebut, penulis tidak melihat adanya dominasi faktor eksternal dalam mempengaruhi pemberitaan the New York Times pasca 9/11. Namun bukan berarti faktor eksternal ini absen dalam mempengaruhi the New York Times, hanya saja faktor internal dalam the New York Times lebih mendominasi.⁷⁵

⁷⁴ Riccardo Puglisi, *Being the New York Times: The Political Behaviour of a Newspaper*, 2004. Diakses dari http://eprints.lse.ac.uk/19292/1/Being_the_new_york_times.pdf pada 2 Juni 2012, pukul 04:11 WIB.

⁷⁵ Dominasi faktor eksternal sebenarnya terjadi pada 10 Oktober 2001 di mana Kongress meminta media untuk meredam pemberitaan terorisme khususnya dalam mengekspos video propaganda Osama bin Laden. Mengerti akan kondisi inilah, pemerintah Amerika saat itu secara terbuka menyerukan kepada media Amerika untuk tidak menayangkan video Osama bin Laden termasuk menarasikannya

Karena itulah, penulis menggambarkan bagaimana proses yang terjadi dalam lingkungan media yang diawali oleh kejadian serangan 9/11. Dikarenakan penulis menanalisis pemberitaan the New York Times, maka the New York Times ditaruh pada posisi setelah peristiwa yang dalam prosesnya dipengaruhi oleh variabel internal dan eksternal yang mengintervensi pemberitaan. Melalui pengaruh inilah, the New York Times melakukan *framing* terhadap isu-isu yang mampu mengunci persepsi masyarakat termasuk pembuat keputusan pada tingkat elit.



bagi media cetak. The New York Times saat itu menyetujui permintaan Kongress demi alasan patriotisme dan melindungi mereka yang tidak bersalah. Lebih lanjut lihat Ervand Abrahamian, The US Media, Huntington and September 11, *Third World Quarterly*, 24 (3), 2003, 536.

BAB 4

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian terhadap editorial dan *headline* the New York Times pasca tragedi 9/11 dari tanggal 12 September 2001 sampai 21 September 2001 telah mendapatkan beberapa temuan. Dari temuan-temuan itu, penulis konseptualisasikan sehingga menjadi sebuah konsep atau teori yang dapat diaplikasikan.

Dari analisis tekstual yang dilakukan terhadap editorial the New York Times selama sepuluh hari pasca 9/11 dari tanggal 12 September 2001 sampai 21 September 2001, penulis menemukan bahwa karakteristik pemberitaan yang dilakukan the New York Times bergeser dari pola episodik menjadi tematik. Penulis berpendapat bahwa pola ini sengaja dipilih oleh koran tersebut untuk lebih komprehensif membahas isu mengenai terorisme.

Penulis juga melihat bahwa the New York Times menjadikan editorialnya sebagai perantara untuk menyampaikan ekspresi dan opini editor sekaligus melakukan evaluasi terhadap informasi yang disampaikan. Sementara *headline* dirancang untuk menarik perhatian pembaca, lalu editorial sebagai pengunci persepsi yang terlebih dahulu telah dibangun dalam *headline*.

Hal ini terlihat dari nilai berita yang diangkat sedemikian rupa dan secara dominan menempatkan pendekatan *eliteness* dalam merujuk pada pemerintah dan aktor-aktor pembuat keputusan sebagai sentra pembahasan. The New York Times secara tidak langsung mengajak pembaca untuk “melupakan” peristiwa dan mengalihkan perhatian kepada sosok pemimpin, pemerintah, termasuk pihak musuh agar peristiwa yang mengancam keamanan Amerika tersebut segera mendapat reaksi nyata.

Temuan penulis mengatakan bahwa the New York Times, dalam editorialnya, berusaha mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan, melalui masukan dan prediksi-prediksi yang dilakukan. Tidak hanya berhasil melakukan prediksi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan, fakta-fakta yang diangkat pun

mampu membenarkan kemungkinan-kemungkinan bila kebijakan tersebut diimplementasikan kepada musuh.

Dari hasil konten analisis yang penulis lakukan, maka penulis mengkategorisasikan temuan ke dalam tiga pola utama pemberitaan:

a) Response

Pemberitaan yang mengangkat bagaimana respon terhadap serangan 9/11 merupakan isu yang cukup dominan yang diangkat editorial dan *headline* the New York Times. Dalam memberitakannya, the New York Times menampilkan bentuk respon yang variatif, yang dibedakan dari:

- 1) bagaimana respon seharusnya dilakukan
- 2) siapa saja aktor yang terlibat untuk melakukan respon tersebut
- 3) kepada siapa respon ditujukan

Variasi pemberitaan yang mengindikasikan “*response*” menunjukkan bagaimana the New York Times sangat paham bahwa satu isu dapat dilihat dari sudut pandang yang beragam. Dari pola pemberitaan ini, terlihat tendensi the New York Times untuk memaknai terorisme pada serangan 9/11 sebagai perang.

Informasi yang disampaikan membuat publik menyimpulkan bahwa respon terkait keamananlah yang tepat diberlakukan. Dalam konteks ini pula, aktor-aktor keamanan yang biasanya dimobilisasi dalam perang diusung dalam pemberitaan sehingga bila negara merespon terorisme sebagai perang, maka aktor-aktor inilah yang akan berada pada garda paling depan.

Respon ini tentu tidak akan berjalan bila tidak ada musuh, yang turut mendapat tempat untuk diekspos dalam pemberitaan the New York Times. Pola pemberitaan ini mengimplikasikan adanya sebuah strategi yang harus dijalankan pemerintah. Apakah pemerintah harus mendeklarasikan perang atau melakukan penguatan dan penegakkan instrumen hukum yang termanifestasi dalam sebuah kebijakan keamanan. Tentunya, kebijakan keamanan ini tidak akan terjustifikasi bila tidak adanya dukungan dari masyarakat.

b) Support

Acuan makna berbeda dari “dukungan” yang diusung bertujuan untuk membuka mata publik bahwa di balik aksi terorisme yang besar tentu ada kekuatan besar yakni negara, dukungan negara yang mensponsori terorisme, termasuk keterlibatan negara-negara lain dalam upaya mencegah terorisme.

Untuk itu, penting bagi publik untuk tahu bahwa memberantas terorisme beserta negara yang mendukungnya perlu dukungan segenap masyarakat Amerika. *Response* pada poin pertama tidak akan berjalan bila tidak ada yang menjustificasinya. Masyarakat, dalam negara demokrasi, menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan. Maka dukungan masyarakat penting untuk melegitimasi kebijakan yang akan dikeluarkan.

c) *Policy*

Tema kebijakan merupakan yang paling dominan diangkat oleh the New York Times selama tiga hari berturut-turut terhitung sejak sehari sebelum dikeluarkannya Global War on Terror sampai satu hari sesudahnya dari tanggal 19 September 2001 sampai 21 September 2001. Dominasi ini dilakukan sebagai bentuk dorongan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah yang tepat.

Response + Support = Policy

Relasi proses pada persamaan *Response + Support = Policy* menunjukkan bahwa dalam membangun persepsi publik, the New York Times sangat menyadari pola yang paling mungkin dilalui selain melihat tren yang berkembang di masyarakat atau isu yang paling mutakhir. Dari relasi tematik menghasilkan pola relasi baru yakni hubungan tema satu menjadi dasar terbentuknya pengangkatan tema lainnya. Hal ini tidaklah sesederhana ataupun selinear “*news breeds news*” dalam nilai berita. Relasi proses yang dimaksud adalah bagaimana sebuah isu dalam berita yang mengalami repetisi dengan sudut pandang berbeda, menghasilkan isu baru yang nantinya berimplikasi pada lingkup yang lebih besar.

Seperti yang dilakukan editorial dan *headline* the New York Times, tema respon terhadap serangan 9/11 diekspos langsung sehari pasca 9/11, lalu ketika respon yang “diajarkan” seharusnya seperti apa, publik akan bertanya: Siapa yang

akan memimpin kita untuk merespon terorisme? Keberadaan Bush selaku tampuk kepemimpinan Amerika saat itu menjadi sentra perhatian masyarakat. Ketika Bush selaku presiden menunjukkan respon kerasnya terhadap terorisme, nasionalisme masyarakat Amerika mulai bangkit, dan kecenderungan dukungan mulai diperlihatkan. Pemimpin dan pemerintah selaku pembuat keputusan melihat kondisi yang berkembang di masyarakat. Dengan respon yang tepat dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, selaku pemimpin, menjadi sebuah ujian besar untuk dapat mengeluarkan kebijakan. Hasil akhir dari narasi itu, menarik sebuah garis yang mengarah pada kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Relasi proses ini tidak akan berhasil digambarkan bila media, dalam hal ini the New York Times, tidak memiliki pengaruh strategis selaku aktor non-negara dalam kaitannya dengan keputusan pemerintah untuk mengambil kebijakan.

Framing Isu the New York Times

Secara dominan, diskursus terorisme yang diangkat the New York Times ada dua yakni pertama, terorisme sebagai perang, sebuah ancaman yang melanda negara dan dengan cara berperanglah maka terorisme dapat diberantas. Kedua adalah bahwa terorisme merupakan sebuah fenomena yang secara natural terjadi dari waktu ke waktu.

Kedua diskursus terorisme ini, dalam dunia hubungan internasional memiliki implikasi berbeda terhadap kebijakan. Bila terorisme dipandang sebagai perang, implikasinya adalah kebijakan perang yang dideklarasikan oleh negara. Hal ini tentunya berkaitan dengan pengoperasian kekuatan militer, sedangkan bila terorisme dipandang sebagai sebuah fenomena, penanganannya pun dilakukan melalui pemberantasan akar terorisme secara struktural dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan.

Dari *framing* isu yang dilakukan the New York Times, terdapat tiga konsep penting yang bisa kita taruh dalam konteks pemberitaan yang tergambar dalam editorial dan headline the New York Times pasca 9/11. Tiga konsep itu antara lain:

- 1) diskursus terorisme,

- 2) diskursus identitas, dan
- 3) keamanan nasional.

Ketiga isu yang diangkat dalam pemberitaan the New York Times dikorelasikan dengan pola pemberitaan berdasarkan relasi tematik dan proses seperti yang penulis lakukan sebelumnya, sehingga terlihat bagaimana interaksi pemberitaan dengan dorongan terbentuknya kebijakan pemerintah, dalam hal ini doktrin Bush, Global War on Terror.

Penelitian ini menemukan bahwa pemberitaan the New York Times menjadi contoh bahwa media memiliki pengaruh signifikan terhadap lahirnya sebuah kebijakan. Lahirnya sebuah kebijakan menandakan adanya sebuah perubahan politik atau *political change*; perubahan politik dalam kajian terorisme mengindikasikan adanya legitimasi terhadap tujuan politik sebuah aksi terorisme. Premis ini berujung pada kesimpulan bahwa media berpotensi menjadi ancaman baru di dunia internasional selain ancaman terorisme itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

BUKU DAN JURNAL

- Abrahamian, Ervand. (2003). The US Media, Huntington and September 11. *Third World Quarterly*, Vol. 24, No 3.
- Alagha, Joseph. (2011). *Hisbullah's Identity Construction*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Albrow, Martin & King, Elizabeth. (1990). *Globalization, Knowledge and Society*. London: Sage Publications.
- Arena, Michael P. and Arrigo, Bruce A. (2006). *The Terrorist Identity: Explaining the Terrorist Threat*. New York and London: New York University Press.
- Ashmore, Richard D. and Jussim, Lee (Eds.). (1997). *Self and Identity: Fundamental Issues*. New York and Oxford: Oxford University Press.
- Barker, Michael (2005) *Manufacturing Policies: the Media's Role in the Policy Making Process*. Australian School of Environmental Studies, Griffith University as refereed paper presented to the Journalism Education Conference, Griffith University, 29 November – 2 December 2005.
- Bates, Benjamin R. (2004). Audiences, Metaphors, and the Persian Gulf War. *Communication Studies*, Vol. 55 No. 3.
- Baylis, John. (2001). "International and Global Security in the Post-Cold War Era", dalam John Baylis and Steve Smith. *Globalization of World Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Bealey, Frank, Chapman, Richard A., & Sheehan, Michael. (1999). *Elements in Political Science*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Bednarek, Monika. (2006). *Evaluation in Media Discourse: Analysis of a Newspaper Corpus*. London and New York: Continuum.
- Bolivar, A. (1994). The Structure of Newspaper Editorials, dalam M. Coulthard (Ed.), *Advances in Written Text Analysis*. New York: Routledge.
- Bonney, Richard. (2004). *Jihad: from Qur'an to bin Laden*. New York: Palgrave Macmillan.

- Brecher, Michael. (1972). *The Foreign Policy of Israel*. Yale University of Press.
- Chouliaraki, Lilie. (2008). Mediation, Text and Action, dalam Vijay K. Bhatia et.al. *Advances Discourse Analysis*. London and New York: Routledge.
- Collins, John and Glover, Ross. (2002). *Collateral Language: A Users Guide to America's New War*. New York: New York University Press.
- Compaine, Benjamin M. (2002). Global Media. *Foreign Policy*, Vol. 133.
- Craith, Mairead Nic (ed.). (2007). *Language, Power and Identity Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks CA: Sage Publications.
- De Fina, Anna, et. al. (Eds.). (2006). *Discourse and Identity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Diamond, Jared. (2005). *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*. New York: Penguin.
- Dragt, Jeroen. (2011, January). *Remembering 9/11: An Analysis of the Editorial Coverage of the Anniversaries of 9/11*, BA Thesis English Language and Culture, Utrecht University.
- Entman, Robert M. (1991). Framing US Coverage of International News: Contrasts in Narratives of the KAL and Iran Air Incidents, *Journal of Communication*, Vol. 41.
- Fowler, Robert. G. (1991). *Language in the News: Discourse and Ideology in the Press*. London: Routledge.
- Giles, David C. & Shaw, Rachel L. (2009). *The Psychology of News Influence and the Development of Media Framing Analysis*. Social and Personality Psychology Compass.
- Goff, Patricia M. & Dunn, Kevin C. (Eds.). (2004). *Identity and Global Politics: Empirical and Theoretical Elaborations*. New York: Palgrave Macmillan.
- Gowing, Nik. (1996). Real Time TV Coverage from War, dalam *Bosnia by Television*. London: British Film Institute.

- Habeck, Mary R. (2006). *Knowing the Enemy: Jihadist Ideology and the War on Terror*. New Haven and London: Yale University Press.
- Hackney, Sheldon. (1997). *One America, Indivisible: A National Conversation on American Pluralism and Identity*. Washington, DC: National Endowment for the Humanities.
- Hakim, Catherine. (2000). *Research Design: Strategies and Choices in the Design of Social Research, 2nd edn*. London: Routledge.
- Hall, Martin and Jackson, Patrick T. (Eds.). (2007). *Civilizational Identity: the Production and Reproduction of "Civilizations" in International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hall, Stuart. (1996). "Who Needs Identity?" dalam Stuart Hall and Paul du Gay, *Questions of Cultural Identity*. London: Sage Publications.
- Hamada, Basyouni I. (2003). Media, Violence and Terrorism in the Arab World, dalam Kwame Boavo et.al. (Eds.). *Media, Violence and Terrorism*. Paris: UNESCO.
- Hartmann-Mahmud, Lori. (2002). War as Metaphor. *Peace Review* Vol. 14 No. 4.
- Heryanto, Ariel. (2006). *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*. London and New York: Routledge.
- Hodges, Adam and Nilep, Chad (Eds.). (2007). *Discourse, War and Terrorism*. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Huddy, Leonie & Khatib, Nadia. (2007). American Patriotism, National Identity, and Political Involvement. *American Journal of Political Science*, Vol. 51.
- Hutchings, Stephen & Miazhevich, Galina. (2009). The Mass Media's Role as Disruptive/Revitalising Force in the Global 'War on Terror'. *Media Discourse: The Theory and Practice of Mass Communications*, Vol. 6, No. 12.
- Jackson, Richard. (2007). "Playing the Politics of Fear: Writing the Terrorist Threat in the War on Terrorism", dalam G. Kassimeris (Ed.), *Playing Politics with Terrorism: A User's Guide*. New York: Columbia University Press.
- (2009). The Study of Terrorism after 11 September 2001: Problems, Challenges and Future Development. *Political Studies Review*, Vol. 1, No. 2.

- Jaspal, Rusi and Cinnirella Marco. (2010). *Media Representations of British Muslims and Hybridized Threats to Identity*. London: Springer, *Cont Islam*, Vol. 4: 289–310.
- Johnson, Thomas A. (2009). *The War on Terrorism: A Collision of Values, Strategies, and Societies*. London and New York: CRC Press.
- Johnstone, Barbara. (2002). *Discourse Analysis*. Oxford: Blackwell.
- Karawan, Ibrahim A. et. al. (Eds.). (2008). *Values and Violence: Intangible Aspects of Terrorism*. London and New York: Springer.
- Kaufman, Robert G. (2007). *In Defense of the Bush Doctrine*. Kentucky: The University Press of Kentucky.
- Kellner, Douglass. (2004). 9/11, Spectacles of Terror, and Media Manipulation. *Critical Discourse Studies*. London: Routledge, Vol. 1, No. 1.
- Li, Xigen & Izard, Ralph. (2007). 9/11 Attack Coverage Reveals Similarities, Differences, *Newspaper Research Journal*, Vol. 24, No. 3.
- Livingston, Stephen. (1997). *Clarifying the CNN Effect: an Examination of Media Effects According to Type of Military Intervention*. Research Paper.
- Lukens, William E. (2007). *Public Support for the Global War on Terror: Do We Have What It Takes?* USAWC Strategy Research Project.
- Maalouf, Amin. (2000). *In the Name of Identity: Violence and the Need to Belong*. New York: Penguin Publishers.
- MacCombs, Maxwell & Shaw, Donald. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, Vol. 36: 176-187.
- Mansour, Nedal. (2003). The Aftermath of September 11: An Arab Perspective, dalam Kwame Boavo et.al. (Eds.). *Media, Violence and Terrorism*. Paris: UNESCO.
- Marranci, Gabriele. (2009). *Understanding Muslim Identity: Rethinking Fundamentalism*. New York: Palgrave Macmillan.
- Martin, Raymond and Barresi, John. (2003). *Personal Identity*. Oxford: Blackwell Publishing.

- McDaniel, Erick & Nooruddin, Irfan. (2008). *Proud to Be an American: How National Pride Affects Visions of National Identity*. University of Michigan Press.
- Meyer, David S. et. al. (Eds.). (2002). *Social Movements: Identity, Culture, and the State*. Oxford: Oxford University Press.
- Miller, Toby. (2006). U.S. Journalism: Servant of the Nation, Scourge of the Truth?, dalam Benjamin Cole (Ed.). *Conflict, Terrorism and the Media*. London and New York: Routledge.
- Milliken, Jennifer. (1999). The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research and Methods. *European Journal of International Relations*, Vol. 5 No. 2.
- Morgan, Matthew J. (Ed.). (2009). *The Impact of 9/11 on the Media, Arts and Entertainment*. New York: Palgrave Macmillan.
- Nacos, Brigitte L. dan Torres-Reyna, Oscar. (2003). "Framing Muslims American Before and After 9/11", dalam Pippa Norris et.al., *Framing Terrorism: the News Media, the Government and the Public*. London and New York: Routledge.
- Naveh, Chanan. (2002). The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making: A Theoretical Framework. *Conflict & Communication Online*, Vol. 1, No. 2.
- Neuman, W. Russel, Just, Marion R., & Crigler, Ann N. (1992). *Common Knowledge: News and Construction of Political Meaning*. Chicago: University of Chicago Press.
- Neumann, Iver B. (1999). *Uses of the Other: "The East" in European Identity Formation*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Norris, Pippa et.al. (Eds.). (2003). *Framing Terrorism: the News Media, the Government and the Public*. New York and London: Routledge.
- O'Hagan, Jacinta. (2004). "The Power and the Passion: Civilizational Identity and Alterity in the Wake of September 11", dalam Patricia M. Goff & Kevin C. Dunn (Eds.). *Identity and Global Politics: Empirical and Theoretical Elaborations*. New York: Palgrave Macmillan.
- Passante, Christopher K. (2007). *The Complete Idiot's Guide to Journalism – Editorials*. New York: Penguin.

- Peterson, Richard. (2007). "Violence, Power and Identity: What Are the Condition of Terrorism?" dalam Presbey, Gail M. *Philosophical Perspectives on the "War on Terrorism"*. Amsterdam and New York: Rodopi.
- Purpura, Philip P. (2007). *Terrorism and Homeland Security: An Introduction with Applications*. Oxford: Elsevier.
- Robinson, Piers. (2000). The Policy-Media Interaction Model: Measuring Media Power during Humanitarian Crisis. *Journal of Peace Research*, Vol. 37, No. 5.
- (2001). Operation Restore Hope and the Illusion of a News Media Driven Intervention. *Political Studies*, Vol. 49.
- Rosenfeld, Jean E (Ed.). (2011). *Terrorism, Identity and Legitimacy: the Four Waves Theory and Political Violence*. London and New York: Routledge.
- Rourke, John T. (2003). *International Politics of the World Stage, 10th Ed.* New York: McGraw-Hill.
- Sabatier, P. A. (1991). Toward Better Theories of the Policy Process. *Political Science and Politics*, Vol. 3. No. 3: 147-172.
- Sarbin, T. R. (2003). The Metaphor-to-Myth Transformation with Special Reference to the "War on Terrorism". *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, Vol. 9 No. 2.
- Schatz, Robert T. et.al. (1999). On the Varieties of National Attachment: Blind versus Constructive Patriotism. *Political Psychology*, Vol. 20 No. 1.
- Schildkraut, Deborah J. (2011). "National Identity in the United States", in S.J. Schwartz et al. (Eds.) *Handbook of Identity Theory and Research*, Vol. 1 Structures and Processes. London and New York: Springer.
- Schwartz, Seth J. et al. (2009). *Terrorism: an Identity Theory Perspective, in Studies in Conflict and Terrorism*. London and New York: Routledge.
- Shoemaker Pamela J. and Reese, Stephen D. (1996). *Theories of Influences on Mass Media Content*. New York: Longman.
- Shimko, Keith. (1995) "Foreign Policy Metaphors: Falling "Dominos" and Drug "Wars"", dalam L. Neack, J. A. K. Hey and P. J. Haney (Eds.) *Foreign Policy Analysis. Continuity and Change in its Second Generation*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

- Shultz, Richard & Vogt, Andreas. (2006). It's War! Fighting Post – 11 September Global Terrorism through a Doctrine of Preemption. *Terrorism and Political Violence*, Vol. 15.
- Silbergh, David M. (2001). *Doing Dissertation in Politics: A Student Guide*. London and New York: Routledge.
- Simon, Jeffrey. (1987, June). *Misperceiving the Terrorist Threat*. RAND Publication Series, R-3423-RC.
- Smith, M. Brewster. (2002). The Metaphor (and Fact) of War. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, Vol. 8 No. 3.
- Smith, Paul J. (2008). *The Terrorism Ahead: Confronting Transnational Violence in the Twenty-first Century*. New York and London: M.E. Sharpe.
- Snyder, Glenn et.al. (1969). The Decision-making Approach to the Study of International Relations in Rosenau, J. (Ed.) *International Politics and Foreign Policy* (2nd ed.), The Free Press.
- Sontag, Susan. (1989). *Illness as a Metaphor and AIDS and its Metaphors*. New York: Doubleday.
- Spencer, Alexander. (2010). *The Tabloid Terrorist: the Predicative Construction of New Terrorism in the Media*. New York: Palgrave Macmillan.
- Stepanova, Ekaterina. (2003, June). Anti-terrorism and Peace-building During and After Conflict, *Stockholm International Peace Research Institute*.
- Tenet, George. (2007). *At the Center of the Storm: My Years at the CIA*. New York: Harper Collins.
- Van der Veer, Peter & Munshi, Shoma Media (Eds.). (2004). *War and Terrorism: Responses from the Middle East and Asia*. London and New York: Routledge.
- Van Dijk, Teun A. (1998). "Opinions and Ideologies in the Press", dalam Bell, A. and P. Garrett (Eds.). *Approaches to Media Discourse*. Oxford: Blackwell.
- Werhan, Keith. (2008). Rethinking Freedom of the Press after 9/11, *Tulane Law Review*, Vol. 82, No. 07-11.
- Wijadi, Tjahjo Purnomo. (2004). "The WTC Tragedy and the US Attack on Afghanistan: the Press Joins in Beating the War Drums", dalam *Media, War and Terrorism*. London and New York: Routledge.

Wilkins, Lee & Christian, Clifford G. (2009). *The Handbook of Mass Media Ethics*. New York: Routledge.

Zuleika Joseba. (2009). *Terrorism: the Self-Fulfilling Prophecy*. Chicago and London: the University of Chicago Press.

ARTIKEL

Beschloss Michael. (2001, September 17). Bush Faces the Greatest Test. *The New York Times*, A2

Blair, Tony. (2001, September 14). International Terrorism and Attacks in the USA, *House of Commons*.

Bumiller, Elisabeth. (2001, September 21). A Nation Challenged: the Overview; Bush Pledges Attack on Afghanistan Unless It Surrenders bin Laden Now; He Creates Cabinet Post for Security. *The New York Times*, A1.

Burns, John F. (2001, August 21). F.B.I.'s Inquiry in Cole Attack Is Nearing Halt. *The New York Times*, A3.

Demands of Leadership (2001, September 13). *The New York Times*, A2

Kennedy, David M. (2001, September 16). Fighting an Elusive Enemy. *The New York Times*, A2

Kinsley, Michael. (2010, July 28). Boring Article Contest. *The Atlantic*.

Levy, Clifford J. & Rashbaum, William K. (2001, September 14). After the Attacks: the Airports; Bush and Top Aides Proclaim Policy of 'Ending' States that Back Terror; Local Airports Shut After an Arrest. *The New York Times*, A1.

McFadden, Robert. (2001, September 13). After the Attacks: Stunned Rescuers Comb Attack Sites, but Thousands Are Presumed Dead; F.B.I. Tracking Hijackers' Movement. *The New York Times*, A1.

----- (2001, September 15). After the Attacks: the President Bush Leads Prayer, Visits Aid Crews; Congress Backs Use of Armed Force. *The New York Times*, A1.

Morgenson, Gretchen. (2001, September 18). A Nation Challenged: the Overview; Wall St. Reopens Six Days After Shutdown; Stocks Slide 7%, but Investors Resist Panic. *The New York Times*, A1.

- Mr. Bush's Most Important Speech. (2001, September 21). *The New York Times*, B2.
- Rendezvous With Afghanistan. (2001, September 14). *The New York Times*, A2
- Risen, James. (2001, September 16). After the Attacks: the Trail; Bush Tells the Military to 'Get Ready'; Broader Spy Power Gaining Support. *The New York Times*, A1.
- Sanger, David E. (2001, September 20). A Nation Challenged: the Overview; Bush Orders Heavy Bombers Near Afghans; Demands bin Laden Now, Not Negotiations. *The New York Times*, A1.
- Schmemmann, Serge. (2001, September 12). U.S Attacked: Hijacked Jets Destroy Twin Towers and Hit Pentagon. *The New York Times*, A1.
- Securing the Skies. (2001, September 18). *The New York Times*, A2
- Shane, Scott. (2009, November 28). Senate Report Explores 2001 Escape by bin Laden from Afghan Mountains. *The New York Times*, B1.
- Shenon, Philip & Toner, Robin. (2001, September 19). A Nation Challenged: Policy and Legislation; U.S. Widens Policy on Detaining Suspects; Troubled Airlines Get Federal Aid Pledge. *The New York Times*, A1.
- Stevenson, Richard W. & Fuerbringer, Jonathan. (2001, September 17). After the Attacks: the Economy; Nation Shifts Its Focus to Wall Street as a Major Test of Attack's Aftermaths. *The New York Times*, A1.
- Taubman, Philip. (2001, September 20). Editorial Observer; An Imbalance of Power: Afghanistan's Deceptive Strengths. *The New York Times*, A2
- The War Against America; The National Defense. (2001, September 12). *The New York Times*, B1.
- Walzer, Michael. (2001, September 21). First, Define the Battle. *The New York Times*, B1.
- War Without Illusions (2001, September 15). *The New York Times*, A2
- Wartime Rhetoric. (2001, September 19). *The New York Times*, B1.
- Weiner, Tim. (1999, April 13). U.S. Hard Put to Find Proof Bin Laden Directed Attacks. *The New York Times*, B2.

Weiser, Benjamin. (2001, October 21). Bin Laden Linked to Embassy Blast by an Ex-Soldier. *The New York Times*, B2.

SUMBER ONLINE

After the Attacks; Excerpts from Court Charges: to Terrorists, 'It Was Proper to Kill Americans' <www.nytimes.com/1998/08/28/world/>

Gammon, Katherine. (2012, June 30). *Freedom of the Press*, <www.livescience.com/21312-freedom-of-the-press.htm>

Hoge, James F. (2004, July/August). *Media Pervasiveness* (Foreign Affairs), <<http://www.foreignaffairs.com/articles/50108/james-f-hoge-jr/media-pervasiveness>>

Ins Roundup Target Muslims, Says Islamic Advocacy Group, (Council on America-Islamic Relations, 2002, December 23), <<http://www.cair-florida.org/SFL/Articles.aspx?co=AA>>

Joseph Nye. (1999, July/August). *Redefining the National Interest* (Foreign Affairs), <<http://www.foreignaffairs.com/articles/20124/joseph-nye/redefining-the-national-interest>>

Kenix, Linda Jean. *Alternative and Mainstream Media: The Converging Spectrum*, Bloomsbury Academic <www.bloomsburyacademic.com>

Pena, Por Monica. (2008, April 10). *Media and Foreign Policy Decision-Making Process*, CNN or Washington? <<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n32/mpena.htm>>

Puglisi, Riccardo. (2004). *Being the New York Times: The Political Behaviour of a Newspaper*. <http://eprints.lse.ac.uk/19292/1/Being_the_new_york_times.pdf>

The Media in the United States: Freedom of the Press (2008, December), <usa.usembassy.de/media-freedom.htm>

Timeline of the New York Times Building. The New York Times Company, <www.nytc.com/company>

Transkrip pidato President Bush, CNN.com <edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/>